

# LAPORAN

## PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si  
BUPATI GUNUNG MAS

Ir. EFRENSIA L.P. UMBING, M.Si  
WAKIL BUPATI GUNUNG MAS

# LPPD 2023

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
**INSPEKTORAT**

Alamat : Jalan Letjend Soeprpto No. 8 Telp/Fax. 0537-3032782,  
Kuala Kurun 74511

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Ini .

Kuala Kurun, 20 Maret 2024

**INSPEKTUR,**



**Drs. DIHEL, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690820 199403 1 019

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas limpahan Berkat, Kasih dan KaruniaNya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah mampu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus bertolak dan bermuara pada Tujuan EKPPD yakni menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Upaya peningkatan Kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Seluruh hasil Kegiatan baik yang menyangkut Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan APBD di tahun 2023, berikut permasalahan dan solusi terangkum secara singkat dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 ini.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1), bahwa Kepala

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas limpahan Berkat, Kasih dan KaruniaNya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas telah mampu menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota.

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, harus bertolak dan bermuara pada Tujuan EKPPD yakni menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Upaya peningkatan Kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah sebagaimana diamanat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Seluruh hasil Kegiatan baik yang menyangkut Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan APBD di tahun 2023, berikut permasalahan dan solusi terangkum secara singkat dalam Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 ini.

Penyusunan laporan ini merupakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1), bahwa Kepala

Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sistematika dan Materi Laporan ini Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini merupakan Progres Report Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2023 yang disampaikan kepada Pemerintah sebagai sarana pengawasan kinerja Pemerintah Daerah dan telah direviu oleh Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Semoga Laporan bermanfaat bagi Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas. Akhirnya dengan semangat kebersamaan kita bangun **"Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau"** Kabupaten Gunung Mas ini menjadi Kabupaten yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri.

Kuala Kurun, 25 Maret 2024



MONONG, S.E., M.Si.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	11
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	39
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>42</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	42
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	47
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	74
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..</b>	<b>219</b>
3.1 Target Kinerja .....	219
3.2 Realisasi Kinerja .....	221
3.3 Hambatan / Permasalahan .....	223
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL.....</b>	<b>234</b>
4.1 Urusan Pendidikan.....	234
4.2 Urusan Kesehatan .....	239
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	245
4.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	247
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	250
4.6 Urusan Sosial.....	254
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>258</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.1.1 Penjelasan Umum**

##### **a. Dasar Hukum Pembentukan Daerah**

Kabupaten Gunung Mas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden pada tanggal 2 Juli 2002 di Jakarta.

##### **b. Data Geografis Wilayah**

Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi sumber daya alam yang relatif besar, dan sebagian dari potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Gunung Mas, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1. Kondisi Geografis Daerah**

Secara Geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada posisi  $\pm 00^{\circ}18'00''$  Lintang Selatan sampai dengan  $01^{\circ}40'30''$  lintang selatan dan  $\pm 113^{\circ}01'00''$  bujur timur sampai dengan  $114^{\circ}01'00''$  bujur timur dengan luas wilayah 10.804 Km<sup>2</sup> (1.080.400 Ha) dengan topografis dataran rendah bagian selatan dan daerah utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara  $\pm 200 - 500$  meter dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan  $\pm 80 - 150$  dan perbukitan tingkat kemiringan  $\pm 150-250$  dimana terbentang

pegunungan Muller & Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter di atas permukaan laut.

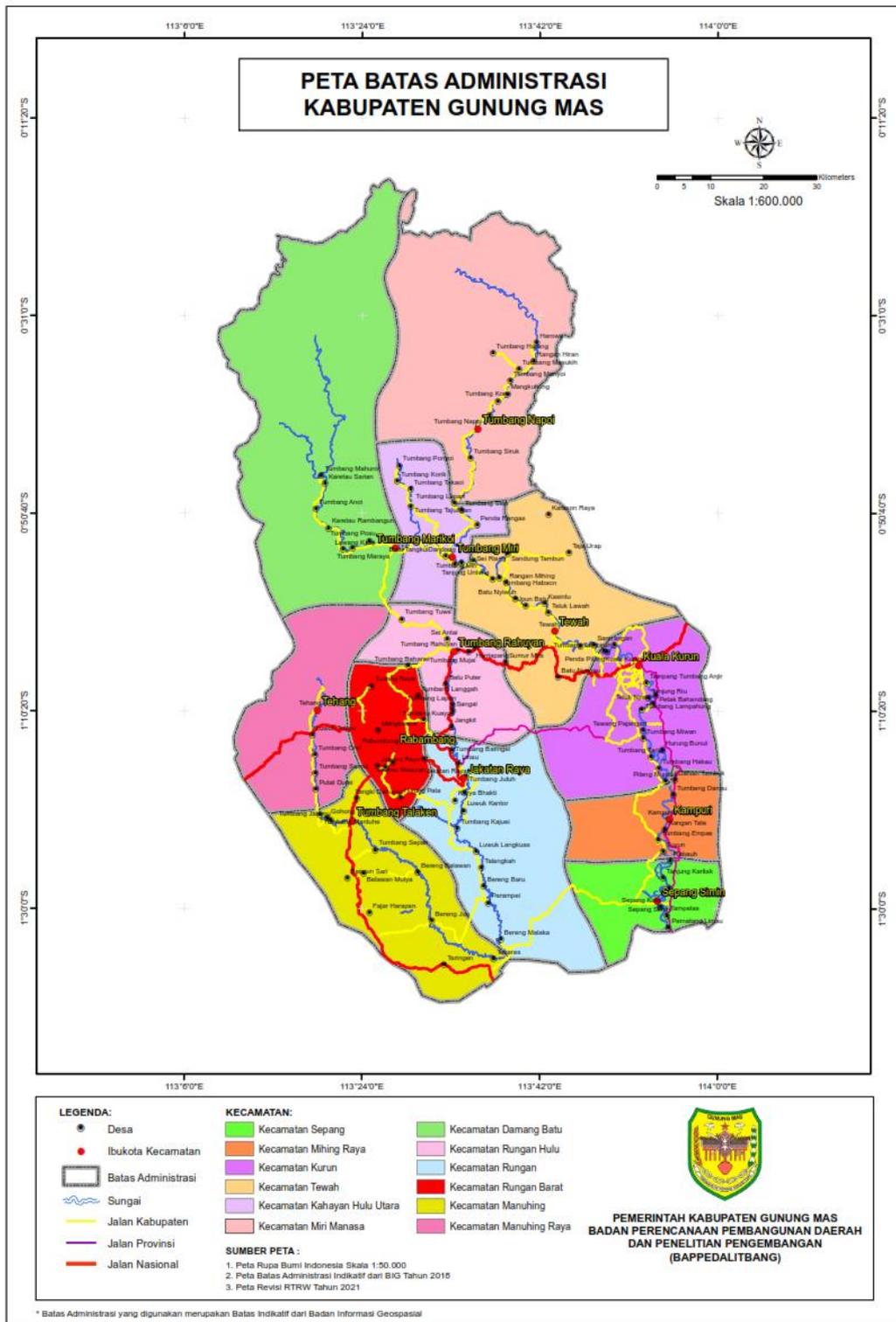
Secara administrasi Kabupaten Gunung Mas berbatasan dengan:

- **Sebelah Utara** : Berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Permendagri Nomor 37 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Permendagri Nomor 80 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah);
- **Sebelah Timur** : Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas (Permendagri Nomor 76 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Kapuas dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Permendagri Nomor 37 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Gunung Mas dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah);
- **Sebelah Selatan** : Berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau (Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah) dan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (Permendagri Nomor 75 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangka

- Raya dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah); dan
- **Sebelah Barat** : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah (Permendagri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah) dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Permendagri Nomor 80 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah).

Luas Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 adalah 9.317,11 Km<sup>2</sup>, jika dibandingkan dengan luas Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 153.564 Km<sup>2</sup>, luas Kabupaten Gunung Mas sebesar 6,07% dari luas Provinsi Kalimantan Tengah dan merupakan Kabupaten terluas ke – 6 (enam) dari 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Gunung Mas**



Sumber: Peta Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021

## **2. Kondisi Topografi**

Secara Topografi, daerah utara Kabupaten Gunung Mas merupakan perbukitan dengan ketinggian antara  $\pm 100$ – $500$  Meter dari permukaan air laut. Selain itu, daerah ini mempunyai tingkat kemiringan antara  $\pm 8$ – $15$  derajat, serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan  $\pm 15$ - $250$ . Pada daerah tersebut terdapat pegunungan Muller dan Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai  $2.278$  Meter dari permukaan air laut.

Bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim-musim hujan.

Selain itu, daerah Kabupaten Gunung Mas juga memiliki wilayah perairan yang meliputi danau, rawa-rawa, dan sungai. Ada empat jalur sungai yang melalui wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu:

1. Sungai Manuhing dengan panjang sekitar  $\pm 28,75$  Km.
2. Sungai Rungan dengan panjang sekitar  $\pm 86,25$  Km.
3. Sungai Kahayan dengan panjang sekitar  $\pm 600$  Km.
4. Sungai Miri dengan panjang sekitar  $\pm 20$  Km.

## **3. Jenis Tanah**

Sebagian besar wilayah daratan Kabupaten Gunung Mas terdiri dari jenis tanah podsolik merah kuning. Pada dasarnya jenis tanah di Kalimantan Tengah terdiri dari organosol, laterit, regosol, alluvial, podsol, lithosol dan latosol.

### **c. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Gunung Mas**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2019	136.638 Jiwa
2.	2020	140.776 Jiwa
3.	2021	138.407 Jiwa
4.	2022	131.174 Jiwa
5.	2023	130.241 Jiwa

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023

**d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 12 Kecamatan dan 115 Desa serta 13 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2****Luas Wilayah Kabupaten Gunung Mas Per Kecamatan**

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Desa	Jumlah Kel	Luas wilayah Km2
1	2	3	4	5	6
1	Manuhing	Tumbang Talaken	11	1	839,06
2	Manuhing Raya	Tehang	5	1	654,63
3	Rungan	Jakatan Raya	13	1	977,44
4	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	8	1	468,57
5	Sepang	Sepang Simin	6	1	368,77
6	Mihing Raya	Kampuri	5	1	383,74
7	Kurun	Kuala Kurun	13	2	772,05
8	Tewah	Tewah	15	1	854,33
9	Kah. Hulu Utara	Tumbang Miri	11	1	422,21
10	Damang Batu	Tumbang Marikoi	7	1	1.824,04
11	Miri Manasa	Tumbang Napoi	10	1	1.405,20
12	Rungan Barat	Rabambang	10	1	347,09
<b>TOTAL</b>			<b>114</b>	<b>13</b>	<b>9.317,11</b>

Sumber : *Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023*

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebanyak 26 Perangkat Daerah, 12 Kecamatan, 1 RSUD Kuala Kurun, dengan rincian sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Pemerintah**  
**Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023**

NO	UNIT KERJA / INSTANSI	JUMLAH PEGAWAI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat Daerah	50	18	68
2	Sekretariat DPRD	19	6	25
3	Sekretariat KPU	1	-	1
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	9	23
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	9	21
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	5	18
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	21	19	40
8	Badan Pendapatan Daerah	19	16	35
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	19	16	35
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	16	25
11	Dinas Kesehatan	25	49	74
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	19	12	31
13	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan	35	13	48
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14	10	24
15	Dinas Pekerjaan Umum	48	17	65
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	8	22
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	7	20

18	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	48	32	80
19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	24	32
20	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	19	15	34
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12	12	24
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6	19	25
23	Dinas Pertanian	39	31	70
24	Dinas Sosial	12	13	25
25	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	19	15	34
26	Inspektorat	27	14	41
27	Satuan Polisi Pamong Praja	27	3	30
28	UPT RSUD Kuala Kurun	33	75	108
29	Kantor Kecamatan Damang Batu	9	-	9
30	Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara	9	1	10
31	Kantor Kecamatan Kurun	6	9	15
32	Kantor Kecamatan Manuhing	15	3	18
33	Kantor Kecamatan Manuhing Raya	5	2	7
34	Kantor Kecamatan Mihing Raya	10	2	12
35	Kantor Kecamatan Miri Manasa	7	2	9
36	Kantor Kecamatan Rungan	10	2	12
37	Kantor Kecamatan Rungan Barat	8	1	9
38	Kantor Kecamatan Rungan Hulu	11	3	14
39	Kantor Kecamatan Sepang	13	3	16
40	Kantor Kecamatan Tewah	9	5	14
41	Kantor Kelurahan Tumbang Marikoi	4	1	5
42	Kantor Kelurahan Tumbang Miri	2	-	2
43	Kantor Kelurahan Kurun	1	5	6
44	Kantor Kelurahan Tampang Tumbang Anjir	8	1	9
45	Kantor Kelurahan Tumbang Talaken	4	2	6

46	Kantor Kelurahan Tehang	1	1	2
47	Kantor Kelurahan Kampuri	3	1	4
48	Kantor Kelurahan Tumbang Napoi	3	-	3
49	Kantor Kelurahan Jakatan Raya	4	-	4
50	Kantor Kelurahan Tumbang Rahuyan	4	-	4
51	Kantor Kelurahan Sepang Simin	4	1	5
52	Kantor Kelurahan Tewah	7	2	9
53	Kantor Kelurahan Rabambang	3	1	4
54	Puskesmas Rawat Inap Kampuri	16	25	41
55	Puskesmas Kurun	5	18	23
56	Puskesmas Rabambang	1	13	14
57	Puskesmas Rawat Inap Sepang	10	23	33
58	Puskesmas Tampang Tumbang Anjir	1	21	22
59	Puskesmas Rawat Inap Tehang	6	9	15
60	Puskesmas Rawat Inap Tewah	17	29	46
61	Puskesmas Tewang Pajangan	6	12	18
62	Puskesmas Tumbang Mahuroi	4	3	7
63	Puskesmas Tumbang Marikoi	2	11	13
64	Puskesmas Tumbang Masukih	6	3	9
65	Puskesmas Rawat Inap Plus Feeding Center Tumbang Miri	8	27	35
66	Puskesmas Rawat Inap Tumbang Napoi	3	6	9
67	Puskesmas Rawat Inap Tumbang Rahuyan	8	2	10
68	Puskesmas Rawat Inap Tumbang Talaken	9	26	35
69	Puskesmas Tumbang Lapan	2	4	6
70	RSUD Pratama Talaken	6	15	21
71	Puskesmas Rawat Inap Tumbang Jutuh	8	22	30
72	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1	2
73	TK	-	86	86

74	SD	336	740	1.076
75	SMPN	149	252	401
<b>TOTAL</b>		<b>1.359</b>	<b>1.879</b>	<b>3.238</b>

Sumber: BKPSDM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023

**f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Pemerintah Kabupaten Gunung Mas**  
**Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	TAHUN 2023		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	1. Pajak Daerah	49.230.000.000,00	11.888.728.187,00	24,15
	2. Restribusi Daerah	4.828.080.000,00	5.788.751.837,20	119,90
	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	24.000.000,00	81.147.428,96	338,11
	4. Lain-lain Pendapatan yang Sah	20.250.416.530,00	18.188.588.540,42	89,82
	1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.073.816.565.000,00	1.078.209.703.770,00	100,41
	2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	58.733.909.632,00	57.314.887.058,00	97,58
	3. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.748.040.000,00	4.602.655.276,00	122,80
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.210.631.011.162,00</b>	<b>1.176.074.462.097,58</b>	<b>97,15</b>

NO	URAIAN	TAHUN 2023		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>BELANJA</b>			
	1. Belanja Operasi	849.602.808.825,00	796.297.876.778,70	93,73
	2. Belanja Modal	291.830.294.608,00	276.129.924.031,39	94,62
	3. Belanja Tidak Terduga	9.580.000.000,00	212.500.000,00	2,22
	4. Belanja Transfer	183.197.290.930,00	177.597.590.972,00	96,94
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.334.210.394.363,00</b>	<b>1.250.237.891.782,09</b>	
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(123.579.383.201,00)</b>	<b>(74.163.429.684,51)</b>	
<b>II</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>135.547.383.201,00</b>	<b>135.547.383.201,20</b>	100
<b>III</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
	1. Penyertaan Modal Daerah	<b>11.968.000.000,00</b>	<b>11.968.000.000,00</b>	100
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>123.579.383.201,00</b>	<b>123.579.383.201,20</b>	
	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>49.415.953.516,69</b>	

Sumber : BKAD Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2023 (unaudited)

## 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, sasaran strategi, program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Pembangunan Nasional seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**b. Visi dan Misi Kepala Daerah.**

Visi merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dimana visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Gunung Mas, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2019–2024 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG  
BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN  
MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)”**

Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yakni “Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri”. Ketiga rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan.

**Bermartabat** adalah kondisi Kabupaten Gunung Mas memiliki dan mampu memelihara budaya dan adat istiadat yang luhur yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang berbeda sehingga tidak

mudah terpengaruh oleh dunia luar yang negative dalam membangun harkat kemanusiaan yang sesungguhnya dan terhormat.

**Maju** adalah bahwa tingkat perkembangan dan keberhasilan kegiatan pembangunan yang menempatkan Kabupaten Gunung Mas sejajar atau bahkan lebih maju dari Kabupaten/Kota atau daerah lain ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan mental spiritual masyarakat.

**Berdaya saing** adalah mampu bersaing dan berkembang dengan tersedianya infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas guna peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi yang bertumpu pada potensi unggulan daerah.

**Sejahtera** adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan geografis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengembangkan kemampuan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Mandiri** adalah mampu memanfaatkan potensi SDA yang melimpah dan keunggulan geografis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan diarahkan secara terintegrasi dan seimbang, yakni: pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat, tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; menjamin terciptanya rasa aman, nyaman dan damai untuk terwujud solidaritas yang harmonis diantara semua lapisan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal; menjamin tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan dan produktivitas ekosistem.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 disusun misi sebagai berikut:

**1. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional**

Melalui misi ini, pembangunan infrastruktur wilayah berupa prasarana dan sarana untuk mendukung kepentingan publik dan pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.

**2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya Manusia**

Melalui misi ini, pembangunan SDM diarahkan untuk meningkatkan standar kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan mental dan spiritual warga, meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah dan kalangan swasta.

**3. Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah**

Melalui misi ini, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah baik yang bersifat investasi maupun ekstraktif dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan legalitas usaha.

**4. Mempercepat Reformasi Birokrasi**

Melalui misi ini akan diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

**5. Penegakan dan jaminan kepastian hukum (Law Enforcement)**

Melalui misi ini diwujudkan rasa aman dan nyaman bagi segenap komponen masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan berusaha atau bekerja baik di bidang pertambangan (investor dan tambang rakyat) dan bidang kehutanan (pengusaha HPH dan usaha masyarakat) dan bidang lainnya.

**6. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan local**

Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian tata pergaulan hidup masyarakat yang harmonis dengan tata pergaulan hidup masyarakat lain dalam bingkai Huma Betang dan falsafah belum Bahadat.

**7. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)**

Melalui misi ini kebijakan pembangunan daerah selalu diarahkan pada keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi

**8. Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI**

Misi ini diperuntukkan untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan penegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kerangka NKRI

Dengan melihat perkembangan, kondisi Kabupaten Gunung Mas, potensi unggulan daerah, dan merujuk pada adanya konsep *SMART CITY* maka terdapat 3 konsep pembangunan Kabupaten Gunung Mas yang akan dilakukan yaitu:

**SMART AGRO**

Smart agro merupakan pengembangan dalam bidang pertanian dari konvensional menjadi lebih modern. Dengan hadirnya teknologi dalam dunia pertanian, diharapkan pertanian Kabupaten Gunung Mas dapat lebih produktif.

## **SMART HUMAN RESOURCES**

Kualitas SDM merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam pembangunan daerah, kualitas SDM yang berdaya saing mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Menindaklanjuti hal tersebut, perlu adanya pengelolaan sumber daya (tenaga kerja) yang dikembangkan dalam sistem yang SMART. Dengan smart human resources diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif, sehingga tujuan bersama dapat tercapai. Dengan smart human resources diharapkan mampu mendesign sebuah sistem Human Resources yang dapat diaplikasikan dalam industri – industri yang sedang berkembang.

## **SMART TOURISM**

Dengan adanya perkembangan IT yang sangat cepat maka hal ini harus mampu dimanfaatkan juga dalam pengembangan potensi-potensi pariwisata daerah. Dalam industri pariwisata telah menciptakan lingkungan baru dalam dunia pariwisata platform pariwisata ICT terintegrasi. Platform tersebut mengintegrasikan peran teknologi informasi dalam memberikan informasi dan layanan yang efisien untuk wisatawan.

## **Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program Dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2019 - 2024**

Berdasarkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapainya melalui strategi pembangunan daerah dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah selama lima tahun mendatang. Setelah tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi (rumusan strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif bagaimana Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

## **1. STRATEGI**

Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD dianggap strategis. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berpikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi.

Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu :

1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Bupati/wakil Bupati ke dalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Perencanaan strategis didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

## **2. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Berkenaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5

<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>		
<b>VISI: “TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)”</b>		
<b>MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS, RELEVANSI DAN AKSES PERANGKAT PENDIDIKAN DAN LAYANAN KESEHATAN.</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>
Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, inovatif, berdaya saing dan sejahtera	Indek pembangunan manusia/IPM	Meningkatnya aksesabilitas dan mutu pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
<b>MISI II: MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DAN DAYA SAING EKONOMI RAKYAT.</b>		
Meningkatnya sumberdaya manusia yang berkualitas, inovatif, berdaya saing dan sejahtera	Indek pembangunan manusia/IPM	Meningkatnya pendapatan masyarakat
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian
		Meningkatnya ketahanan pangan
		Meningkatnya PDRB sub sektor perikanan
		Meningkatnya daya saing

		Koperasi dan UMKM
		Meningkatnya pendapatan masyarakat
		Meningkatnya sektor industri
		Meningkatnya sektor perdagangan
<b>MISI III: MELANJUTKAN DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMBUKA ISOLASI DAERAH SECARA ADIL DAN PROPORSIONAL.</b>		
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas infrastruktur dasar		Meningkatnya kapasitas infrastruktur
Meningkatnya infrastruktur jalan ke desa		Meningkatnya konektivitas
Meningkatnya infrastruktur akses komunikasi	Peningkatan infrastruktur menara telekomunikasi	Meningkatnya layanan konektivitas komunikasi
Meningkatnya infrastruktur akses komunikasi		Meningkatnya keselamatan lalu lintas
		meningkatnya sektor pariwisata
<b>MISI IV: MENINGKATKAN LAYANAN PEMERINTAHAN SECARA LEBIH BERKUALITAS, CEPAT, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL, PADA SEMUA TINGKATAN PEMERINTAHAN</b>		
Terwujudnya	Indeks Reformasi	Meningkatnya pelaksanaan

pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan bebas KKN	Birokrasi	RB
	Nilai Sakip	Meningkatnya akuntabilitas kinerja
	Opini BPK atas laporan keuangan	opini BPK terhadap laporan keuangan
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Meningkatnya kapabilitas APIP
	Implementasi penyelenggaraan SPIP	Meningkatnya maturitas SPIP
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
Terselenggaranya tahapan kebijakan perencanaan yang konsisten melalui mekanisme musrembang yaitu mulai dari musrembang Desa / Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten	Dokumen RTRW, Dokumen RPJMD, Dokumen RKPD	Tersusunnya Dokumen RPJMD, RKPD dan RTRD tata ruang daerah yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu

Meningkatnya akses layanan dan penataan administrasi pertanahan	Tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat sesuai dengan peruntukannya	meningkatkan pengurusan penerbitan sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah tepat waktu
	Masyarakat miskin yang memperoleh sertifikat atas kepemilikan tanah	Tertatanya pengelolaan administrasi pertanahan bagi masyarakat miskin
	Pembebasan tanah untuk pembangunan yang diselesaikan tepat waktu	Meningkatnya prosedur administrasi pembebasan tanah
<b>MISI V: MENINGKATKAN KETERSEDIAAN ENERGI UNTUK RAKYAT</b>		
Meningkatnya kelestarian lingkungan hidup	Kualitas air	Menurunnya pencemaran lingkungan
	Kualitas udara	terpenuhinya baku mutu kualitas air, tanah dan udara
<b>MISI VI: MENINGKATKAN PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA, MELALUI PENGUATAN KETERKAITAN DAN RELEVANSI ANTARA PENGEMBANGAN PERANGKAT PENDIDIKAN DENGAN INVESTASI DAERAH</b>		
Meningkatnya tenaga kerja terampil	Tersedianya tenaga kerja yang siap pakai	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
		Meningkatnya prestasi olahraga

Meningkatnya perempuan yang aktif pada pembangunan		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
		Meningkatnya Perlindungan hak Perempuan dan Anak
Meningkatnya keamanan lingkungan		meningkatkan keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat
Meningkatnya jumlah investasi daerah	Nilai Investasi	meningkatkan investasi
	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani	Meningkatnya Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani
		Meningkatnya tenaga kerja bergelar s-2, s-3
<b>MISI VII: MENINGKATKAN PENGENDALIAN, PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA SERASI, SEIMBANG DAN LESTARI</b>		
Meningkatkan aksesibilitas lingkungan sesuai tata ruang		Meningkatnya aksesabilitas masyarakat terhadap kebutuhan dasar
Meningkatnya keamanan lingkungan	Kawasan Tahura yang dilestraikan untuk suaka Flora dan Fauna	Tertata dan terjaganya kelestarian kawasan Tahura Lapak Jaru

**c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

Program-program pembangunan yang disusun dalam RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang terdiri dari 3 jenis program yang dilaksanakan oleh SKPD/Unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang kewenangannya. Program-program tersebut antara lain:

1. Program Perangkat Daerah yang merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
2. Program lintas Perangkat Daerah yang merupakan program yang melibatkan lebih dari satu perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan.
3. Program kewilayahan yang merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanyaketerpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Program pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2019-2024 berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut:

**URUSAN WAJIB:**

1. Pendidikan, meliputi:
  - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
  - c. Program Pendidikan Menengah;
  - d. Program Pendidikan Non-Formal;
  - e. Program Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
  - g. Program Pengembangan SDM dalam Bidang Kesehatan;
  - h. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Kesehatan;

2. Kesehatan, meliputi:
  - a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
  - b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
  - e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
  - f. Program Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular;
  - g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
  - h. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
  - i. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
  - j. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
  - k. Program Jaminan Persalinan;
  - l. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
  - m. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
  - n. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
  - o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
  - p. Program pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
  - q. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).
  - r. Program Sistem informasi Rumah Sakit (SIRS).
  
3. Lingkungan Hidup, meliputi:
  - a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
  - b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
  - c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
  - d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;

- e. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
  - f. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
  - g. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Pekerjaan Umum, meliputi:
- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - b. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
  - c. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
  - d. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong;
  - e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - f. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan;
  - g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
  - h. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya;
  - i. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;
  - j. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
  - k. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
  - l. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;
  - m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - n. Program Penunjang Infrastruktur;
  - o. Program Transportasi Desa
  - p. Program Perencanaan Tata Ruang
  - q. Program Pembangunan Penerangan Jalan
  - r. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Pertamanan;
  - s. Program Sistem Penyediaan Air Minum;
  - t. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
  - u. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;
  - v. Program Pembangunan Kinerja Air Limbah;

- w. Program Sistem Penyediaan Air Minum;
  - x. Program Pengembangan Kinerja Air Minum;
5. Penataan Ruang, meliputi:
- a. Program Perencanaan Tata Ruang;
  - b. Program Pemanfaatan Ruang;
  - c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
6. Perencanaan Pembangunan, meliputi:
- a. Program Pengembangan Data/Informasi;
  - b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. Program Kerjasama Pembangunan;
  - e. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
  - f. Program Perencanaan Sosial Budaya;
  - g. Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh.
7. Perumahan, meliputi:
- a. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
  - b. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.
8. Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi:
- a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
  - b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
  - c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;
  - d. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
  - e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
  - f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
  - g. Program Penguatan Kelembagaan;
  - h. Program Peningkatan Mutu Pembinaan dan Pembangunan Olahraga;

- i. Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Olahraga Pendidikan.
9. Penanaman Modal, meliputi:
- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
  - b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
  - c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah;
  - d. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan.
10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi:
- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
  - b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
  - c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
  - d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
  - e. Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah dan Produktif.
11. Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi:
- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.
12. Ketenagakerjaan, meliputi:
- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - b. Program Peningkatan Ketenagakerjaan;
  - c. Program Perluasan Kesempatan Kerja;
  - d. Program Peningkatan Sarana Hubungan Industrial;
  - e. Program Perlindungan Pengembangan Ketenagakerjaan;
  - f. Program Peningkatan Lembaga Hubungan Industrial;
  - g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
13. Ketahanan Pangan, meliputi:
- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

- b. Program Agribisnis dan Ketahanan Pangan.
  - c. Program Kerawanan dan Kewaspadaan Pangan.
14. Pemberdayaan Perempuan dan Anak, meliputi:
- a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
  - b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
  - c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
  - d. Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi:
- a. Program Keluarga Berencana;
  - b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
  - c. Program Pelayanan Kontrasepsi;
  - d. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB-KR yang Mandiri;
  - e. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
  - f. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
  - g. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS;
  - h. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
  - i. Program Pengembangan Model Operasional Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu- Paud;
  - j. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
16. Perhubungan, meliputi:
- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

- b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
  - c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
  - d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
  - e. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.
17. Komunikasi dan Informatika, meliputi:
- a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa;
  - b. Program Kerja Sama Informasi dengan Media Massa;
  - c. Program Pembinaan Telematika Daerah;
  - d. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika;
  - e. Program Pengembangan Aplikasi Sistem dan Konten Telematika;
  - f. Program Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika;
  - g. Program Pengembangan Pelayanan Komunikasi dan Informatika.
18. Pertanahan meliputi:
- a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;
  - b. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;
  - c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
19. Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri, meliputi:
- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
  - b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;

- c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
  - d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
  - e. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
  - f. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, meliputi:
- a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  - b. Program Pendidikan Kedinasan;
  - c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
  - d. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;
  - f. Program Peningkatan Kualitas Kebijakan manajemen Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan);
  - g. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
  - h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
  - i. Program Penerapan dan Penegakan Hukum;
  - j. Program Penataan Sarana dan Prasarana Hukum;
  - k. Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah;
  - l. Program Pengamanan Berita Persandian dan Radiogram;
  - m. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah;
  - n. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
  - o. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan-Kebijakan KDH;

- p. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
  - q. Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi:
- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
  - b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
  - c. Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan;
  - d. Program Peningkatan Keberdayaan dan Kemandirian Lembaga Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Perdesaan;
  - e. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
22. Sosial, meliputi:
- a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
  - c. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya);
  - d. Program Pembinaan Anak Terlantar;
  - e. Program Pembinaan Lanjut Usia Terlantar;
  - f. Program Pemberdayaan Sosial bagi PMKS yang termasuk dalam kriteria Korban Bencana;
  - g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
  - h. Program Pembinaan dan Latihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
23. Kebudayaan, meliputi:
- a. Program Pengembangan Nilai Budaya;
  - b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
  - c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

24. Statistik, meliputi:
  - a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
25. Kearsipan, meliputi:
  - a. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Kearsipan;
  - b. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Kearsipan;
  - c. Program Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan;
  - d. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip;
  - e. Program Pengembangan Khasanah Kearsipan;
  - f. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
  - g. Program Penelusuran Arsip yang Bernilai Sejarah.
26. Perpustakaan, meliputi:
  - a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

## **URUSAN PILIHAN**

1. Perikanan dan Peternakan, meliputi:
  - a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
  - b. Program Pembinaan Kelembagaan Budidaya Perikanan;
  - c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang perikanan;
  - d. Program Peningkatan Konsumsi Hasil Perikanan;
  - e. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
  - f. Program Pengembangan perikanan tangkap.
  - g. Program Pengembangan kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar.
  - h. Program Pemberdayaan masyarakat dan pengawasan pengendalian sumber daya perikanan.

2. Pertanian, meliputi:
  - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;
  - b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
  - c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
  - d. Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Infrastruktur Pertanian;
  - e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pertanian;
  - f. Program Pengembangan Agribisnis;
  - g. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
  - h. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
  - i. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
  - j. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
  - k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Peternakan;
  - l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
  - m. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - n. Program Peningkatan Pengelolaan Hasil Produksi Peternakan;
  - o. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
  - p. Program Pengembangan Data/Informasi Peternakan/Perikanan;
  - q. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia peternakan & perikanan.
  - r. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
3. Kehutanan, meliputi:
  - a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
  - b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
  - c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;

- d. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.
  - e. Program pembangunan hutan bersama masyarakat (PHBM).
4. Energi dan Sumberdaya Mineral, meliputi:
- a. Program Pengendalian Air Tanah;
  - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi Baru Terbarukan;
  - c. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan;
  - d. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
  - e. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan.
5. Pariwisata, meliputi:
- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
  - c. Program Pengembangan Kemitraan.
6. Perindustrian, meliputi:
- a. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
  - b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
  - c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.
7. Perdagangan, meliputi:
- a. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
  - b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
  - c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
  - d. Program Pemberdayaan dan perlindungan pasar tradisional;
  - e. Program pembinaan pedagang kaki lima

**d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan**

Sasaran dan prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 5 (lima) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:
  - a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
  - b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
  - c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
  - d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
  - e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
- b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

- c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
  - d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
  - e. Pengentasan kemiskinan.
  - f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa
2. Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:
- a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
  - b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
  - c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
  - d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
  - e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
  - f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Perluasan infrastruktur dasar.
- b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
- c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
- e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu :
  - a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
  - b. Mempercepat transformasi struktural.
  - c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
  - d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
  - e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
  - b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
  - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
  - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
  - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
4. Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu :
    - a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
    - b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
    - c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
    - d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
    - e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.

- b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
  - c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbarukan (EBT).
  - d. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan.
  - e. Penguatan ketahanan bencana.
5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu :
- a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
  - b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
  - c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
  - d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.
  - e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
- b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
- c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
- d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
- e. Penanggulangan narkoba dan penguatan Kamtibmas

### **1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Penerapan dan pencapaian SPM merupakan upaya mensinergikan pencapaian SPM setiap urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar yang dilaksanakan Perangkat Daerah pengampu. Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang sudah ditetapkan SPM oleh Kementerian/Lembaga. Penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM secara operasional

dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Bidang SPM yang ditetapkan Kementerian/Lembaga dilaksanakan pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) pengampu SPM. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab penerapan dan pencapaian SPM di daerah tersebar di masing-masing Perangkat Daerah pengampu SPM. Untuk mewujudkan upaya penerapan dan pencapaian SPM di daerah yang efektif perlu dibentuk Tim Koordinasi Penerapan dan Pencapaian SPM di Daerah, terdiri dari Perangkat Daerah pengampu SPM, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Sekretariat Daerah yang termasuk didalamnya Bagian Organisasi. Tim ini diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Gunung Mas diatur dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dan dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dianggarkan pada masing-masing perangkat daerah. Untuk penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Gunung Mas lebih lanjut dijelaskan pada BAB IV Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

SPM pada 6 (enam) bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tabel 1.7

Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Gunung Mas

No.	Perangkat Daerah Pelaksana SPM	Bidang SPM	Capaian SPM
1.	Dinas Kesehatan Kab. Gunung Mas	SPM Bidang Kesehatan	59,01%
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Gunung Mas	SPM Bidang Pendidikan	99,60%
3.	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunung Mas	SPM Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	39,91%
4.	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunung Mas	SPM Bidang Perumahan Rakyat	94,29%
5.	Dinas Sosial Kab. Gunung Mas	SPM Bidang Sosial	96,91%
6.	1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	70,85%

Sumber: Sekretariat TP SPM Provinsi Kalimantan Tengah (Triwulan III Tahun 2023).

**BAB II**  
**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**

**2.1. Capaian Kinerja Makro**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro Kabupaten Gunung Mas menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Laju Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,43	73,90	0,64
2	Angka Kemiskinan	5,64	5,47	- 3,014
3	Angka Pengangguran	2,96	3,24	10,204
4	Pertumbuhan Ekonomi	6,47	4,25	- 34,312
5	Pendapatan Per Kapita (Pendekatan dengan Pengeluaran Per Kapita)	1.402.958	1.547.237	10,284
6	Ketimpangan Pendapatan ( Gini Ratio)	0,262	0,309	17,939

Sumber : Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2023

### **2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia**

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan Data Strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Kabupaten Gunung Mas</b>	<b>70,65</b>	<b>70,81</b>	<b>71,03</b>	<b>73,43</b>	<b>73,90</b>

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gunung Mas secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam rentang waktu mulai dari Tahun 2019 sampai dengan 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas mengalami kenaikan dan perkembangan nilai yang cukup signifikan dengan kenaikan sebesar 3,25% dari semula 70,65 menjadi 73,90. Hal ini berarti menunjukkan bahwa capaian dari sisi Kesehatan, Pendidikan, Pembangunan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas sudah meningkat.

### **2.1.2. Angka Kemiskinan**

Angka Kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

1. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Angka Kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas terjadi penurunan sebesar 3,01 persen di Tahun 2023 pada angka 5,47 ribu orang dibandingkan dengan Tahun 2022 pada angka 5,64 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pelemahan ekonomi masyarakat di Kabupaten Gunung Mas untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

### **2.1.3. Angka Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Pada Tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik menjadi 10,204 persen dibandingkan tahun lalu.

### **2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan Riil PDRB) adalah proses perubahan kondisi perekonomian daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Tetapi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2023 sebesar 4,25 persen mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 6,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja di bidang

ekonomi di Kabupaten Gunung Mas mengalami penurunan yang disebabkan yang harus dibenahi.

#### **2.1.5. Pendapatan Perkapita (Pendekatan dengan Pengeluaran Perkapita)**

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita.

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2023 sebesar Rp 1.547.237,- dengan 56,05 persen diantaranya adalah kelompok makanan dan 43,95 persen lainnya adalah kelompok bukan makanan. Pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Gunung Mas untuk makanan bertambah 1,1 persen dibanding dengan Tahun 2021. Data Susenas Maret 2022 menunjukkan komponen makanan paling besar dalam pengeluaran per kapita sebulan adalah makanan minuman jadi yaitu sebesar 12,2 persen. Sedangkan pengeluaran untuk padi-padian hanya 5,68 persen. Sementara untuk kelompok bukan makanan, komponen pengeluaran per kapita terbesar adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga yaitu sebesar 24,56 persen.

### **2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)**

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

Ketimpangan pendapatan merupakan kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ketimpangan pendapatan di Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2019 (0,302) sampai dengan tahun 2023 (0,309) mengalami kenaikan. Kenaikan merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan pemerataan pendapatan.

## **2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dan keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Capaian Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari:

- I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
  1. Urusan Pendidikan
  2. Urusan Kesehatan
  3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
  6. Urusan Sosial
- II. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar
  1. Urusan Tenaga Kerja
  2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  3. Urusan Pangan
  4. Urusan Pertanahan
  5. Urusan Lingkungan Hidup
  6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil
  7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  9. Urusan Perhubungan

10. Urusan Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Urusan Penanaman Modal
13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
14. Urusan Kebudayaan
15. Urusan Perpustakaan
16. Urusan Kearsipan

### III. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
2. Urusan Parawisata
3. Urusan Pertanian
4. Urusan Perdagangan
5. Urusan Perindustrian
6. Urusan Transmigrasi

### IV. Urusan Pemerintahan untuk Urusan Fungsi Penunjang

1. Administrasi Pemerintahan
2. Pengawasan
3. Perencanaan
4. Keuangan
5. Kepegawaian
6. Pendidikan dan Pelatihan
7. Penelitian dan Pembangunan

### 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Outcome

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja (%)
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = <b>16508</b> Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = <b>16761</b>	98,49
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = <b>6523</b> Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = <b>7919</b>	82,37
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = <b>6523</b> Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = <b>7919</b>	82,37
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = <b>140</b> Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = <b>2.989</b>	4,68

1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = <b>142</b> Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = <b>130.241</b>	1,09
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = <b>1</b> Jumlah RS di kabupaten/kota = <b>2</b>	50
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = <b>2348</b> Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = <b>2353</b>	99,78
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = <b>1.575</b> Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = <b>2.247</b>	70,09
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = <b>1965</b> Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = <b>1965</b>	100
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = <b>9556</b> . Jumlah balita di kabupaten/kota = <b>10.826</b>	88,26
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = <b>20655</b> Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = <b>21029</b>	98,22

1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = <b>87.023</b> Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = <b>87023</b>	100
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = <b>7697</b> Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = <b>8210</b>	93,75
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = <b>13.738</b> . Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = <b>13.738</b>	100
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = <b>7.106</b> Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = <b>7.106</b>	100
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = <b>180</b> Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = <b>180</b>	100
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = <b>1.877</b> Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = <b>2.181</b>	86,06

1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = <b>2.474</b> Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = <b>2.505</b>	98,76
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = <b>120,39</b> Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = <b>120,39</b>	100
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = <b>0,1</b> Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = <b>0,1</b>	100
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = <b>1.813</b>	84,48

			luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = <b>2.146</b>	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = <b>15.638</b> Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = <b>29.654</b>	52,73
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = <b>8.413</b> Jumlah rumah di Kabupaten = <b>29.654</b>	28,37
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = <b>702</b> Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku= <b>702</b>	100

1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = <b>248,58</b> Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = <b>738,99</b>	33,63
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = <b>29</b> Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = <b>30</b>	96,67
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = <b>106</b> Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = <b>106</b>	100
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun = <b>7</b> Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun = <b>7</b>	100
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak	100

			Huni = <b>0,1</b> Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = <b>0,1</b>	
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = <b>18,2</b> Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = <b>547</b>	3,32
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = <b>2.434</b> Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = <b>29.654</b>	8,20
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = <b>249</b> Jumlah unit rumah kab/kota = <b>29.654</b>	0,83
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = <b>13</b> . Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = <b>13</b>	100
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 4 Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 4	100
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = <b>62.683</b> . Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	100

			informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = <b>62.683</b>	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = <b>474</b> . Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = <b>62.683</b>	0,75
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = <b>2391</b> . Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = <b>2391</b>	100
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = <b>8</b> . Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = <b>8</b>	100
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	14,16

1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = <b>1.525</b> . Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = <b>9.181</b>	16,61
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = <b>4.102</b> . Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = <b>4.102</b>	100
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	0
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Jumlah tenaga kerja keseluruhan	0
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan). Jumlah tenaga kerja	0

2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = <b>12</b> . Jumlah Perusahaan = <b>27</b>	44,44
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan. Jumlah pencaker yang terdaftar	0
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = <b>19.706.552.166</b> Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = <b>1.019330.307.794</b>	1,93
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = <b>13</b> . Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = <b>13</b>	100
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = <b>3</b> . Jumlah penduduk perempuan = <b>62.812</b>	4,77
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = Jumlah target cadangan pangan pemerintah	0

			kabupaten/kota yang ditetapkan	
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = <b>248.011.922</b> seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = <b>248.011.922</b>	100
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = <b>1</b> . Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = <b>1</b>	100
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = <b>2.480.119.218,87</b> Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = <b>2.480.119.218,87</b>	100
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = <b>0.1</b> . Jumlah penerima tanah obyek landreform = <b>0.1</b>	100

2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = <b>0.1</b>  Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = <b>0.1</b>	100
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = <b>9</b> Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = <b>9</b>	100
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		78,58
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = <b>7.553,68</b>  Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = <b>37.888,92</b>	19,93
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = <b>37</b> usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = <b>38</b>	97,36
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = <b>84.430</b> . Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = <b>89.564</b>	94,26
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = <b>24.292</b>	56,24

			Jumlah anak usia 0-17 tahun = <b>43.193</b>	
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = <b>44.458</b> Jumlah anak usia 0-18 tahun = <b>45.018</b>	98,75
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = <b>12</b> Jumlah PD = <b>26</b>	46,15
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = <b>10</b> Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = <b>25</b>	40
2.l.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = <b>1</b> Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = <b>63</b>	1,58
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		2,42
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = <b>14.732</b> . Jumlah Pasangan Usia Subur = <b>20.080</b>	73,36

2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = <b>1.785</b> Jumlah Pasangan Usia Subur = <b>20.080</b>	8,89
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan) = (0.8 x 0.3) + (0.9 x 0,7) = <b>0.465</b>	<b>0.465</b>
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0.20 (Vc Ratio Kab. Gunung Mas tergolong lancar)	<b>0,20</b>
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = <b>27</b> Jumlah PD = <b>38</b>	71,05
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = <b>6</b> Jumlah Layanan Publik = <b>23</b>	26,08
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = <b>90.207</b> Jumlah penduduk = <b>90.207</b>	100
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 9 Jumlah seluruh koperasi aktif	52,94

			=17	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirasausaha = 72 Jumlah usaha mikro keseluruhan = 3.663	1,96
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = <b>267.524.645.000</b> Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = <b>903.804.075.000</b>	29,59
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirasusaha di kab/kota =  Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota =	0
2.r.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota =	0
2.r.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga		0

2.s.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = <b>38</b> jumlah PD = <b>38</b>	100
2.s.2	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = <b>38</b> jumlah PD = <b>38</b>	100
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi = <b>457</b> Jumlah area penilaian = <b>645</b>	70,85
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = <b>32</b> Jumlah cagar budaya yang terdata = <b>32</b>	100
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	40% (Statistik Sektoral Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	33,39 (Laporan Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU 43/2009)	$T = (a + i + s + j)/4$ $(100+100+100+0.3)/4 = 75$	75,62

2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ $(0+0+308+50+0+0)/6 = 16,6$	16,6
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 1.425,3 Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 1.990	71,62
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1) = 28$ Jumlah wisatawan tahun n-1 = 6	466,66
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$(\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1) = 6.160$ Jumlah wisatawan tahun n-1 = 19.683	31,29
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual = 7.311 Jumlah kamar yang tersedia = 102.930	7,10
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 601.100.000 Total PDRB Berlaku = 8.620.000.000	6,97
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realisasi PAD dari sektor pariwisata = 1.939.805.527 Total realisasi PAD = 35.947.215.933,58	5,39

3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = <b>1082.5</b> luas panen = <b>371.8</b>	291,15116
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = <b>2</b> . Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = <b>17</b>	11,76
3.d	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA		100
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 1	0
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = <b>1.204</b> Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = <b>2.025</b>	59,45
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = <b>110.165</b> RDKK = <b>750.000</b>	14,68

3.f.3	Perdagangan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 851  jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 1.034	82,30
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 8  Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 371	2,15
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		0,1
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 99  Jumlah izin yang dikeluarkan = 192	51,56
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0,1 Jumlah izin yang dikeluarkan = 0,1	100
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0,1	100

		kabupaten/kota	Jumlah izin yang dikeluarkan = 0,1	
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		100
3.h	Transmigrasi	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya (Ada/Tidak) = 1 Kawasan 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya (Ada/Tidak) = 1 3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina (Ada/Tidak) = 300 KK		100

### 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No. IKK	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = <b>151.991.890.765</b> Jumlah APBD = <b>1.334.210.394.363</b>	11,39
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = <b>74.332.496.530</b> Jumlah Pendapatan pada APBD = <b>1.136.300.514.632</b>	6,54
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3,064
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = <b>894.792.127.571,99</b> jumlah belanja APBD = <b>1.334.210.394.363</b>	67,06
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		WTP (Tahun 2012 – 2023)

4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = <b>0</b> jumlah kontrak keseluruhan tahun n = <b>305</b>	0
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = <b>0</b> Jumlah seluruh pengadaan = <b>0</b>	0
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = <b>638.322.000.000</b> total belanja operasi dan modal = <b>1.334.210.394.363</b>	47,84
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro,	68,97

			Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = <b>311.900.000.000</b> Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = <b>452.200.000.000</b>	
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = <b>604</b> Jumlah seluruh pegawai = <b>997</b>	60,58
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = <b>298</b> seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = <b>1.259</b>	23,66
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) =	0

4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Realisasi Belanja = <b>1.225.237.891.782.1.</b> Total Belanja APBD = <b>1.334.210.394.363</b>	8,16
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Total PAD dalam realisasi = <b>35.947.215.993.58</b> Total PAD dalam APBD = <b>74.332.496.530</b>	51,63
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset		3
4.d.4	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA = <b>123.579.383.201.2</b> total belanja anggaran tahun sebelumnya = <b>1.115.303.302.893</b>	11,08
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = <b>5.653.435.319</b> Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda = <b>6.093.904.976</b>	92,77
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = <b>11</b> total jumlah dokumen yang telah dirinci = <b>12</b>	91,67

### 2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan juga dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2022 menyajikan pengukuran sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama untuk mengetahui tingkat keberhasilan, yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang, dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja.

Berikut disajikan data Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 Berdasarkan RPJMD dalam tabel 2.3.1. sebagaimana dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.3.1.

## Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 Berdasarkan RPJMD

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)								
PERUBAHAN RPJMD		SATUAN	REALISASI		TARGET			KONDISI AKHIR
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Adil dan Proporsional</b>								
Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur	-	42,00	44,82	46,36	47,90	49,44	49,44
Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan	Indeks Konektivitas Wilayah	-	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00	70,00
Meningkanya Kualitas Perumahan Masyarakat	Rasio rumah layak huni	%	26,56	27,14	27,72	28,30	28,88	28,88
<b>Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)</b>								
Meningkatkan Daya Saing SDM	IPM	-	70,81	71,13	71,41	71,70	71,99	71,99
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	-	63,19	63,25	63,43	63,62	63,80	63,80
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	-	77,54	77,63	77,76	77,89	78,02	78,02
Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	%	88,22	89,58	89,90	90,15	90,45	90,45
Menurunnya Prevelensi Stunting	Angka Prevelansi Stunting	%	22,87	21,56	18,55	16,01	13,94	13,94
<b>Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah</b>								
Meningkatkan pembangunan perekonomian kerakyatan berbasis komoditas unggulan	LPE	%	3,36	4,50	5,18	6,09	7,00	7,00
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	3,65	4,56	5,47	6,38	7,29	7,29
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10,00	20,00	25,00	30,00	35,00	35,00
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	4,75	4,52	4,26	4,00	3,80	3,80
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	2,37	2,25	2,12	2,00	2,00

PERUBAHAN RPJMD		SATUAN	REALISASI	TARGET					KONDISI AKHIR
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah		2020	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	-	0,28	0,26	0,26	0,25	0,24	0,24
		Pendapatan Perkapita	Ribu/ Kapita/ Tahun	10793	11056	11238	11421	11603	11603
<b>Misi 4: Mempercepat Reformasi Birokrasi</b>									
	Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	-	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	68,00
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	-	B	B	B	BB	BB	BB
		Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasa Masyarakat	-	77,53	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	85,00 (Baik)	85,39 (Baik)	85,39 (Baik)
<b>Misi 5 Penegakkan dan Jaminan Kepastian Hukum (Law Enforcement)</b>									
<b>Misi 8: Memelihara dan Meningkatkan Keharmonisan Antar Masyarakat Dalam Kerangka NKRI</b>									
	Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat	Angka kriminalitas yang tertangani	-	76,54	77,00	78,00	79,00	80,00	80,00
	Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	-	81,00	75,00	70,00	65,00	60,00	60,00
<b>Misi 6: Mengembangkan Nilai-nilai Budaya dan Kearifan Lokal</b>									
	Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah	Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	%	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	40,00
	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	-	-	28,00	37,00	48,00	60,00	60,00
	Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)	Laju pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	%	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	2,50

PERUBAHAN RPJMD			SATUAN	REALISASI	TARGET					KONDISI AKHIR
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah	2020		2021	2022	2023	2024			
Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah	Pertumbuhan destinasi wisata daerah	-	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	12,00		
<b>Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)</b>										
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	76,00	76,90	76,91	76,92	76,93	76,93		
Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	%	46,00	46,69	46,70	46,71	46,72	76,72		
	Indeks Kualitas Udara	%	89,00	89,50	89,6	89,7	89,80	89,80		
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	90,00	90,15	90,20	90,25	90,30	90,30		

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024

Dalam proses penentuan IKU Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan tahap-tahap untuk penyusunan IKU untuk semua Perangkat Daerah yang ditetapkan sebanyak 8 (Delapan) Misi, 16 (Enam Belas) Sasaran Strategis, dan 29 (Dua Puluh Sembilan) Indikator Kinerja Utama.

Berdasarkan tabel data Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2023 Berdasarkan RPJMD di atas, kemudian disusunlah Identifikasi Sasaran Kebijakan Umum Program Pembangunan Kabupaten Gunung Mas 2019-2024, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.3.2.**  
**Identifikasi Sasaran Kebijakan Umum Program Pembangunan Kabupaten Gunung Mas 2019-2024**

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Misi 1 Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Adil dan Proporsional</b>							
1	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar berbasis RTRW	Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat		Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman	Rasio rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM
					PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM
<b>Misi 2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)</b>							
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Peningkatan mutu, akses dan layanan pendidikan	Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Indeks Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan jangkauan dan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas	Peningkatan jangkauan dan akses layanan kesehatan yang bermutu	Indeks Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan keterampilan perempuan dan pencapaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6	Menurunnya Prevelensi Stunting	Melaksanakan aksi konvergensi	Mendukung 8 aksi konvergensi KP2S	Angka Prevelensi Stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>Misi 3 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah</b>							
7	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	Percepatan pembangunan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan daerah	Peningkatan dukungan terwujudnya program food estate di Gunung Mas	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan perikanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
8	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah		Peningkatan kemudahan perizinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Peningkatan kapasitas dan kelayakan pendapatan tenaga kerja	Pengembangan kompetensi angkatan kerja berbasis kewirausahaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
10	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat		Percepatan pembangunan desa sebagai basis pemberdayaan masyarakat	Indeks Gini	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
				Pendapatan Perkapita	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
<b>Misi 4 Mempercepat Reformasi Birokrasi</b>							
11	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Optimalisasi teknologi informasi pada tata kelola pemerintah	Penataan tata kelola organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB		
1	2	3	4	5	6	7	8		
					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN		
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
					Peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT KABUPATEN
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Pengembangan sistem informasi untuk pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK				

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Misi 5 Penegakkan dan Jaminan Kepastian Hukum (Law Enforcement)</b>							
<b>Misi 8 Memelihara dan Meningkatkan Keharmonisan Antar Masyarakat Dalam Kerangka NKRI</b>							
13	Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat	Peningkatan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dalam mewujudkan keamanan wilayah	Peningkatan sinergi antara masyarakat, Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
<b>Misi 6 Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal</b>							
14	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya	Peningkatan kualitas sumber daya kebudayaan	Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
15	Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah		Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam dan budaya	Pertumbuhan destinasi wisata daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
<b>Misi 7 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)</b>							
16	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Mewujudkan ketahanan lingkungan hidup	Pemulihan daya dukung lingkungan, khususnya hutan	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
				Indeks Kualitas Udara			
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan			

**Tabel 2.3.3.**  
**Identifikasi Proses Utama (Sasaran)**  
**Pemerintah Kabupaten Gunung Mas**

NO	PROSES	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi	Utama
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat	Utama
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Utama
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Utama
5	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Utama
6	Menurunnya Prevalensi Stunting	Utama
7	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	Utama
8	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah	Utama
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Utama
10	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Utama
11	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Utama
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Utama
13	Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat	Utama
14	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Utama
15	Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah	Utama
16	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Utama

### 2.3.1. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menetapkan kategorisasi Pencapaian Kinerja Program berdasarkan capaian rata-rata atas indikator (*outcome*) menjadi empat kategori sebagai berikut:

**Tabel 2.3.4. Kategori Capaian Kinerja**

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Berdasarkan target yang termuat dalam Tabel 2.3.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 Berdasarkan RPJMD, maka disusunlah tabel Target dan Realisasi sebagai berikut:

**Tabel 2.3.5.  
Target dan Realisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2022**

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)								
PERUBAHAN RPJMD			SATUAN	TARGET		REALISASI		
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah			2021	2022	2020	2021	2022
<b>Misi 1: Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Secara Adil dan Proporsional</b>								
Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas	Indeks Kualitas Infrastruktur	-	44,82	46,36	42,00	46,36	43,37	
Meningkatnya kualitas aksesibilitas perhubungan	Indeks Konektivitas Wilayah	-	62,50	65,00	60,00	65,00	66,01	
Meningkanya Kualitas Perumahan Masyarakat	Rasio rumah layak huni	%	27,14	27,72	26,56	27,72	74,97	
<b>Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)</b>								
Meningkatkan Daya Saing SDM	IPM	-	71,13	71,42	70,81	71,03	71,40	
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	-	63,25	63,43	63,19	63,65	63,40	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	-	77,63	77,76	77,54	77,63	78,03	
Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	%	89,58	18,55	88,22	88,22	data belum publish	
Menurunnya Prevelensi Stunting	Angka Prevelensi Stunting	%	21,56	18,55	22,87	17,75	18,34	
<b>Misi 3: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Wilayah</b>								
Meningkatkan pembangunan perekonomian kerakyatan berbasis komoditas unggulan daerah	LPE	%	4,27	5,18	3,36	5,09	6,47**	
Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,56	5,47	3,65	4,97*	5,21**	
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	20,00	25,00	10,00	0,10	25,00	
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	4,52	4,26	4,75	5,35	5,64	
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,49	2,25	2,49	3,11	2,96	
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	-	0,26	0,26	0,28	0,28	0,26	
	Pendapatan Perkapita	Ribu/ Kapita/ Tahun	12919	13492	10793	10809	10990	

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN GUNUNG MAS YANG BERMARTABAT, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERJUANG BERSAMA)								
PERUBAHAN RPJMD		SATUAN	TARGET		REALISASI			
Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Daerah		2021	2022	2020	2021	2022	
<b>Misi 4: Mempercepat Reformasi Birokrasi</b>								
Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	-	62,00	64,00	60,00	50,01	51,66 (CC)
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	-	B	B	B	B	B
		Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	data belum publish
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	83,30 (Baik)	84,15 (Baik)	77,53	84,25 (baik)	81,06 (Baik)
<b>Misi 5 Penegakkan dan Jaminan Kepastian Hukum (Law Enforcement)</b>								
<b>Misi 8: Memelihara dan Meningkatkan Keharmonisan Antar Masyarakat Dalam Kerangka NKRI</b>								
Meningkatnya keamanan dan ketertiban di kalangan masyarakat		Angka kriminalitas yang tertangani	-	77,00	78,00	76,54	71,00	97,00
	Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	-	75,00	70,00	81,00	91,00	97,00
<b>Misi 6: Mengembangkan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan Lokal</b>								
Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah		Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	%	25,00	30,00	20,00	20,00	11,00
	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	-	28,00	37,00	-	28,00	43,00
Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (ekotourism)		Laju pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	%	1,00	1,50	0,50	1,00	data belum publish
	Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah	Pertumbuhan destinasi wisata daerah	-	9,00	10,00	8,00	9,00	9,00
<b>Misi 7: Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)</b>								
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	76,90	76,91	76,00	69,80	68,82
	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	%	46,69	46,70	46,00	50,00	46,67
		Indeks Kualitas Udara	%	89,50	89,60	89,00	87,65	87,75
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	90,15	90,20	90,00	71,25	71,25

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

<b>SASARAN STRATEGIS 1</b>		
<b>MENINGKATNYA</b>	<b>KUALITAS</b>	<b>AKSESIBILITAS</b>
<b>PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI</b>		

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi diukur melalui indikator Indeks Konektivitas Wilayah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1.**  
**Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Aksesibilitas Perhubungan dan Komunikasi	Indeks Konektivitas Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM

Berdasarkan Tabel 2.3.5. di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dalam sasaran strategis 1 ini, yaitu: (1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan (2) Program Penyelenggaraan Jalan.

**1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Hasil pengukuran kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.2.**  
**Target dan Realisasi Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Capaian layanan pengaduan masyarakat secara <i>online</i> yang ditindaklanjuti tepat waktu	55%	85%	155
	Jumlah berita agenda pembangunan daerah yang <i>terpublish</i> melalui media <i>website</i> dan radio	400 berita	400 berita	100
	Jumlah berita pembangunan daerah yang <i>terpublish</i> melalui media <i>website</i> dan radio	500 berita	1010 berita	202
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>152</b>

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas diketahui bahwa **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 152%.**

## 2. Program Penyelenggaraan Jalan

Hasil pengukuran kinerja Program Penyelenggaraan Jalan diukur melalui 2 (dua) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3.**  
**Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Jalan**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	30,67	30,24	98,59
	Persentase jembatan dalam kondisi baik	39,48	40,63	102,91
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>101</b>

a. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota

**Tabel 1.4.**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024
		Target	Realisasi	Prosentasi Realisasi (%)		
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	29,59	30,674	30,24	98,59	33,276	108,51

Sumber Data : Bidang Bina Marga

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota target 30,674% terealisasi 30,24% mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 0,65% dari capaian 29,59% hal ini dikarenakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas melalui Bidang Bina Marga telah mendapatkan anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, rekonstruksi jalan dan pemeliharaan rutin jalan. Sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan kondisi mantap jalan sehingga mengurangi kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat.

Dalam proses pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan seringkali ditemui permasalahan baik teknis maupun non teknis yang menjadi hambatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja ini sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan, sehingga membuat proyek minus dari jadwal yang direncanakan semula. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga kerja, peralatan serta bahan di lapangan.
- 2) Kurangnya Anggaran daerah untuk penanganan Pembangunan Jalan, Peningkatan Jalan dan Pemeliharaan Jalan untuk membuka akses keterisolasian, kelancaran arus barang dan jasa, mempersingkat waktu tempuh, jarak tempuh dan meningkatkan perekonomian masyarakat dalam Kondisi Sedang dan Baik.

Upaya/solusi yang telah dilakukan dalam pengendalian kinerja sebagai berikut:

- 1) Mendorong penyedia jasa untuk segera menyelesaikan pekerjaan dengan mengadakan SCM.
- 2) Melakukan upaya permintaan dukungan anggaran pada kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penanganan jalan dan penanganan dengan cara bertahap secara optimal pada jalan strategis kabupaten.

**b. Persentase Jembatan Kondisi Baik**

**Tabel 1.5.  
Indikator dan Capaian Kinerja Persentase  
Jembatan Kondisi Baik**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024
		Target	Realisasi	Prosentasi Realisasi (%)		
<b>Persentase Jembatan Kondisi Baik</b>	39,09	39,48	<b>40,628</b>	102,91	41,09	39,93

Sumber Data : Bidang Bina Marga

Berdasarkan data jembatan dan target Tahun 2022 adalah sebesar 39,48%, dalam realisasi pencapaian kinerjanya sebesar 39,09%. Adapun total panjang jembatan 4,463,90 m dimana panjang jembatan kondisi baik 1,745,00 m dan panjang jembatan kondisi rusak ringan dan kondisi runtuh sepanjang 1,818,40 m. Dalam hal penanganannya diperlukan biaya yang sangat tinggi sehingga dilakukan skala prioritas dalam asas kemanfaatan, dan dampaknya untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah:

- 1) Sarana dan Prasarana penunjang yang masih kurang, mobil dinas dan motor dinas dan alat survey lainnya untuk mendukung peninjauan lokasi.
- 2) Jumlah dan kualitas SDM, tidak sebanding dengan jumlah jembatan yang harus ditanganani.

3) Anggaran terbatas dalam pelaksanaan pembangunan jembatan sehingga tidak semua pembangunan jembatan dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Sebagai bahan evaluasi, dimana Jembatan Kabupaten Kondisi Baik yang tersebar di 12 Kecamatan/Kota merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Gunung Mas, selayaknya kondisi jembatan tetap dipertahankan sejalan dengan anggaran yang diakomodir dari APBD maupun APBN dalam bentuk DAK atau tugas pembantuan (TP) agar kondisi jembatan Kabupaten/Kota setiap tahunnya meningkat.

Berdasarkan data tabel di atas diketahui bahwa **Program Penyelenggaraan Jalan termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 101%.**

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 1.6.  
Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
1	Indeks Konektivitas Wilayah	-	65	66,01	101,55	DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 1: MENINGKATNYA KUALITAS AKSESIBILITAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI** yang diukur dengan Indikator Indeks Konektivitas Wilayah, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 101,55%.

**SASARAN STRATEGIS 2****MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN MASYARAKAT**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Perumahan Masyarakat diukur melalui indikator Rasio Rumah Layak Huni sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.1.**  
**Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Perumahan Masyarakat**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan Masyarakat	Rasio rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM

Berdasarkan Tabel 2.3.11. di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dalam sasaran strategis 2 ini, yaitu: (1) Program Pengembangan Perumahan; dan (2) Program Kawasan Permukiman.

### 1. Program Pengembangan Perumahan

Hasil pengukuran kinerja Program Pengembangan Perumahan diukur melalui 1 (satu) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2.**  
**Target dan Realisasi Program Pengembangan Perumahan**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	5,32	5,79	108,83
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>109</b>

### 1.1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

**Tabel 2.3.**  
**Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024
		Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)		
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2,28	5,32	5,79	108,83	20,16	20,16

Sumber Data : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota target 5,32% terealisasi 5,79% dengan capaian 108,83% hal ini dikarenakan kegiatan-kegiatan untuk pendataan jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2022 dan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2022 telah dilakukan dengan maksimal.

Berdasarkan Tabel 2.3.12. di atas diketahui bahwa **Program Pengembangan Perumahan termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 108,83%.**

## 2. Program Kawasan Permukiman

Hasil pengukuran kinerja Program Kawasan Permukiman diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4.**  
**Target dan Realisasi Program Kawasan Permukiman**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang Ditangani	0,99	0,00	0,00
	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,47	8,34	128,90
	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	32,79	26,98	82,28
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>70</b>

a. **Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang Ditangani**

**Tabel 2.5.**  
**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang Ditangani**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024
		Target	Realisasi	Prosentasi Realisasi (%)		
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabuapten /Kota yang ditangani	-	0,99	-	-	2,13	-

Sumber Data : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha di Kab/Kota yang Ditangani, target 0,99% terealisasi 0% dengan capaian 0% hal ini sama dengan kondisi tahun 2021 dengan capaian 0% dikarenakan sampai dengan tahun 2022 pendataan untuk luas kawasan permukiman kumuh belum dianggarkan. Adapun Indikator Kinerja Kunci Keluaran Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabuapten/Kota yang ditangani yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas yaitu jumlah unit peningkatan kualitas RTLH. Jumlah Unit Peningkatan Kualitas RTLH sampai dengan Tahun 2022 yaitu sebanyak 75 Unit Rumah.

b. **Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**

**Tabel 2.6.**  
**Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)**

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024
		Target	Realisasi	Prosentasi Realisasi (%)		
Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,76	6,47	8,34	128,90	2,16	1,68

Sumber Data : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) target 6,47% terealisasi 8,34% dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 0,42% dengan capaian 8,76%. Hal ini dikarenakan pendataan untuk jumlah unit rumah tidak layak huni dan jumlah total unit rumah kabupaten tidak maksimal.

Sebagai bahan evaluasi, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten /Kota yang ditangani dan Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) merupakan indikator kinerja sasaran untuk Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagai Implementasi dari Kebijakan staregis penanganan masalah-masalah kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Dengan Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat yaitu: Penyediaan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah. Dengan adanya indikator sasaran SPM tersebut maka perlu dilakukan pendataan secara reguler agar unit rumah masyarakat yang terdampak dapat segera dilakukan tindakan berupa relokasi dan lain-lain.

c. Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Tabel 2.7.  
Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU  
(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2022 terhadap 2024
		Target	Realisasi	Prosentasi Realisasi (%)		
Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,47	32,79	26,98	1,52	99,18	12,095

Sumber Data : Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) target 32,79% terealisasi 26,98% dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 26,51% dari capaian 0,47%. Hal ini dikarenakan jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU adanya penambahan sebanyak 8 unit rumah diharapkan untuk kedepannya penambahan unit rumah tersebut reguler dilakukan setiap tahunnya diutamakan untuk bangunan-bangunan umum.

Sebagai bahan evaluasi, Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Serta, dapat pula sebagai sarana, yaitu fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Untuk itu hendaknya Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan pendataan bangunabangunan umum yang belum terlengkapi fasilitas PSU agar segera dilakukan pembangunan untuk memenuhi target kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 2.3.13. di atas diketahui bahwa **Program Kawasan Permukiman termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sedang dengan rata-rata capaian 70%.**

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 2.8.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
2	Rasio Rumah Layak Huni	%	27,72	74,97	270,45	DINAS PEKERJAAN UMUM

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 2: MENINGKATNYA KUALITAS PERUMAHAN MASYARAKAT** yang diukur dengan Indikator Rasio Rumah Layak Huni, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 270,45%.

**SASARAN STRATEGIS 3****MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan diukur melalui indikator Indeks Pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.****Sasaran Strategis 3: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 3 ini, yaitu Program Pengelolaan Pendidikan.

Program ini dilaksanakan guna mencapai beberapa sasaran, yakni:

- 1) Meningkatnya Angka Partisipasi masyarakat usia sekolah dalam mengenyam Pendidikan;
- 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan;
- 3) Meningkatnya capaian prestasi di bidang pendidikan; dan
- 4) Meningkatnya kualifikasi dan kesejahteraan tenaga Pendidik.

Sasaran Program yang hendak dicapai adalah:

- 1) Meningkatnya APK dan APM SD SMP;
- 2) Meningkatnya Mutu Lulusan;
- 3) Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Guru

**Tabel 3.2.****Target dan Realisasi Program Pengelolaan Pendidikan**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	REALISASI 2022 (%)	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya APK dan APM SD SMP			
	- APK SD	100,00	100,00	100,00
	- APK SMP	100,00	82,48	82,48
	- APM SD	100,00	100,00	100,00
	- APM SMP	100,00	82,48	82,48
	Meningkatnya Mutu Lulusan			
	- Angka Lulusan SD	100,00	100,00	100,00
	- Angka Lulusan SMP	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Guru (Persentase Guru Bersertifikasi)	72,48	60,67	83,71
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>93</b>

### **Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI**

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar per penduduk usia 7-12 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa yang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Untuk target tahun 2022 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menetapkan nilai sebesar 100 % bagi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI. Dari capaian ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga telah melampaui target nilai yang diharapkan. Angka APK yang lebih besar dari 100 % tersebut mengindikasikan bahwa jumlah siswa yang bersekolah pada jenjang SD ternyata masih ada juga yang lebih muda dari 7 tahun dan lebih tua daripada 12 tahun. Hal ini juga mungkin mengindikasikan ada siswa yang secara administratif bukan penduduk Kabupaten Gunung Mas namun karena tinggal bersama kerabatnya di Kabupaten Gunung Mas sehingga bersekolah di wilayah Kabupaten Gunung Mas. Sehingga jumlah siswa yang tercatat cukup besar dibandingkan jumlah penduduk yang berada pada jenjang usia Sekolah dasar.

### **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS**

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama per penduduk usia 13-15 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa yang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama terhadap jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 adalah sebesar 82,48 %. Untuk target tahun 2022 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan

Olahraga menetapkan nilai sebesar 100 % bagi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS. Hal ini berarti pemerintah Daerah telah berhasil memenuhi bahkan melebihi dari Target yang ditetapkan. Namun Hal ini tetap menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk tetap dapat mempertahankan agar nilai tersebut tidak turun, bahkan bisa mengalami kenaikan, dengan melaksanakan program kegiatan strategis yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

### **Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI**

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk usia Sekolah Dasar (7 – 12 tahun) pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar per penduduk usia 7-12 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa Sekolah Dasar Usia 7 – 12 tahun yang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar terhadap jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 adalah sebesar 100 %. Untuk target tahun 2022 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menetapkan nilai sebesar 100 % bagi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI. Hal ini berarti pemerintah Daerah telah berhasil memenuhi bahkan melebihi dari Target yang ditetapkan. Namun Hal ini tetap menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk tetap dapat mempertahankan agar nilai tersebut tidak turun, bahkan bisa mengalami kenaikan, dengan melaksanakan program kegiatan strategis yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

### **Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs**

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk usia Sekolah Menengah Pertama (13 – 15 tahun) pada suatu wilayah yang

menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama per penduduk usia 13-15 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa Sekolah Menengah Pertama Usia 13 – 15 tahun yang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama terhadap jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 adalah sebesar 82,48 %. Untuk target tahun 2022 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menetapkan nilai sebesar 100 % bagi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs. Dari capaian ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga belum mencapai target nilai yang diharapkan. Angka APM yang rendah ini mengindikasikan bahwa jumlah siswa usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama lebih sedikit daripada jumlah penduduk usia 13 -15 tahun. Hal ini juga berarti bahwa siswa yang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama cukup banyak yang berusia di bawah 13 tahun dan di atas 15 tahun. Hal ini akan menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga agar dapat mendongkrak nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs pada tahun- tahun selanjutnya agar dapat mencapai target serta meningkatkan target pada tahun selanjutnya.

### **Angka Kelulusan (AL) SD/MI**

Angka Kelulusan (AL) SD/MI merupakan indikator yang mencerminkan berapa persentase kelulusan Siswa jenjang SD/MI. Angka Kelulusan (AL) SD/MI Kabupaten Gunung Mas tahun 2021 adalah sebesar 100%. Untuk target tahun 2021 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menetapkan nilai sebesar 100% bagi Angka Kelulusan (AL) SD/MI. Dari capaian ini Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sudah mencapai hasil yang memuaskan.

### Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs merupakan indikator yang mencerminkan berapa persentase kelulusan Siswa jenjang SMP/MTs. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 adalah sebesar 100%. Untuk target tahun 2022 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menetapkan nilai sebesar 100% bagi Angka Kelulusan (AL) SD/MI. Dari capaian ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sudah mencapai hasil yang memuaskan.

### Persentase Guru yang bersertifikasi

Persentase Guru yang bersertifikasi merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak Guru SD dan SMP yang telah memenuhi kualifikasi sertifikat pendidik per jumlah Guru SD dan SMP di Kabupaten Gunung Mas. Untuk capaian tahun 2022, Persentase Guru yang bersertifikasi di Kabupaten Gunung Mas sebesar 60,67% dari target sebesar 72,48%. Nilai yang belum melebihi dari target, sehingga kegiatan- kegiatan maupun program yang bertujuan untuk mendongkrak nilai ini tetap menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk kedepannya, agar capaian ini akan secara bertahap naik hingga akhirnya mencapai 100%.

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 3.3.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
3	Indeks Pendidikan	-	63,43	63,40	99,95	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 3: MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN** yang diukur dengan Indikator Indeks Pendidikan, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 99,95%.

**SASARAN STRATEGIS 4**  
**MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur melalui indikator Indeks Kesehatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1.**  
**Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN

Berdasarkan Tabel 2.3.26. di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dalam sasaran strategis 4 ini, yaitu: (1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; dan (2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

**1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

Hasil pengukuran kinerja 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat diukur

melalui 2 (dua) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2.**  
**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Rata-Rata Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8,00	8,00	100,00
	Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (S, P, A) Sesuai Standar ASPAK	100%	100%	100,00
	Persentase Cakupan Standar Pelayanan Minimal	100,00	83,90	83,90
	Menurunnya Angka Stunting	20,16	16,60	82,32
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>92</b>

### 1.1. Persentase Capaian Rata-Rata Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular

**Tabel 4.3.**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Persentase Capaian Rata-Rata Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular**

Indikator : Persentase capaian rata-rata pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jenis penyakit	8	8	46,43

Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, kegiatan ini bertujuan untuk melacak seberapa banyak jenis penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Gunung Mas, sehingga dapat diketahui jenis penyakit apa saja yang terdeteksi. Tidak semua penyakit yang dimasukkan dalam kegiatan ini namun hanya penyakit yang dianggap berbahaya bagi masyarakat. Dari target 8 jenis penyakit terealisasi sebanyak 100%. Pagu kegiatan ini Rp. 3.232.156.049,00 dan realisasi Rp. 500.563.527,00 atau 46,43%.

Data di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Rata-Rata Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular diukur melalui Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang mana hasilnya menunjukkan capaian 100%.

## 1.2. Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (S, P, A) Sesuai Standar ASPAK

**Tabel 4.4.**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (S, P, A) Sesuai Standar ASPAK**

Indikator : Persentase ketersediaan sarana, prasarana, alat kesehatan (S, P, A) sesuai standar ASPAK

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi Obat, Vaksin dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai standar	Puskesmas	17	100	34,32
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat yang dikalibrasi	Jenis alkes	10	100	47,37
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/penunjang medik yang diadakan	Paket alkes	10	100	99,39

1. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya adalah kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang bertujuan untuk menyalurkan alat kesehatan, vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan obat-obatan ke 17 puskesmas yang ada di Kabupaten Gunung Mas, dan selanjutnya puskesmas akan mendistribusikan ke jaringannya. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 712.638.130,00 dengan realisasi sebesar Rp. 245.299.436,00 atau 98,63% dengan realisasi fisik adalah 100%.

2. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan pagu Rp. 379.350.345,00 dengan realisasi Rp. 179.715.464,00 atau 47,37%. Kegiatan ini Kalibrasi merupakan suatu proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat-alat kesehatan dengan cara membandingkan dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan hasil pengukuran atau pemeriksaan yang dilakukan oleh alat tersebut akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Kalibrasi alat kesehatan itu sangat penting, apabila alat yang digunakan sudah tidak sesuai maka hasilnya pun menjadi tidak akurat. Realisasi dari kegiatan ini 100% tercapai dengan target alat yang akan dikalibrasi.
3. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan kegiatan ini berisikan pengadaan alat kesehatan puskesmas dan jaringannya sehingga ada pemerataan alat kesehatan di fasilitas kesehatan. Pemerataan alat kesehatan ini dilaksanakan secara bertahap, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran. Adapun alat kesehatan yang diadakan pada tahun 2021 antara lain: Keperawatan kit, Sarana Cold Chain, UKGS kit, UKS kit, Bidan kit, Posyandu kit, Lansia kit, Vaksin Carier dan Set Umum. Pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.131.594.930,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.118.619.174,00 atau 99,39% dan realisasi fisik 100%. Anggaran ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan.

Data di atas menunjukkan bahwa Persentase Capaian Rata-Rata Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular diukur melalui: (1) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya; (2) Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang

Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan; (3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Ketiganya menunjukkan capaian dengan rata-rata 100%.

### 1.3. Persentase Cakupan Standar Pelayanan Minimal

**Tabel 4.5.**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Persentase Cakupan Standar Pelayanan Minimal**

Indikator : Persentase cakupan Standar Pelayanan Minimal

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Ibu hamil	2.352	94,81	63,71
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Ibu bersalin	2.245	57,10	38,07
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Bayi	2.138	100	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Balita	10.855	86,84	45,39
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak usia sekolah	19.370	87,93	77,19
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Usai lanjut	11.363	95,78	95,78
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Usia produktif	85.316	66,42	86,64
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi	10.045	100	91,73
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita DM	183	100	85,16
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Pasien ODGJ	179	100	100
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Orang terduga TB	2.109	54,86	42,78
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	Orang	2.870	63	84,21

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh

setiap warga negara secara minimal. Memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat.

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, merupakan kegiatan rutin tahunan yang berisikan pertemuan untuk tenaga kesehatan yang menangani ibu hamil untuk peningkatan sumber daya manusia kesehatan, sehingga pelayanan ibu hamil semakin baik. Selain itu kegiatan ini melaksanakan pemeriksaan kesehatan ibu hamil di Posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Pagu untuk kegiatan ini sebesar Rp. 660.483.273,00 dengan realisasi Rp. 420.766.800,00 atau 63,71% dengan target 2.352 ibu hamil dan realisasi 2.230 ibu hamil tertangani atau 94,81%.
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 556.941.047,00 dengan realisasi Rp. 212.001.670,00 atau 38,07%. Kegiatan ini memberikan bantuan bagi ibu hamil yang melahirkan dengan bantuan persalinan serta penyediaan rumah tunggu dan segala keperluan persalinan, bantuan ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan belum atau tidak punya jaminan sosial atau jaminan kesehatan. Target dari kegiatan ini 2.245 ibu bersalin dengan realisasi 1.282 ibu hamil yang terlayani atau 57,10%. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk bersalin di fasilitas kesehatan yang disediakan, sebagian besar masyarakat lebih memilih bersalin melalui jalur mandiri. Sasaran Ibu Hamil dari Pusdatin lebih tinggi dari sasaran riil; Masih ada Ibu Hamil yang K1 pada usia kehamilan di atas Triwulan II/III, sehingga ibu hamil tersebut tidak mendapatkan pelayanan K4 yang sesuai dengan standar definisi operasional. Rencana tindak lanjut Meningkatkan peran serta lintas sektor, Kader dan

dukun kampung dalam hal pelaporan ibu hamil baru di wilayah kerjanya; Validasi data Ibu hamil yang riil di wilayah kerja Puskesmas terintegrasi dengan data PIS-PK. Rendahnya minat Ibu untuk bersalin di Fasilitas Kesehatan; Masih kurangnya kesiapan sarana dan prasarana Faskes yang mampu Pertolongan Persalinan (hanya 5 Puskesmas dari 17 Puskesmas yang menjadi Puskesmas PONED); Masih sedikitnya Bidan Praktek Mandiri yang membuka pertolongan persalinan di kliniknya. Rencana tindak lanjut terus mempromosikan bahwa pentingnya ibu bersalin di Faskes; Penyediaan Baby Kit yang akan diberikan secara gratis ke Ibu yang bersalin di Faskes; Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kesiapan Persalinan Faskes yang mampu PONED; Meningkatkan kerjasama dengan jejaring Puskesmas (Bidan Praktek Mandiri) dalam hal pelayanan persalinan dan kemudahan pemberian rekom izin praktik bidan.

3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, kegiatan ini memiliki tidak memiliki pagu, namun kegiatan ini dapat bersinergi dengan kegiatan lain sehingga target tercapai. Target dari kegiatan ini adalah 2.138 bayi dengan realisasi 2.138 bayi atau 100%. Kegiatan ini bersinergi dengan kegiatan seperti berisikan pertemuan bagi tenaga kesehatan yang menangani bayi baru lahir untuk peningkatan sumber daya manusia kesehatan dalam penanganan bayi baru lahir. Bayi baru lahir perlu dipantau tumbuh kembangnya baik itu berat badan, panjang badan serta perkembangan motorik dan psikis bayi. Selain itu kegiatan ini juga mencetak buku Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Register Kohort Ibu Hamil, Register Kohort Ibu Bersalin, Register Kohort Ibu Nifas, Register Kohort Bayi yang bertujuan untuk mencatat perkembangan tumbuh kembang bayi. Upaya Layanan

Kunjungan Neonatal sesuai standar bagi seluruh bayi baru lahir, baik persalinan yang ditolong oleh nakes maupun non nakes.

4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, pagu kegiatan ini Rp. 555.299.090,00 dengan realiasi keuangan Rp. 252.049.000,00 atau 45,39%. Target 10.855 balita dengan realisasi 9.427 balita atau 86,84%. Kegiatan ini berisikan Pertemuan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Pertemuan Orientasi Skrining Hipotirod Kongenital, Orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak, Orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Kegiatan ini dikategorikan berhasil. Kegiatan ini tidak memenuhi target karena masih rendahnya kesadaran/keaktifan masyarakat untuk membawa Balita mendapatkan layanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Balita di Posyandu/Faskes secara rutin. Tindak lanjut Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam pemanfaatan UKBM dan peningkatan cakupan Balita yang berkunjung; Validasi data riil jumlah Balita yang ada di wilayah kerja Puskesmas; Mengaktifkan layanan SDIDTK di Posyandu (tidak hanya untuk Balita yang berkunjung ke Puskesmas)
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, pagu kegiatan ini Rp. 639.538.450,00 dengan realisasi Rp. 493.630.600,00 atau 77,19% dengan target 19.370 anak usia sekolah dengan realisasi 17.032 anak usia sekolah atau 87,93%. Kegiatan ini juga tidak memenuhi target karena penjangkaran SD dan SMP dilaksanakan semua tetapi tidak semua siswa terjaring karena tidak hadir/ tidak masuk saat dilakukan kegiatan. Kegiatan Berkala SD dan SMP tidak semua PUSKESMAS melaksanakan karena tidak ada di RPK, dan sebagian PUSKESMAS yang melaksanakan pemeriksaan Berkala tidak di semua sekolah.

Tindak lanjut Meningkatkan koordinasi lintas sektor; MoU dengan Dinas Pendidikan dan Olah Raga; prioritas alokasi dana untuk SPM.

6. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut pagu kegiatan ini sebesar Rp. 287.507.901,00 dengan realisasi sebesar Rp. 149.024.539,00 atau 51,83%. Adapun target dari kegiatan ini 11.363 usia lanjut dengan realisasi 10.045 usia lanjut atau 95,78%. Kegiatan ini juga tidak tercapai karena Kunjungan ke posyandu lansia kurang, karena tidak ada pengobatan dan pemeriksaan darah lengkap; Lansia yang datang hanya lansia yang sama, sedikit kunjungan lansia baru, saja sehingga tidak meningkatkan capaian; Ada beberapa PUSKESMAS dengan sasaran proyeksi terlalu tinggi daripada sasaran riil. Tindak lanjutnya Meningkatkan kerjasama lintas sektor, mendorong PUSKESMAS untuk membuat inovasi dalam pelayanan lansia, menentukan sasaran berdasarkan sasaran proyeksi Pusdatin dengan dibandingkan dengan sasaran masing-masing PUSKESMAS.
7. Pelayanan kesehatan pada usia produktif, setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun, sedangkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi: Edukasi kesehatan, skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan skrining faktor risiko pada usia produktif: skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi: Pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah, Anamnesa perilaku berisiko. Edukasi yang dilaksanakan di

Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Target dari kegiatan ini 71.412 usia produktif dengan realisasi 61.871 usia produktif atau 86,64%. Hal ini juga tidak memenuhi target karena (1). Mobilisasi petugas dan kader kesehatan yang sangat tinggi; (2). Masih rendahnya jejaring kerja untuk program kesehatan usia produktif; (3). Belum adanya kesepakatan kepala puskesmas terkait pencapaian SPM; (4). Dukungan sarana dan prasarana baik dari daerah. Rencana tidak lanjut (1). Meningkatkan advokasi kebijakan yg berpihak terhadap program kesehatan dan sosialisasi kegiatan usia produktif; (2). Melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara komprehensif untuk kegiatan program layanan kesehatan usia produktif; (3). Meningkatkan kapasitas SDM tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan usia produktif; (4). Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat khusus kader posbindu penyakit tidak menular.

8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, pagu kegiatan ini Rp. 28.704.770,00 dengan realisasi Rp. 26.330.000,00 atau 91,75%. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan skrining pada fasilitas kesehatan dan mencatat masyarakat yang menderita hipertensi dan tercatat 100% atau 10.045 penderita hipertensi dari target 10.045 penderita hipertensi. Kegiatan ini berhasil karena memenuhi capaian. Diharapkan kegiatan ini dapat dipertahankan.
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan penjangkaran pada masyarakat dengan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mengetahui keberadaan masyarakat yang menderita Diabetes Melitus. Dan ternyata hasil yang diperoleh lebih besar dari target yang ingin dicapai yaitu sebesar 183 penderita diabetes melitus atau 100% dari

target 36 penderita diabetes melitus. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 30.849.370,00 dengan realisasi 85,16% atau sebesar Rp. 26.270.000,00.

10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, pagu kegiatan ini Rp. 158.993.000,00 dengan realisasi Rp. 112.425.646,00 atau 70,71%. Kegiatan ini juga melibatkan Perangkat Daerah (PD) lain atau lintas sektor seperti Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas. Target dari kegiatan ini 179 pasien orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dari target 179 pasien ODGJ atau 100%.
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, kegiatan ini dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan saat pasien memeriksakan diri dengan gejala tuberkolusis melalui pemeriksaan air liur tatau dahak yang kemudian dilakukan cek laboratorium dan pada tahun 2022 didapat 1.157 penderita tuberkolusis (TB) atau 54,86% dari target 2.109 pasien TB. Ini menandakan status kesehatan meningkat karena penderita kurang dari target. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 153.886.500,00 dengan realisasi Rp. 65.830.000,00 atau 42,78%. Kegiatan ini juga tidak memenuhi target karena (1). Anggaran untuk Program TBC tidak merata di semua Puskesmas; (2).Seringya terjadi pergantian petugas TBC di Puskesmas, sehingga harus melatih ulang Puskesmas (3). Tidak semua Puskesmas tersedia Petugas Analis; (4).Tidak semua petugas puskesmas memiliki Labtop, sementara hasil kegiatan harus di input di Aplikasi online dan menyebabkan keterlambatan dalam proses pelaporan; (5) .Nakes sulit mendapatkan sampel dahak yang baik; (6). Perubahan Alur diagnostik dari menggunakan lab Mikroskopis menjadi Lab TCM. yang menjadi Kendalan selain jarak yang jauh pada sebagian Puskesmas Juga kualitas dahak harus baik; (7). Adanya

Penolakan dari masyarakat untuk di lakukan skrining TBC, Kebanyakan kasus TBC baru di temukan jika sudah ada komplikasi penyakit lain. Adapun rencana tindak lanjut (1). Mendampingi Pengelola Prog.dalam penyusunan RKA (2). Melakukan OJT kepada Petugas yang baru; (3). Mengirim sampel dahak ke RSUD Kuala Kurun untuk pemeriksaan TCM (menyiapkan anggaran di kabupaten untuk kegiatan tersebut); (4).Melewati Kepala Puskesmas agar Labtop yang lain di puskesmas bisa bergantian dengan pengelola Program TBC; (5). Melatih Petugas Puskesmas cara KIE kepada Masyarakat tentang skrining TBC; (6). Menyiapkan anggaran di Kabupaten untuk pengantarsampel pemeriksaan TCM dari Puskesmas; (7). Edukasi Puskesmas agar berkoordinasi dengan Promkes dalam promosi kesehatan di masyarakat.

12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan skrining di tempat-tempat hiburan malam, lokalisasi dan tempat-tempat yang dianggap sumber penularan. Dari kegiatan ini terjaring penderita sebanyak 2.161 orang atau 75,76% dari target 2.856 orang. Kegiatan ini juga bekerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Gunung Mas. Pagu kegiatan ini sebesar Rp. 238.360.000,00 dengan realisasi 86.250.000,00 atau 36,18%. Kegiatan ini tidak tercapai karena (1). Estimasi ibu hamil yang menjadi sasaran screening tinggi dari data riil. Datanya dari Pusdatin; (2). Sebagian Pengelola Program PKM kurang aktif dalam pelaksanaan kegiatan, Rendahnya Motivasi, kurangnya kerjasama, komunikasi dan koordinasi antar pengelola program; (3). Dukungan Sarana baik dari Daerah dan Pusat yang terbatas. Tindak lanjut kegiatan ini meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor, Mendorong

Puskesmas untuk lebih giat dalam mencapai target sasaran yang sudah di tentukan di masing-masing Puskesmas.

Data di atas menunjukkan bahwa Persentase Cakupan Standar Pelayanan Minimal diukur melalui: (1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; (2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; (3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; (4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita; (5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; (6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; (7) Pelayanan kesehatan pada usia produktif; (8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; (9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; (10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; (11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan (12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV. 12 (dua belas) indikator tersebut di atas menunjukkan capaian dengan rata-rata 83,90%. Berdasarkan data Perjanjian Kinerja, target Persentase Cakupan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022 adalah sebesar 100%, dalam realisasi pencapaian kinerjanya sebesar 83,90%.

#### 1.4. Menurunnya Angka Stunting

**Tabel 4.6.**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Menurunnya Angka Stunting**  
Indikator : Menurunnya angka stunting

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita stunting yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balita stunting	20,16%	82,32	50,10

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan penyuluhan, pembinaan kader posyandu, pengadaan makanan tambahan

seperti MP-ASI dan lain-lain. Kegiatan ini cukup berhasil dengan capaian kurang dari target yang berarti ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi bagi balita. Sedangkan pagu kegiatan ini sebesar Rp. 1.080.867.500,00 dan realisasi Rp. 541.524.390,00 atau 50,10%.

Pada 2021, Kabupaten Gunung Mas memiliki angka prevalensi stunting 35,9 persen dan merupakan tertinggi di Kalimantan Tengah. Namun berkat dukungan dari Bupati dan Wakil Bupati Gunung Mas, berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting Gunung Mas turun tajam menjadi 17,9 persen dan jauh lebih rendah daripada prevalensi stunting Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada angka 26,9 persen.

Data di atas menunjukkan bahwa Menurunnya Angka Stunting diukur melalui Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Berdasarkan data target tahun 2022 adalah 20,16% dengan realisasi sebesar 82,32%.

## 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Hasil pengukuran 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan diukur melalui 1 (satu) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.7.**  
**Target dan Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan promosi kesehatan sesuai standar	17	17	100,00
	Jumlah upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	3	3	100,00
	Jumlah Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat yang disediakan	5	5	100,00
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>100</b>

Berdasarkan data Tabel 4.7. di atas diketahui bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 100%.

**Tabel 4.8.**  
**Indikator dan Capaian Kinerja Persentase Puskesmas yang Mampu Melaksanakan Upaya Promosi Kesehatan**

**Sasaran Strategis** : Meningkatnya upaya promosi kesehatan gerakan hidup bersih dan sehat

**Indikator** : Persentase Puskesmas yang mampu melaksanakan upaya promosi kesehatan

SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan promosi kesehatan sesuai standar	Puskesmas	17	100	38,88
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan	Kali kegiatan	3	100	6,80
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Media Promosi dan Informasi sadar hidup sehat yang disediakan	Tema	5	100	73,43

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan, kegiatan ini berisikan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS) yang menghimbau masyarakat untuk melakukan hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini juga mengadakan Media Komunikasi Informasi dan Komunikasi (KIE) untuk pencerahan masyarakat serta kegiatan pertemuan pengelola promosi kesehatan (Promkes) yang ditujukan bagi tenaga kesehatan di puskesmas sehingga promosi kesehatan juga dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan di puskesmas. Realisasi kegiatan ini telah dilaksanakan di 17 puskesmas dari target 17 puskesmas atau 100%. Sedangkan pagu kegiatan ini sebesar Rp. 599.444.616,00 dengan realisasi Rp. 239.054.200,00 atau 39,88%.

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan ini merupakan 3 kali pertemuan penyuluhan keamanan pangan bagi masyarakat. Advokasi vaksinasi Covid-19 juga merupakan bagian dari kegiatan ini yang bertujuan meningkatkan dukungan serta Komitmen Lintas Sektor dalam Penyusunan Kebijakan, Pengembangan Strategi dan Advokasi,

meningkatkan komitmen bersama antar Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penggalangan jejaring komunikasi informasi untuk optimalisasi pencapaian target keikutsertaan Vaksinasi Covid-19 sehingga tercapainya kekebalan kelompok (Herd Immunity) di masyarakat. Selain itu kegiatan ini juga menyertakan dana hibah untuk Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gunung Mas. Target dari kegiatan ini yaitu 3 kegiatan yang semuanya teralisasi dengan baik. Sedangkan pagu kegiatan ini sebesar Rp. 234.283.920,00 dengan realisasi Rp. 15.933.980,00 atau 6,80%.

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, kegiatan ini berisikan cetak Media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) seperti cetak spanduk tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebagai media promosi kesehatan yang disebarluaskan ke seluruh Kabupaten Gunung Mas. Kegiatan ini juga bagian dari peringatan Harim Kesehatan Nasional (HKN), akan tetapi kegiatan ini dibatalkan karena pandemi Covid19. Pagu kegiatan ini Rp. 109.110.150,00 an realisasi Rp. 80.120.400,00 atau 73,43%. Target kegiatan ini 5 tema dan raelisasi juga 5 tema.

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 4.9.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
6	Indeks Kesehatan	-	77,76	78,03	100,35	DINAS KESEHATAN

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

**Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN**

**STRATEGIS 4: MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT** diukur melalui indikator Indeks Kesehatan, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 100,35%.

<b>SASARAN STRATEGIS 5</b>			
<b>MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN</b>			

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan diukur melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.1.**  
**Sasaran Strategis 5: Meningkatkan Peran Perempuan Dalam Pembangunan**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Tabel 2.3.35. di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 5 ini, yaitu: Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

**1. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

Hasil pengukuran kinerja Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan diukur melalui 1 (satu) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.2.**  
**Target dan Realisasi Program Pengarus Utamaan Gender dan PEMBERDAYAAN Perempuan**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	89,90	88,71	98,67
<b>Rata-rata capaian</b>				-

Sasaran strategis ini diukur menggunakan IKU: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target indeks 89,9 dan realisasi indeks sebesar 88,71 dengan tingkat capaian 98,67%. Hal ini menunjukkan Pembangunan Gender di Kabupaten Gunung Mas cukup baik, Sejalan dengan IPG capaian IDG Kabupaten Gunung Mas juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan IDG Nasional yaitu 75,57 dan IDG Kalimantan Tengah yaitu 82,41. Hasil capaian ini di dapat berdasarkan perbandingan antara tiga komposit yaitu Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen, Indeks Perempuan sebagai Tenaga Profesional dan Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan dan Indikator Kunci sebagai pendukung capaian sasaran sebagai berikut:

**Tabel 5.3.**  
**Capaian Indikator Komposit IDG Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian
Indeks Keterlibatan Perempuan di Parlemen	Indeks	48,00
Indeks Perempuan sebagai Tenaga Profesional	Indeks	41,14
Indeks Sumbangan Pendapatan Perempuan	Indeks	49,92

Persentase Anggaran Resposif Gender (ARG)	%	2,58
Persentase Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota	%	100%
Persentase Keluaran Produk Hukum tentang PUG	%	100%

Disamping ketiga komposit dalam IDG yang mendukung tercapainya sasaran strategis, indikator kerja kunci yang ada pada tabel diatas juga mendukung tercapainya angka IDG mendekati target. Seperti Persentase Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota, di Kabupaten Gunung Mas Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan ada 4 yaitu: (1) Gabungan Organisasi Wanita (GOW) (2) Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) (3) Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI); dan (4) Dharma Wanita Persatuan (DWP). Semua mendapat dukungan dana untuk kelancaran kegiatan peningkatan peran perempuan dalam organisasi tersebut. Indikator Kinerja Kunci lainnya adalah Anggaran Responsif Gender (ARG), dimana keseimbangan dalam penganggaran yang berpihak terhadap peningkatan peran perempuan dalam lingkungan bekerja juga mulai terpenuhi. Walaupun masih belum mencapai target, tapi setidaknya sudah mulai mengakomodir terlindunginya hak-hak perempuan yang ikut berperan dalam pembangunan. Selain itu terbitnya produk hukum berupa Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah turut memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas.

Capaian IPG Kalimantan Tengah saat ini berada di urutan teratas di Indonesia mengungguli Provinsi Sulawesi utara di posisi kedua dan Maluku Utara di tempat ke tiga, prestasi ini juga didukung oleh capaian IDG Kabupaten Gunung Mas dengan Indeks

Pembangunan Gender tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Barito Selatan dan Barito Utara serta Barito Timur yang capaian IDG nya lebih dari indeks 80. Keberhasilan capaian IDG Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa pencapaian Sasaran Strategis: Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan telah dilaksanakan dengan baik dan semoga dapat dipertahankan maupun ditingkatkan lagi dikemudian hari.

Berdasarkan Tabel 2.3.36. di atas diketahui bahwa **Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 98,67%.**

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 5.4.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

No	Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Perangkat Daerah/Sumber Data
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	89,9	88,71	89,15	Dinas P2KBP3A

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 5: MENINGKATNYA PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN yang diukur dengan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 89,15%.

## SASARAN STRATEGIS 6

### MENURUNNYA PREVELENSI STUNTING

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 6: Menurunnya Prevelensi Stunting diukur melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6.1.**  
**Sasaran Strategis 6: Menurunnya Prevelensi Stunting**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
6	Menurunnya Prevelensi Stunting	Angka Prevelensi Stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Tabel 6.1. di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 6 ini, yaitu: Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

#### 1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Hasil pengukuran kinerja Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) diukur melalui 1 (satu) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6.2.**  
**Target dan Realisasi Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Prevelensi Stunting	18,55	18,34	97,12
Rata-rata capaian				-

Sasaran strategis ini diukur menggunakan IKU : Angka Prevalensi Stunting dengan target 18,55 % dengan realisasi sebesar 18,34% dengan tingkat capaian 97,12 %. Tercapainya target yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kinerja tidak lepas dari tercapainya indikator kinerja kunci penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak dalam mendukung tercapainya target penurunan angka Prevalensi Stunting sebagai indikator kinerja utama, pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.3.**  
**Capaian Indikator Kerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022**

Indikator Kinerja Kunci		Satuan	Target	Realisasi	%
Persentase Sasaran Keluarga Beresiko Stunting Terdampingi					
1.	Pendampingan Calon Pengantin	Orang	958	42	4,3
2.	Pendampingan Ibu Hamil	Orang	2.736	1899	69,4
3.	Pendampingan Pasca Salin	Orang	2.736	701	25,6

Dapat dilihat turunnya angka Prevalensi Stunting sejalan dengan mulai meningkatnya capaian Persentase terdampinginya Sasaran Keluarga Beresiko Stunting, maka sasaran untuk menurunnya angka prevalensi stunting dapat dikategorikan Sangat Tinggi atau sangat baik. Perlu diketahui Penurunan angka Prevalensi Stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor dan diperlukan kerjasama yang baik antar lintas sektor. Penurunan Angka Prevalensi Stunting tidak bisa dicapai apabila semua lini dalam pemerintahan daerah tidak responsif dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dalam percepatan penanganan Stunting. Persentase indikator kunci diatas hanya merupakan sedikit dari faktor pendukung yang mempengaruhi pencegahan terjadinya Stunting.

**Tabel 6.4.**  
**Perbandingan Capaian Angka Prevalensi Stunting Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Menurunnya angka Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting	20,65 %	35,9 %	18,55 %	18,34%

Tabel di atas menunjukkan perbandingan angka Prevalensi Stunting yang menurun dalam 1 tahun terakhir, sejalan dengan Persentase Sasaran Keluarga Beresiko Stunting Terdampingi juga mulai berjalan. Dengan adanya penurunan angka Prevalensi Stunting tersebut diharapkan kegiatan percepatan penurunan Stunting semakin terencana dengan baik dan digiatkan secara masif disemua Organisasi Pemerintah Daerah terkait. Sehingga target sasaran strategis jangka menengah dapat tercapai.

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 97,12%.**

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 6.5.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

No	Indikator	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)	Perangkat Daerah/Sumber Data
6	Angka Pravalensi Stunting	%	18,43	17,9	97,12	Dinas P2KBP3A

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 6: MENURUNNYA PREVELENSI STUNTING yang diukur dengan Indikator Angka Prevelensi Stunting, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian **97,12%**.

**SASARAN STRATEGIS 7**  
**MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR PERTANIAN DAERAH**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah diukur melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7.1.**  
**Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
7	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Berdasarkan Tabel 2.3.44. di atas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) program dalam sasaran strategis 7 ini, yaitu: (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; dan (3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.

**1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Hasil pengukuran kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian diukur melalui pencapaian sasaran

kinerja Tanaman Pangan dan Hortikultura guna mendukung sasaran strategis dan meningkatkan produksi baik jagung, padi sawah dan padi ladang pada kegiatan yang difokuskan untuk pencapaian produksi.

**Tabel 7.2.**  
**Target dan Realisasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

NO	FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI PADA TAHUN 2021	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
			2022	2022	%	
<b>1</b>	<b>Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton/Tahun)</b>					
<b>A</b>	<b>Tanaman Pangan</b>					
a	Padi	2.540	4.337	3.064	71	Dinas Pertanian
	- Padi Sawah	1.240	1.995	3.395	170	Dinas Pertanian
	- Padi Ladang	1.300	2.342	2.724	116	Dinas Pertanian
b	Jagung	895	760	400	53	Dinas Pertanian
c	Ubi Kayu	2090	2367	177	7	Dinas Pertanian
<b>B</b>	<b>Tanaman Hortikultura</b>					
a	Cabe Rawit	23	28	42	150	Dinas Pertanian
b	Kacang Panjang	76	8	50	625	Dinas Pertanian
c	Durian	355	413	395	96	Dinas Pertanian
d	Pisang	450	11	20	182	Dinas Pertanian
e	Rambutan	75	15	18	120	Dinas Pertanian
f	Nanas	500	25	40	160	Dinas Pertanian
<b>2</b>	<b>Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kwintal/Ha)</b>					
<b>A</b>	<b>Tanaman Pangan</b>					
a	Padi					
	- Padi Sawah	31	32	32	100	Dinas Pertanian
	- Padi Ladang	2,2	30	20	67	Dinas Pertanian
b	Jagung	32	40	35	88	Dinas Pertanian
c	Ubi Kayu	38	40	39	98	Dinas Pertanian
<b>B</b>	<b>Tanaman Hortikultura</b>					
a	Cabe Rawit	6,1	7	6	86	Dinas Pertanian
b	Kacang Panjang	1,1	1	1	100	Dinas Pertanian
c	Durian	48	52	68	131	Dinas Pertanian
d	Pisang	30	34	125	368	Dinas Pertanian
e	Rambutan	6	6	60	1.000	Dinas Pertanian
f	Nanas	100	91	230	253	Dinas Pertanian

3	Luas Pengembangan Tanaman pangan dan Hortikultura (Ha/Tahun)					
<b>A</b>	<b>Tanaman Pangan</b>					
a	Padi	1225	1440	301,80	21	Dinas Pertanian
	- Padi Sawah	570	640	109,25	17	Dinas Pertanian
	- Padi Ladang	655	800	192,55	24	Dinas Pertanian
b	Jagung	300	200	100,25	50	Dinas Pertanian
c	Ubi Kayu	57	600	45,50	8	Dinas Pertanian
<b>B</b>	<b>Hortikultura</b>					
a	Cabe Rawit	37	41	30	73	Dinas Pertanian
b	Kacang Panjang	69	74	50	68	Dinas Pertanian
c	Durian	74	85	95	112	Dinas Pertanian
d	Pisang	15	3	11	367	Dinas Pertanian
e	Rambutan	25	26	30	115	Dinas Pertanian
f	Nanas	5	3	6	200	Dinas Pertanian
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>159</b>	

### Permasalahan

Produksi padi Tahun 2022 menurun 29,35% atau senilai 1.273 Ton dari target capaian Tahun 2022 namun mengalami peningkatan 20,63% atau 524 Ton dari capaian produksi padi Tahun 2021. Penurunan produksi padi tersebut disebabkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh Dominan dampak perubahan iklim terhadap penurunan produksi;
- 2) Rendahnya produktivitas/sumberdaya petani; dan
- 3) Minimnya pemanfaatan dan penerapan teknologi pertanian pada pengembangan padi ladang.

### Solusi Pemecahannya

Untuk mengatasi permasalahan penurunan produksi padi sawah dilaksanakan beberapa solusi pemecahan sebagai berikut :

1. Solusi atau penanganan pengaruh dominan dari dampak perubahan iklim terhadap penurunan produksi.

Dilakukan beberapa upaya dari solusi permasalahan tersebut sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi wilayah terdampak berdasarkan kondisi iklim dan kondisi tanah.
- 2) Mengembangkan teknik prediksi dan perkiraan faktor iklim yang akurat guna memberi peringatan dini kepada petani

mengenai perubahan iklim yang akan terjadi melalui sumber data BMKG.

- 3) Perbaiki saluran irigasi melalui program optimalisasi lahan.
- 4) Menyiapkan paket teknologi budidaya yang mampu beradaptasi pada kondisi lainnya berupa (Pola tanam, varitas, penanggulangan hama dan penyakit).

2. Solusi dan penanganan rendahnya produktivitas/sumberdaya petani

Dilakukan berbagai upaya sebagai solusi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan upaya peningkatan kapasitas petani dengan melaksanakan pelatihan atau bimtek, kunjungan belajar dan penyuluhan.
- 2) Memaksimalkan penggunaan saprodi yang berkualitas.
- 3) memaksimalkan intensitas pendampingan dari petugas PPL.

## 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Hasil pengukuran kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian yaitu:

**Tabel 7.3.**  
**Target dan Realisasi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
		2022	2022	%	
1	<b>Kegiatan Pengembangan Sarana Pertanian</b>				
a	Bantuan Persiapan Lahan Olah Tanah Jagu	100 Ha	100 Ha	100	Dinas Pertanian
2	<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>				
a	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan	7 Unit	7 Unit	100	Dinas Pertanian
b	Pembangunan Jembatan pada Jalan Produksi Perkebunan	4 Unit	5 Unit	100	Dinas Pertanian
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>				<b>100</b>	

### Permasalahan

1. Beberapa kelompok tani penerima manfaat yang dilaksanakan secara TOT tidak dapat dilakukan pembakaran lahan karena memasuki musim penghujan.
2. Kendala di lapangan yakni saat memasuki musim hujan, akses ke lokasi Desa Batu Puter sulit dicapai karena ada beberapa titik banjir menuju desa tersebut. Namun penyelesaian pekerjaan masih sesuai dengan batas waktu pelaksanaan kontrak.

### Solusi Pemecahannya

1. Dilakukan penanaman tanpa pembakaran lahan.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan fisik pada saat cuaca cerah supaya dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 100%.**

### 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Hasil pengukuran kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya diukur melalui indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 7.4.**  
**Target dan Realisasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	1.700	1.194,30	70,25
Rata-rata capaian				-

Produksi perikanan budidaya adalah produksi perikanan yang dihasilkan dari budidaya ikan dalam kolam dan karamba. Pada tahun 2022 target produksi perikanan budidaya adalah sebanyak 1700 ton.

**Tabel 7.5.**  
**Realisasi Produksi Perikanan Budidaya berdasarkan Kecamatan, RTP dan Tempat Pemeliharaan**

No	Kecamatan	Rumah Tangga Perikanan (RTP)	Produksi Perikanan Budidaya (ton)		Jumlah (ton)	%
			Kolam	Karamba		
1	Rungan	112	75,70	-	75,7	6,3
2	Rungan Hulu	83	37,19	-	37,19	3,1
3	Rungan Barat	68	65,40	-	65,4	5,5
4	Manuhing	150	87,32	-	87,32	7,3
5	Manuhing Raya	114	55,84	-	55,84	4,7
6	Kurun	213	406,40	0,92	407,32	34,1
7	Tewah	167	139,76	0,81	140,57	11,8
8	Sepang	137	120,87	-	120,87	10,1
9	Mihing Raya	140	80,50	-	80,5	6,7
10	Kahayan Hulu Utara	110	59,71	-	59,71	5,0
11	Miri Manasa	124	34,09	-	34,09	2,9
12	Damang Batu	50	29,07	0,70	29,77	2,5
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.468</b>	<b>1.191,85</b>	<b>2,43</b>	<b>1.194,28</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Buku Statistik Perikanan-DPKP, 2022

Pencapaian target produksi perikanan budidaya terealisasi 1.194,3 ton atau 70,3% dari 1.700 ton merupakan kontribusi dari kolam sebanyak 1.191,85 ton dan karamba sebanyak 2,43 ton. Produksi terbanyak dari Kecamatan Kurun baik dari kolam maupun karamba sebanyak 34,1% dan paling sedikit Kecamatan Damang Batu

sebanyak 2,5% dari total produksi perikanan budidaya. Dari total produksi kolam jenis ikan yang diproduksi adalah ikan patin sebanyak 644,58 ton (54,1%), ikan Nila sebanyak 278,69 ton (23,4%), ikan gurami sebanyak 164,94 ton (13,8%) dan ikan lele sebanyak 103,64 ton (8,7%). Sedangkan dari total produksi karamba jenis ikan yang diproduksi adalah ikan patin 1,33 ton dan ikan nila 1,10 ton.

**Tabel 7.6.**  
**Perbandingan Pertumbuhan Produksi Perikanan dan Produksi Benih Ikan Air Tawar Tiga Tahun Terakhir**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Produksi Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah produksi perikanan (ton/tahun)	4.436	3.982	1.137	1.321,0
	Pertumbuhan (%)		-10	-71	16
2.	Jumlah produksi benih ikan air tawar (ekor/tahun)	210.000	212.327	87.500	173.240
	Pertumbuhan (%)		1,1	-58,8	98,0

Produksi perikanan merupakan gabungan dari produksi perikanan budidaya dan tangkap. Produksi perikanan budidaya adalah produksi perikanan yang dihasilkan dari budidaya ikan dalam kolam dan karamba. Produksi perikanan tangkap adalah produksi perikanan yang dihasilkan dari penangkapan ikan dari perairan umum sungai dan danau.

Pertumbuhan produksi perikanan terjadi peningkatan sebesar 16% dan produksi benih juga meningkat 98% dibandingkan tahun 2021, tidak seperti tahun 2020 dan 2021 yang mengalami penurunan akibat dampak covid 19. Pada tahun-tahun itu terjadi pembatasan pergerakan penduduk yang berdampak pula terhambatnya distribusi hasil produksi suatu daerah.

**Tabel 7.7.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target**  
**Jangka Menengah Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Produksi					Target Renstra 2024	%
			2019	2020	2021	2022	Total		
1.	Peningkatan produksi perikanan dan benih ikan air tawar	Jumlah produksi perikanan (ton/tahun)	4.436	3.982	1.137	1.321,0	10.875	15.524	70,0
		Jumlah produksi benih ikan air tawar (ribu ekor/tahun)	210,0	212,3	87,5	173,2	683,1	1.032,3	66,2

Jika dibandingkan target akhir Renstra 2024, produksi perikanan capai 70% dan produksi benih ikan air tawar capai 66,2%, jadi produksi perikanan masih mempunyai gap 30% dan produksi benih ikan air tawar gap 33,8% untuk mencapai predikat MEMUASKAN.

**Tabel 7.8.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Target**  
**Nasional Dalam Renstra KKP 2020-2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Target Nasional 2022*)	%
1	Peningkatan Produksi Perikanan dan Benih	Jumlah Produksi Perikanan (ribu ton/tahun)	10,9	17.740	0,06
		Jumlah Produksi Benih (ribu ekor/tahun)	683,1	51.000	1,3

\*) Angka dari Renstra KKP 2020-2024

Jika dibandingkan dengan target nasional dalam renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun 2020-2024 realisasi produksi perikanan Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 berkontribusi 0,06 % terhadap target nasional 17,7 juta ton dan komulatif produksi benih tahun 2019-2022 berkontribusi 1,3% terhadap target produksi benih nasional sebanyak 51 juta ekor benih ikan air tawar. Sehingga capaian kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan tahun 2022 memberikan kontribusi positif pada capaian target nasional.

**Tabel 7.9.**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja yang didukung	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
				Target	Realisasi	%		
1.	Peningkatan produksi perikanan dan benih ikan air tawar	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (4 sub kegiatan)	Jumlah produksi perikanan budidaya	810.449.661,0	771.623.705,0	95	70	-25
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (2 sub kegiatan)	Jumlah produksi benih ikan air tawar	888.609.390,0	879.162.002,0	99	120	21
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	75.559.476,0	72.790.554,0	96	70	-26
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>1.723.576.261,0</b>	<b>1.774.618.527,0</b>	<b>97</b>	<b>87</b>	<b>-10</b>

Untuk mengukur tingkat efisiensi adalah membandingkan capaian kinerja (output) dengan penggunaan sumber daya (input), dimana output adalah sesuatu yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan input berupa anggaran yang diperlukan untuk memperoleh output. Tingkat efisiensi yang baik adalah minimal realisasi anggaran sama dengan realisasi kinerja atau kalau dinotasi dalam angka 1 : 1 artinya 1 rupiah yang dikeluarkan menghasilkan 1 % capaian kinerja. Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil:

1. Pencapaian kinerja produksi perikanan budidaya sebesar 70% diperlukan anggaran 95% artinya 1 rupiah anggaran menghasilkan 0,7 % kinerja atau 1:0,7, sehingga terdapat kelebihan 25% anggaran untuk mencapai 70%.
2. Pencapaian produksi perikanan tangkap sebesar 70% diperlukan anggaran 96%, artinya 1 rupiah anggaran menghasilkan 0,7 % kinerja atau 1:0,7, sehingga terdapat kelebihan 26% anggaran untuk mencapai 70%.
3. Pencapaian produksi benih ikan air tawar sebesar 120% diperlukan anggaran 99%, artinya 1 rupiah anggaran menghasilkan 1,2 % kinerja atau 1:1,2, sehingga kinerja menjadi surplus 21%.

Rata-rata pencapaian kinerja produksi perikanan dan benih ikan air tawar sebesar 87% memerlukan anggaran 97%, artinya 1 rupiah anggaran menghasilkan 0,8% kinerja atau 1 : 0,8.

Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dalam program Perikanan Budidaya:

1. Penurunan daya beli akibat pandemi Covid 19 yang tahun 2022 masih dalam tahap pemulihan.
2. Pelaku usaha budidaya yang masih sedikit dibandingkan potensi budidaya yang ada di Kabupaten Gunung Mas dan mayoritas hanya dijadikan usaha sampingan.
3. Ketersediaan pakan masih tergantung dari luar Kabupaten Gunung Mas dan terkendala kontinuitas pasokan karena jalur transportasi yang kurang baik.
4. Pelaku usaha budidaya ikan belum mampu mengakses permodalan dari lembaga keuangan terkendala pada skala usaha dan kelembagaan.

Alternatif pemecahan masalah yang telah dilakukan adalah:

1. Pengumpulan data statistik perikanan budidaya
2. Pelatihan dalam rangka pengembangan kapasitas pembudidaya ikan tentang cara budidaya ikan yang baik.
3. Sosialisasi Perda tentang perlindungan pembudidaya ikan dan nelayan.
4. Stimulan bantuan benih dan pakan ikan kepada 3 (tiga) kelompok pembudidaya ikan.
5. Penilaian kelas kelompok pembudidaya ikan.
6. Pengurusan izin usaha mikro untuk melengkapi syarat anggota pokdakan dapat mengakses pinjaman Kredit Usaha Rakyat dari perbankan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang peningkatan atau penurunan pencapaian kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan, sub kegiatan dan realisasi anggaran:

**Tabel 7.10.**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran**

<b>3.25.04</b>	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>1.699.039.051</b>	<b>22,6</b>	<b>1.650.785.707</b>	<b>97,2</b>
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	229.089.137	3,1	197.211.500,0	86,1
3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	26.421.900	0,4	12.907.900,0	48,9
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	202.667.237	2,7	184.303.600,0	90,9
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.469.969.914	19,6	1.453.574.207,0	98,9
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.902.224	0,7	53.298.030,0	96,9
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	162.414.856	2,2	160.274.554,0	98,7
3.25.04.2.04.03	Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	726.194.534	9,7	716.887.448,0	99,0
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	526.376.300	7,0	521.153.169,0	99,0

Indikator produksi perikanan budidaya didukung program pengelolaan perikanan budidaya dengan sub kegiatan: (a) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil dengan penyerapan anggaran 49% dan realisasi capaian kinerja jumlah peserta pelatihan 29 orang atau 116% dari target 25 orang; 9b) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan realisasi anggaran 91% dan capaian kinerja 100%; (c) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi anggaran 97% dan capaian kinerja 100%; (d) Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat realisasi anggaran 99% dan capaian kinerja 100%.

Dalam mencapai peningkatan produksi perikanan yang optimal perlu dilakukan penajaman output dan outcome program dan kegiatan yang lebih diarahkan untuk:

1. Peningkatan SDM pelaku budidaya melalui pendidikan dan pelatihan yang terus menerus.
2. Pengembangan perikanan berbasis kawasan terpadu dengan metode tematik perlu segera dilakukan sebagai stimulus pertumbuhan usaha bidang perikanan seperti kampung budidaya.

3. Pembinaan kelompok berbasis kelas kelompok pemula, madya dan utama untuk mengetahui strategi yang tepat dalam melakukan pendampingan.
4. Mendorong stakeholder mengembangkan pakan mandiri sebagai pakan alternatif.
5. Memfasilitasi pengurusan izin usaha mikro sebagai persyaratan anggota kelompok mengakses permodalan.
6. Membentuk dan membina pokmaswas dengan mendorong aturan yang mengakomodir kearifan lokal sebagai upaya menjaga perairan dari penangkapan ikan secara illegal.
7. Menetapkan daerah konservasi untuk mempertahankan habitat ikan endemik di Kabupaten Gunung Mas.
8. Melakukan restocking pada wilayah hulu sungai untuk proses pengayaan stok ikan.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sedang dengan capaian 70,25%.**

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 7.11.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	5,47	5,21	95,25	BPS KAB. GUNUNG MAS

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

**Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 7: MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS SEKTOR**

**PERTANIAN DAERAH** diukur melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 95,25%.

**SASARAN STRATEGIS 8**  
**MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah diukur melalui indikator Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8.1.**  
**Sasaran Strategis 8: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
8	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 8 ini, yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal.

**1. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Realisasi rencana aksi IKU DPMPSTSP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8.2.**  
**Realisasi Rencana Aksi IKU DPMPTSP Tahun 2022**

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN				REALISASI										
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET			URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9										
Kemudahan Perizinan	Persentase pengajuan perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan tepat waktu	Tr I	100%	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah masyarakat dan instansi yang mengajukan PBG yang terlayani	pemohon	Tr I	20 pemohon	6 pemohon									
								Tr II	42 pemohon	12 pemohon									
								Tr III	63 pemohon	2 pemohon									
								Tr IV	90 pemohon	43 pemohon									
		Tr II	100%		Tr I	1 kec	Jumlah Kecamatan yang terlayani	Kec/ tahun	Tr I	1 kec	1 kec								
									Tr II	2 kec	2 kec								
									Tr III	3 kec	2 kec								
									Tr IV	4 kec	0 kec								
		Tr III	100%		Tr I	1 aplikasi OSS - RBA / SIPET	Jumlah Pelayanan yang terlayani melalui aplikasi pendaftaran online	Aplikasi SIPET/ Tahun	Tr I	1 aplikasi OSS - RBA / SIPET	-								
									Tr II	-SDA-	-								
									Tr III	-SDA-	-								
									Tr IV	-SDA-	1 APP SIPET								
									Tr IV	100%	Tr II	-SDA-	-	-	-	-			
																	Tr III	-SDA-	-
																	Tr IV	-SDA-	1 APP SIPET

Kinerja DPMPTSP Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan dari berbagai Program dan Kegiatan dapat dilihat pada uraian berikut, salah satunya yaitu Sasaran 4:

**Tabel 8.3.**  
**Pencapaian Sasaran 4 Program dan Kegiatan Sasaran 4**

***Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan***

Indikator kinerja, target dan realisasinya sebanyak 1 (satu) kegiatan, dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	
				Keuangan	Fisik
1	Jumlah Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	100 persen	100 persen	94,12	96,49

Hasil pengukuran kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8.4.**  
**Target dan Realisasi Program Pelayanan Penanaman Modal**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Masyarakat dan Instansi yang Mengajukan PBG yang Terlayani (Jumlah Pemohon)	215	63	29,30
	Jumlah Kecamatan yang Terlayani (Kecamatan Per Tahun)	10	5	50,00
	Jumlah Pelayanan yang Terlayani Melalui Aplikasi Pendaftaran Online (Aplikasi SIPET/Tahun)	1	1	100,00
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>60</b>

Berdasarkan tabel di atas Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal (1) Jumlah Masyarakat dan Instansi yang Mengajukan PBG yang Terlayani (Jumlah Pemohon) ditargetkan sebanyak 215 pemohon, realisasinya sebanyak 63 pemohon dengan capaian persentase sebesar 29,30%; (2) Jumlah Kecamatan yang Terlayani (Kecamatan Per Tahun) ditargetkan sebanyak 10 kecamatan, realisasinya sebanyak 5 kecamatan dengan capaian persentase sebesar 50%; dan (3) Jumlah Pelayanan yang Terlayani Melalui Aplikasi Pendaftaran Online (Aplikasi SIPET/Tahun) ditargetkan sebanyak 1 pelayanan, realisasinya sebanyak 1 pelayanan dengan capaian persentase sebesar 100%.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa rata-rata capaian **Program Pelayanan Penanaman Modal termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja rendah dengan capaian 60%.**

### **Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Peraturan Bupati No. 1 tahun 2009 tentang Pelimpahan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP, namun keberadaan

Peraturan Bupati tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada, maka perlu perubahan atas Peraturan Bupati Tersebut, Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya mekanisme perizinan pada DPMPTSP. Namun DPMPTSP selalu optimis dalam melakukan pelayanan perizinan kepada masyarakat, ini dibuktikan sejak tahun 2016 yang lalu jumlah jenis izin yang dilayani pada DPMPTSP bertambah yang semula hanya melayani 17 jenis perizinan menjadi 29 jenis perizinan di tahun 2022.

Terbitnya Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 22 Tahun 2017 yang meluaskan wewenang perizinan hingga berjumlah 70 jenis perizinan memperkuat institusi DPMPTSP dalam melakukan pelayanan terpadu satu pintu menjadi pedoman bagi DPMPTSP untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

DPMPTSP selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait izin, terutama instansi-instansi yang belum menyerahkan perizinannya sesuai dengan pelimpahan kewenangan.

Yang harus dibenahi paling awal adalah kepastian persyaratan teknis perizinan, biaya perizinan, SOP dan payung hukum dalam hal perizinan. Hal ini belum berhasil dilaksanakan secara penuh di tahun 2022. Dengan hadirnya One Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) bagi pelayanan perizinan sejak Louncing oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pada hari Senin, Tanggal 9 Agustus 2021 maka Sistem OSS RBA merupakan layanan Daring penerbitan izin berusaha yang akan memudahkan pengusaha mikro hingga makro dalam pengurusan bidang perizinan, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bidang pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

## **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Jumlah pemohon pada tahun 2022 adalah 1.501 pemohon, dapat dirata-ratakan setiap hari nya 4 – 5 pemohon, dengan izin yang reguler. Sumber Daya ASN pada DPMPTSP berjumlah 21 PNS dan 19 PTT dengan struktur organisasi 1 sekretariat dan 3 bidang.

Khusus di Bidang Pelayanan, jumlah pegawai yaitu 1 Kepala Bidang, 2 Sub Koordinator / Tenaga Fungsional, 6 tenaga administrasi. Jumlah tersebut memang saat ini belum memadai dalam menunjang tuntutan kinerja yang semakin berat ke depannya dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi pemohon perizinan. Akibatnya sebagian aparatur harus menangani sejumlah pekerjaan yang datang bersamaan dan sementara itu pekerjaan lain menjadi menumpuk dan lambat ditangani.

Hal lainnya yang ikut menyumbang kurang efisiennya penggunaan sumber daya aparatur adalah dengan tidak adanya staf teknis SKPD lain yang berkantor pada DPMPTSP. Sehingga untuk mengkonsultasikan masalah perizinan yang ada, harus membawa berkas perizinan ke SKPD yang terkait.

Untuk sarana dan prasarana yang ada, masih sangat kurang dimana untuk menggunakan peralatan kerja seperti komputer dan printer harus bergantian. Selain itu ada sejumlah peralatan yang kondisinya sudah rusak berat dan memerlukan penggantian.

Untuk ruang pelayanan saat ini masih belum memadai dimana belum tersedianya nursery room, ruang tunggu bebas rokok dan lain sebagainya.

Hal mendesak yang perlu dilakukan pada tahun mendatang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur

- 1) Peningkatan Kualitas Aparatur melalui pelatihan, pendidikan kilat, bimbingan teknis dan lain sebagainya;
- 2) Alih pengetahuan dari SKPD teknis kepada aparatur bagian front office terutama bagian informasi dan pendaftaran;

- 3) Menempatkan staf teknis SKPD pada bagian *back office* bidang pelayanan;
  - 4) Penambahan jumlah aparatur yang menangani pelayanan.
- b. Sarana Daya Prasarana
- 1) Menambah jumlah peralatan kerja seperti meja kerja, kursi kerja, komputer, printer dan lain sebagainya;
  - 2) Memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang pelayanan prima;
  - 3) Meningkatkan ruang pelayanan yang sejuk dan nyaman.

### **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun capaian kinerja DPMPSTSP Tahun 2022 terus meningkat, didukung dengan salah satu program/kegiatan yaitu program sosialisasi pelayanan perizinan, dan akan menjadi kegiatan rutin tahunan DPMPSTSP, selain program/kegiatan pelayanan Perizinan di Kecamatan. Masyarakat semakin mengerti dan paham akan pentingnya mengurus perizinan dalam berbagai bentuk usaha yang mereka lakukan atau yang akan dilakukan demi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 8.5.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
8	Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi	%	25	25	100,00	DINAS PMPTSP

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 8: MENINGKATNYA KUALITAS DAN DAYA SAING INVESTASI DAERAH** diukur melalui indikator Tingkat Pertumbuhan Nilai Investasi, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 100%.

## **SASARAN STRATEGIS 9**

### **MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 9.1.**  
**Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
9	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 9 ini, yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.

#### **1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Hasil pengukuran kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja diukur melalui 1 (satu) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 9.2.**  
**Target dan Realisasi Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatkan Pengetahuan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	1 Kelompok	1 Kelompok	100,00
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>100</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 100%.**

Indikator Meningkatkan Pengetahuan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja termasuk dalam sasaran Strategis 1 pada capaian kinerja tahun 2022 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DTTKKUKM) Kabupaten Gunung Mas seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 9.3.**  
**Capaian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	1 Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	1 kelompok	1 kelompok	100	Baik
		2 Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS	102 orang	102 orang	100	Baik

Sasaran strategis ini merupakan salah satu komponen upaya mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal-hal yang mendorong sasaran ini berkaitan dengan tenaga kerja siap pakai melalui pelatihan kerja dan pemagangan. Upaya ini dilakukan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan mandiri. Melalui kegiatan ini diharapkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja meningkat, sehingga mampu berkompetisi di pasar kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Indikator pertama meningkatkan pengetahuan dan

pelatihan bagi pencari kerja dengan target 1 kelompok pelatihan menjahit mahir yang berjumlah 10 orang dengan realisasi 1 kelompok juga dengan tingkat capaian 100%.

**Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

**Tabel 9.4.**

**Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019-2022**

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Tahun 2021		Tahun 2022	
		2019	2020	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	15 orang	95 orang	3 kelompok	3 kelompok	1 kelompok	1 kelompok
	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS	12 kecamatan	10 kecamatan	102 orang	102 orang	102 orang	102 orang

Untuk realisasi tahun 2022 dengan indikator kinerja meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja yaitu 1 kelompok kegiatan pelatihan menjahit dengan jumlah 10 orang. Untuk realisasi kondisi awal 2019 sebanyak 15 orang dan tahun 2020 sebesar 95 orang. Dari segi target dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu ada penurunan dikarenakan ada anggaran kegiatan pelatihan dialihkan untuk pemulihan perekonomian.

**Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**Tabel 9.5.**

**Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan Target Akhir 2024**

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir 2024	Capaian (%)
Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	30 orang	30 orang	100
	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS	102 orang	108 orang	105,89

Tahun 2022 merupakan tahun ke-3 implementasi Renstra. Indikator capaian kinerja yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja sebanyak 30 orang, bila

dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Gunung Mas sebesar 30 orang, maka presentase capaian 100% masih masuk dalam status optimis dicapai.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

**Tabel 9.6.**  
**Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	1 kelompok	1 kelompok	100	Pelatihan lebih diprioritaskan untuk mengantisipasi dampak covid-19	
	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS	102 orang	102 orang	100	Membbaiknya situasi pandemic covid-19	

Tabel diatas menunjukkan bahwa sasaran strategis tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi mempunyai 2 indikator sasaran yaitu pertama meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja, kedua terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS dengan tingkat capaian 100%.

Adapun evaluasi dan analisis menurut sasaran strategis dikarenakan program pemulihan ekonomi daerah dimana salah satu kegiatan yaitu proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi hanya mampu melaksanakan kegiatan 1 kelompok pelatihan menjahit saja. Kalau dibanding berdasarkan target Renstra untuk tahun 2022, maka seharusnya kegiatan tersebut mampu memasang target sebesar 3 kelompok atau 30 orang yang mengikuti pelatihan. Komponen yang menunjang keberhasilan adalah koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten yaitu Jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan informasi pasar kerja sebanyak 102 orang.

## Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 9.7.

### Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi				219.658.502	212.858.052	96,91
a . Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	1 kelompok	1 kelompok	100			
b . Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS	102 orang	102 orang	100			

- a. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran. Merujuk pada implementasi sasaran kinerja Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi pada tahun 2022, maka dalam konteks efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori 'baik'. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 3,10%.
- b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia. Kualifikasi Jabatan struktural dan Jabatan fungsional yang membidangi pada sasaran tersebut dengan hasil tingkat capaian lebih dari 90% berarti dilaksanakan secara efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada hanya sebanyak 6 orang yang berasal dari bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

## Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

**Tabel 9.8.**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun  
Kegagalan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang	
Tersedianya tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing tinggi	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	100				Menunjang	
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi pencari kerja	95,79	Menunjang	
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	10 orang	Menunjang	
	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS	100					Menunjang
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Terdatanya tenaga kerja asing yang memiliki VITAS dan ITAS	97,23	Menunjang	
			Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga kerja yang berpartisipasi dalam kegiatan informasi pasar kerja TKA	102 orang	Menunjang	

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 9.9.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah  
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen  
Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,25	2,96	76,01	BPS KAB. GUNUNG MAS

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 9: MENINGKATNYA PENYERAPAN TENAGA KERJA** yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tinggi dengan capaian 76,01% (Tingkat pengangguran Terbuka diukur dengan capaian terbalik yaitu, semakin rendah maka dinilai semakin baik). Berdasarkan data BPS tahun 2023 pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gunung Mas sebesar 2,96% atau turun sebesar 0,15% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 3,11%.

<b>SASARAN STRATEGIS 10</b>		
<b>MENINGKATNYA MASYARAKAT</b>	<b>PEMERATAAN</b>	<b>PENDAPATAN</b>

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat diukur melalui indikator Indeks Indeks Gini dan Pendapatan Perkapita sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 10.1.**  
**Sasaran Strategis 10: Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
10	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN
		Pendapatan Perkapita	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dalam sasaran strategis 1 ini, yaitu: (1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (2) Program Administrasi Pemerintahan Desa.

**1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

Hasil pengukuran kinerja Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik diukur melalui 1 (satu) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 10.2.  
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Tersusunnya Perencanaan dan Terkoordinasinya Program Pembinaan dan Pengembangan UKM	500 Pelaku UMKM	155 Pelaku UMKM	31,00
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>31</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Rendah dengan capaian 31%.**

Indikator Tersusunnya Perencanaan dan Terkoordinasinya Program Pembinaan dan Pengembangan UKM termasuk dalam sasaran Strategis 4 pada capaian kinerja tahun 2022 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DTTKKUKM) Kabupaten Gunung Mas seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 10.3.  
Capaian Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
4	Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah	5 Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	500 pelaku UMKM	155 pelaku UMKM	31	Kurang Baik

**Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

**Tabel 10.4.  
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019-2022**

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kondisi Awal		Tahun 2021		Tahun 2022	
		2019	2020	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	500 pelaku UMKM	500 pelaku UMKM	155 pelaku UMKM

Realisasi tahun 2022 dengan indikator kinerja Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangannya UKM yaitu sebanyak 155 pelaku UMKM. Penilaian berdasarkan ini dari pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Realisasi dengan kondisi awal 2019 dan tahun 2020 juga sebanyak 1 kegiatan. Dari segi perbandingan realisasi sejak tahun 2021 sebanyak 500 pelaku UMKM dan tahun 2022 hanya mampu terealisasi sebesar 155 pelaku UMKM saja. Perubahan ini didasari oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Jadi ada perbedaan target dan realisasi tahun 2019 dan 2020 dengan tahun 2021 dan 2022.

**Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**Tabel 10.5.  
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dengan Target Akhir 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target Akhir 2024	Capaian (%)
Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	155 pelaku UMKM	1 kegiatan	100

Dapat dilihat pada tabel diatas, dimana realisasi Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM sebanyak 155 pelaku UMKM dan target di tahun 2024 sebanyak 1 kelompok atau 500 pelaku UMKM yang diselesaikan. Jadi capaian kinerja berdasarkan target akhir 2024 akan sebesar 31% saja.

**Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

**Tabel 10.6.  
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	500 pelaku UMKM	155 pelaku UMKM	31	Adanya <i>refocusing</i> anggaran selama pandemic covid-19	

Dari sasaran Meningkatkan produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah diatas, dimana hasil evaluasi dan analisis menurut sasaran strategis terhadap tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM teralisasi sebanyak 155 pelaku UMKM di tahun 2022 disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran selama pandemic covid-19 dan pembatasan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, pertemuan dan sifatnya mengadakan rapat.

## Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 10.7.

### Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah				134.531.904	132.379.318	98,40
- Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	500 pelaku UMKM	155 pelaku UMKM	31			

- a. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran. Berdasarkan sasaran kinerja Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah pada tahun 2022, efisiensi penggunaan sumber anggaran berada pada kategori “baik”. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya efisiensi anggaran sebesar 1,6%.
- b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia. Kualifikasi Jabatan struktural dan Jabatan fungsional yang membidangi pada sasaran Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dengan hasil tingkat tidak mencapai 80% berarti dilaksanakan secara kurang efektif akan tetapi menurut beban kerja yang menunjang kinerja sasaran ini masih kurang dari jumlah pegawai yang ada hanya sebanyak 8 orang pada bidang Kelembagaan, Pemberdayaan, Pengawasan Koperasi dan UKM yang hanya terdiri 6 orang PNS dan 2 orang tenaga kontrak/PTT.

## Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

**Tabel 10.8.**  
**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak menunjang
Meningkatnya produktivitas daya saing usaha mikro, kecil dan menengah	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	31				Tidak Menunjang
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Tersusunnya perencanaan dan terkoordinasinya program pembinaan dan pengembangan UKM	98,40	Menunjang
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang terdata	155 pelaku UMKM	Menunjang

## 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Hasil pengukuran kinerja Program Administrasi Pemerintahan Desa diukur melalui 5 (lima) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 10.9.**  
**Target dan Realisasi Program Program Administrasi Pemerintahan Desa**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang diperbaharui profil desanya	114 desa/kel	114 desa/kel	100,00
	Jumlah musyawarah pembangunan desa/kelurahan yang dapat difasilitasi	72 desa/kel	72 desa/kel	100,00
	Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat	1 kali	0 kali	0,00
	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang terlatih	373 jiwa	178 jiwa	47,72
	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan akses TTTG	6 desa/kel	5 desa/kel	83,33
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>66,21</b>

Realisasi dan capaian kinerja dimana indikator kinerja sasaran jumlah desa yang diperbaharui profil desanya dan jumlah musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi mencapai 100% dimana target dalam indikator tersebut tercapai. Indikator terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat dengan realisasi 0% karena tidak adanya anggaran, petunjuk teknis dari DPMD Provinsi dan tidak terinput dalam Renja dan indikator jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang terlatih hanya mencapai target dengan realisasi 47,72% diakibatkan kurangnya anggaran, dalam indikator jumlah desa/kelurahan yang mendapat akses TTG penilaian realisasi tinggi mencapai 83,33%.

**Tabel 10.10.**  
**Target dan Realisasi dari Sasaran Strategis Meningkatnya**  
**Pelayanan Publik Diseluruh Jenjang Pelayanan Pemerintahan**  
**Termasuk Pemerintahan Desa/Kelurahan**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
1	Jumlah Desa yang diperbaharui Profil Desanya	114 Desa/Kel	114 Desa/Kel	114 Desa/Kel	114 Desa/Kel	114 Desa/Ke	100
2	Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi	72 Desa/Kel	72 Desa/Kel	12 Desa/Kel	72 Desa/Kel	72 Desa/Kel	100
3	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kali	1 Kali	0 Kali	1 Kali	0 Kali	0
4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlatih	373 Jiwa	373 Jiwa	0 Jiwa	373 Jiwa	178 Jiwa	47,72
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat Akses TTG	4 Desa/Kel	5 Desa/Kel	0 Desa/Kel	6 Desa/Kel	5 Desa/Kel	83,33
Rata-Rata Capaian							66,21

**a. Jumlah Desa yang Diperbaharui Profil Desanya**

Berdasarkan data capaian kinerja, realisasi jumlah desa yang diperbaharui profil desanya sebanyak 114 (seratus empat belas) desa atau 100 % dari targetnya sebanyak 114 (seratus empat belas) desa. Ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Yang menjadi penyebab keberhasilan capaian kinerja tersebut karena selalu ada perubahan data desa setiap tahunnya dan profil desa diperlukan untuk mengetahui tingkat potensi dan perkembangan desa dan untuk menentukan klasifikasi desa sebagai penetapan SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) Pemerintah Desa sehingga profil harus diperbaharui setiap tahunnya oleh operator desa.

**Gambar 1**  
**Desa yang Diperbaharui Profil Desanya**



**b. Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan yang Dapat Difasilitasi**

Berdasarkan data capaian kinerja, jumlah musrenbang desa yang dapat difasilitasi adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) desa atau 100 % dari targetnya sebanyak 72 (tujuh puluh dua) desa. Ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Penyebab rendahnya capaian kinerja tersebut karena kurangnya dana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memfasilitasi kegiatan musrenbang desa.

**Gambar 2**  
**Musyawarah Pembangunan Desa Penda Rangas Kecamatan**  
**Kahayan Hulu Utara**



**c. Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat**

Berdasarkan data capaian kinerja, terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat adalah sebanyak 0 (nol) kali atau 0 % dari targetnya sebanyak 1 (satu) kali. Ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat rendah. Faktor yang menjadi penyebab rendahnya pencapaian indikator ini adalah adanya refocusing anggaran pada DPA pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas di dalam melaksanakan kegiatan bulan bakti gotong royong.

**d. Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlatih**

Berdasarkan data capaian kinerja, jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang terlatih adalah sebanyak 178 (orang) orang atau 47,72 % dari targetnya sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) orang. Ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori sangat rendah. Rendahnya capaian kinerja tersebut karena tidak adanya anggaran pada DPA SKPD untuk melaksanakan kegiatan

Pelatihan Kader Pemberdayaan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan.

**Gambar 3**  
**Advokasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten Gunung Mas**



**e. Jumlah Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Akses TTG**

Berdasarkan data capaian kinerja, jumlah desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG adalah sebanyak 5 (lima) desa atau 83,33 % dari targetnya sebanyak 6 (enam) desa. Ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam kategori rendah. Faktor penyebab tidak berhasilnya pencapaian indikator kinerja ini adalah tidak adanya anggaran pada DPA SKPD tahun anggaran 2022 untuk bantuan alat teknologi tepat guna yang akan disosialisasikan kepada masyarakat dan tidak adanya bantuan dari Kementerian Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal untuk tahun 2022.

Berdasarkan data Tabel di atas diketahui bahwa **Program Administrasi Pemerintahan Desa termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sedang dengan rata-rata capaian 66,21%.**

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 10.11.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
10	Indek Gini	-	0,257	<b>0,262</b>	<b>98,09</b>	BPS KAB. GUNUNG MAS
	Pendapatan Per Kapita	Ribu/Kapita/Tahun	13.492	<b>10.990</b>	<b>81,46</b>	BPS KAB. GUNUNG MAS

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 10: MENINGKATNYA PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT** yang diukur dengan indikator Indek Gini dan dan Pendapatan Perkapita termasuk dalam: (1) Indek Gini persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 98,09%; dan (2) Pendapatan Perkapita persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tinggi dengan capaian 81,46%.

**SASARAN STRATEGIS 11****MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur melalui indikator Nilai SAKIP dan Opini BPK sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 11.1.**  
**Sasaran Strategis 11: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
11	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Opini BPK	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT KABUPATEN

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 6 (enam) program dalam sasaran strategis 11 ini, yaitu: (1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; (2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; (3) Program Kepegawaian Daerah; (4) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; (5) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan (6) Program Penyelenggaraan Pengawasan.

**1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Hasil pengukuran kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat diukur melalui 15 (Lima belas) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 11.2.**  
**Target dan Realisasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terlaksananya Laporan Rencana Aksi HAM, Laporan Kriteria Kabupaten Peduli HAM serta Bantuan Hukum (Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas)	2 Laporan (1 kegiatan)	3 Laporan (1 kegiatan)	100,00
	Tersedianya Dokumen Informasi Hukum Mengenai Produk Hukum, Terpenuhinya Informasi Mengenai Produk Hukum Daerah	40 Produk Hukum Daerah	63 Produk Hukum Daerah	157,50
	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	40 Produk Hukum Daerah	40 Produk Hukum Daerah	100,00
	Terlaksananya fasilitas bantuan hibah untuk rumah ibadah/Lembaga keagamaan	50 sasaran (bantuan hibah untuk rumah ibadah/Lembaga keagamaan)	60 sasaran	120,00
	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan safari keagamaan pemerintah Kabupaten Gunung Mas	12 Kecamatan (safari Natal)	12 Kecamatan	100,00
	Terlaksananya fasilitas pembinaan pemberangkatan dan pemulangan Haji Kabupaten Gunung Mas	2 Calon jemaat Haji	2 Calon jemaat Haji	100,00
	Terlaksananya kegiatan verifikasi, evaluasi dan monitoring hibah Lembaga keagamaan, rumah ibadah dan kegiatan keagamaan	50 rumah ibadah / Lembaga keagamaan	50 rumah ibadah / ompute keagamaan	100,00
	Terlaksananya fasilitas kegiatan pembinaan umat beragama	3 kegiatan (Festival Lasqi Tk. Provinsi Kalteng, Pesparawi Tk. Nasional, Penyerahan hewan qurban)	3 kegiatan (Festival Lasqi Tk. Provinsi Kalteng, Pesparawi Tk. Nasional, Penyerahan hewan qurban)	100,00
	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan usaha sekolah sehat dan peningkatan kesegaran jasmani	12 sasaran yaitu 12 Sekolah Dasar / Madrasah (SD/M) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP)	22 sasaran yaitu 11 Sekolah Dasar dan 11 Sekolah Menengah Pertama	180,00
	Terlaksananya bantuan hibah kepada Yayasan Pendidikan	1 sasaran YPK-GKE	1 sasaran YPK-GKE	100,00
	Terlaksananya bantuan sosial beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu	155 sasaran yaitu 75 orang berprestasi dan 80 orang mahasiswa dari keluarga tidak mampu	129 sasaran yaitu 87 orang mahasiswa berprestasi dan 42 orang mahasiswa dari keluarga tidak mampu	83,23

	Terlaksananya kegiatan komisariat wilayah forum sekretariat daerah seluruh Indonesia	1 laporan	1 laporan	100,00
	Anggota asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00
	Laporan capaian standar pelayanan minimal	93%	93%	100,00
	Tersedianya LPPD, EKPPD, LKPJ	70 buku	70 buku	100,00
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>109,38</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 109%.**

Dari data di atas terdapat beberapa data yang menyatakan realisasi yang dicapai kurang dari target dan terdapat pula data yang melebihi target seperti:

1. Pada Bagian Hukum target yang di terapkan semua dapat terealisasi dengan baik tanpa ada kendala yang berarti.
2. Pada Bagian Kesra terdapat kegiatan yang melebihi target, hal ini disebabkan karna adanya penambahan dana/anggaran serta penerima dana bertambah. Adapun kegiatan yang tidak memeuhi target karna pengaruh/dampak dari Covid-19.
3. Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdapat satu kegiatan yang melebihi daripada terget, hal ini disebabkan adanya perubahan anggaran yang mengakibatkan penambahan paket pekerjaan.
4. Pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan kegiatan semua terealisasi dengan baik dan tercapai sesuai dengan target.
5. Pada Bagian Organisasi kegiatan yang ada tercapai dengan baik, terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai target dikarenakan belum terselesaikan dengan baik karna kekurangan waktu dalam penyusunan, serta pendatannya.
6. Pada Bagian Umum ada beberapa kegiatan yang belum terealisasi dengan baik, seperti halnya service kendaraan yang kurang terealisasi karna penyerapan yang kurang maksimal.

7. Pada Bagian Pemerintahan semua target kegiatan terealisasi dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang berarti.

Adapun penyebab keberhasilan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Tepat sasaran, yaitu meningkatnya kualitas daya saing investasi daerah dalam tingkat pertumbuhan nilai investasi.
2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah daerah Tepat sasaran, yaitu meningkatnya tata kelola pemerintah yang profesional, bersih dan akuntabel, meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tepat sasaran, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik yang dinilai dalam indeks kepuasan masyarakat.

## **2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai Program utama dalam mengukur Keberhasilan Pencapaian indikator kinerja sasaran utama yaitu Meningkatnya Pengendalian Kinerja dan Keuangan Daerah dengan formulasi indikator yaitu:

$$\frac{\textit{Realisasi Kinerja Keuangan}}{\textit{Target Kinerja Keuangan}} \times 100$$

Berdasarkan formulasi indikator tersebut Realisasi Kinerja Keuangan yang dipersentasikan dengan nilai total APBD Kabupaten Gunung Mas yang dapat di realisasikan senilai Rp. 1.032.709.638.751,79 dibagi Target Kinerja Keuangan yang dipersentasikan target realisasi pagu APBD Kabupaten Gunung Mas senilai Rp. 1.115.303.302.893,00 dikali 100% diperoleh persentase sebesar 92,59%.

Hasil pengukuran kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diukur sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 11.3.**  
**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan, Perencanaan, dan Pendanaan			99	
	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	10 Kali	9 Kali	90
	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			80	
	1	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	5 kegiatan	4 kegiatan	80
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			71	
	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4 kali	3 kali	75
	2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	3 dokumen	2 dokumen	67
	<b>Rata-rata capaian</b>				<b>83</b>

Berdasarkan Tabel 11.3. di atas diketahui bahwa **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tinggi dengan rata-rata capaian 83%.**

**Tabel 11.4.**  
**Capaian Kinerja 3 Tahun Terakhir**

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah, RKPD, dan Rencana Tata Ruang Daerah) yang berkualitas, terpadu dan tepat waktu						
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	1	1	-	-	-	-
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)	0	0	-	-	-	-
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)	100	100	-	-	-	-
2	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah						
	Persentase kesesuaian Antara Muatan Renstra SKPD dengan RPJMD	100%	100%	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen
	Persentase kesesuaian Antara Muatan RKPD dengan RPJMD	100	95	-	-	-	-
	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan turunannya	100	100	-	-	-	-
	RPJMD, RKPD dan Rencana Tata Ruang Daerah Tepat Waktu	-	-	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen
	Persentase Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD	-	-	75%	100%	80%	207 Program
	Persentase Sasaran RPJMD yang diakomodir dalam RKPD	-	-	85%	100%	90%	16 Sasaran
	Presentase Program RPJMD yang di akomodir dalam RKPD	-	-	75%	88,29%	80%	207 Program
3	Tertindakannya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan baik yang dibiayai dari APBN dan APBD (Provinsi dan kabupaten)						
	Terselenggaranya pelaksanaan Analisis dan Capaian Target Kinerja Program dan kegiatan	4	2	-	-	-	-
	Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan penyerapan anggaran	12	12	-	-	-	-
4	Tersedianya SDM yang profesional yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam memberikan daya dukung peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah						
	Tertindakannya kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penelitian	4	100	-	-	-	-
5	Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Kinerja dan Keuangan Daerah						
	Persentase Perangkat daerah yang mencapai target kinerja keuangan	-	-	100%	93,07%	80%	92,59%.
6	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan						
	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyusunan Kebijakan Daerah	-	-	50 %	100%	75%	3 Kajian
7	Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah						
	Persentase Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	-	-	20%	38,23%	30%	8 Inovasi

**Tabel 11.5.**  
**Target dan Capaian Jangka Menengah Bappedalitbang dalam Renstra**

No	Sasaran Strategis	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Capaian								
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	75%	97%	80%	100%	90%	-	100%	-
2	Meningkatnya Pengendalian Perencanaan Kinerja dan Keuangan Daerah	-	-	75%	93,07%	80%	92,59%	90%	-	100%	-
3	Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan	-	-	50%	100%	75%	100%	90%	-	100%	-
4	Meningkatnya Inovasi Perangkat Daerah	-	-	20%	38,23%	30%	20,51%	40%	-	50%	-

Berdasarkan Tabel diatas dapat dianalisis bahwa capaian target kinerja Bappedalitbang dalam peningkatan perencanaan, peningkatan pengendalian keuangan daerah, peningkatan kualitas hasil penelitian dan peningkatan inovasi daerah tiap tahun meningkat dan dapat dicapai sesuai dengan harapan, namun masih ada 2 (dua) tahun lagi untuk mencapai target kinerja dalam renstra yaitu Tahun 2023 s/d 2024.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Sasaran Kinerja Bappedalitbang**

Keberhasilan:

- (1) Aktif dalam berbagai kegiatan dan informasi kebijakan terkait pelaksanaan tupoksi dan sasaran organisasi.
- (2) Ketepatan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan agar sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Kegagalan:

- (1) Salah satu faktor penyebab kegagalan atau penurunan terhadap kinerja adalah adanya perubahan kebijakan baik dari tingkat pusat maupun daerah;
- (2) Perubahan struktur organisasi dan status pegawai yang sebelumnya melekat pada jabatan struktural beralih ke fungsional sehingga membutuhkan waktu penyesuaian dalam pelaksanaan tupoksi.
- (3) Kurangnya Kualitas dan kuantitas SDM yang mengerti dan memahami perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan

### **Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya**

- (1) Banyaknya aplikasi yang digunakan perangkat daerah mengharuskan ASN sebagai pemegang akun, sehingga 1 orang memegang lebih dari 1 aplikasi yang berakibat kurang efektifnya penerapan dalam penggunaan aplikasi.

- (2) Tidak semua ASN dan Tenaga Kontrak Bappedalitbang mampu menggunakan fasilitas IT.
- (3) Kurangnya fasilitas Kendaraan operasional Roda 4 untuk mobilitas ke desa-desa.

**Tabel 11.6.**  
**Realisasi Anggaran**

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI	SISA ANGGARAN
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	931.069.429,-	884.852.968,-	46.216.461,-

### 3. Program Kepegawaian Daerah

Hasil pengukuran kinerja Program Kepegawaian Daerah diukur melalui indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 11.7.**  
**Target dan Realisasi Program Kepegawaian Daerah**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah Penyelesaian Administrasi Kepegawaian				
	Usul kenaikan pangkat yang terselesaikan tepat waktu	600	600	100	
	Usul pensiun yang terselesaikan tepat waktu	100	99	99	
	Usul Karsis/Karsu yang terselesaikan tepat waktu	200	279	140	
	Usul Karpeg dan taspen yang terselesaikan tepat waktu	150	173	115	
	Data dan Informasi Kepegawaian yang Akurat				
	Jumlah Pegawai yang datanya telah di lakukan pemutahiran	400	400	100	
	Jumlah dokumen DUK	20	20	100	
	Terintegrasinya Layanan Kepegawaian dengan SIMPEG (Jumlah Pengembangan Aplikasi Kepegawaian Berbasis Online)	1	1	100	
	Persentase Jumlah SDM Yang Lulus Sertifikat Kompetensi				
	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat PIM	7	2	29	
	Jumlah pegawai yang mengikuti Tugas Belajar	9	9	100	
	Jumlah PNS yang mengikuti izin belajar	45	45	100	
	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II	44	44	100	
	Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Penyesuaian Ijazah	22	22	100	
	Jumlah CPNS yang lulus Prajabatan	183	183	100	
	Jumlah PNS BKPSDM yang mengikuti BIMTEK	2	2	100	
	Jumlah Pejabat yang mengikuti Assesment	12	12	100	
	<b>Rata-rata capaian</b>				<b>99</b>

Berdasarkan data Tabel 11.7. di atas diketahui bahwa **Program Kepegawaian Daerah termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 99%.**

#### 4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Hasil pengukuran kinerja Program Pengelolaan Barang Milik Daerah diukur melalui 10 (sepuluh) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 11.8.**  
**Target dan Realisasi Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyusunan Standar Harga	Persen	1 Kegiatan	83,53
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persen	1 Kegiatan	77,26
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	1 Kegiatan	36,34
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persen	1 Kegiatan	69,73
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persen	1 Kegiatan	74,87
	Penilaian Barang Milik Daerah	Persen	1 Kegiatan	34,80
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	1 Kegiatan	99,36
	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah	Persen	1 Kegiatan	93,08
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persen	1 Kegiatan	86,57
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persen	1 Kegiatan	97,00
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>75,25</b>

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sedang dengan rata-rata capaian 75,25%.**

## 5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Hasil pengukuran kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah diukur melalui 4 (empat) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 11.9.**  
**Target dan Realisasi Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp48.100.000.000,00	Rp30.959.702.645,00	64,37
	Jumlah penerimaan retribusi daerah	Rp4.394.080.000,00	Rp4.510.815.060,00	102,66
	Jumlah penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp12.707.801.108,00	Rp12.683.801.108,00	99,81
	Jumlah penerimaan lain-lain pendapatan yang sah	Rp17.507.000.000,00	Rp30.061.435.888,86	171,71
<b>Jumlah</b>		<b>Rp82.708.881.108,00</b>	<b>Rp78.215.754.701,86</b>	<b>94,57</b>
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>110</b>

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 94,57%.**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2021 - 2022 dan target Renstra tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 11.10.**  
**Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Kinerja		Kenaikan (Penurunan) %
				2021	2022	
1.	Meningkatnya Kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan dari pusat dalam membiayai pembangunan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Non Migas	Rasio PAD	8,09	7,01	-1,08
			1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	46.899.170.549,00	30.959.702.645,00	-15.939.467.904,00
			2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	4.474.206.890,00	4.510.815.060,00	36.608.170,00
			3. Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.722.707.060,00	12.683.801.108,00	1.961.094.048,00
			4. Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah	25.120.686.758,84	30.061.435.888,86	4.940.749.130,02
			1. Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	100,00	100,00	0,00
			2. Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00	100,00	0,00
			3. Persentase Capaian Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	100,00	100,00

Berdasarkan tabel tersebut, penurunan realisasi kinerja hanya terjadi pada indikator rasio PAD yaitu sebesar -1,08% dan pada indikator penerimaan pajak daerah sebesar Rp.15.939.467.904,- yang dipengaruhi oleh penurunan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah namun untuk indikator-indikator lainnya meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 11.11.**  
**Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022**  
**Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja		Kenaikan (Penurunan) %
				2021	2022	
1	2	3	4	7	8	9
1.	Meningkatnya Kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan dari pusat dalam membiayai pembangunan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Non Migas	Rasio PAD	107,44	87,95	-19,49
			1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	99,37	64,37	-35,00
			2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	110,75	102,66	-8,09
			3. Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	114,89	99,81	-15,08
			4. Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah	140,21	171,71	31,50
			1. Persentase Capaian Target Pendapatan Asli Daerah	100,00	100,00	0,00
			2. Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00	100,00	0,00
			3. Persentase Capaian Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	100,00	100,00

Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas secara umum terdapat capaian indikator yang mengalami perlambatan, semua indikator dari Tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami penurunan bahkan ada 4 (empat) indikator yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu : (1) Rasio PAD mengalami penurunan sebesar -19,49% dari capaian tahun 2021; (2) Jumlah Penerimaan Pajak Daerah mengalami penurunan

sebesar -35% dari tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh turunnya penerimaan pajak sector BPHTB; (3) Jumlah penerimaan retribusi daerah menurun -8,09% dari target tahun sebelumnya; dan (4) Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan juga mengalami penurunan yang lumanya besar, yaitu -15,08% dari tahun sebelumnya, akan tetapi indikator tersebut hampir mencapai 100% yakni 99,81%, sedangkan untuk indikator penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan yakni sebanyak 102,66%. Demikian juga untuk penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga mengalami peningkatan yakni sebesar 171,71%.

**Tabel 11.12.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2019 – 2024**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi sampai dengan Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian sampai dengan Tahun 2022 terhadap target Akhir Renstra (%)
					Target	Realisasi	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya Kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan dari pusat dalam membiayai pembangunan daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Daerah	1. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	78.202.673.252	48.100.000.000	30.956.702.645	64,36	207.605.900.000	52,58
			2. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	8.366.030.835,50	4.394.080.000	4.510.815.060	102,66	25.572.750.000	50,35
			3. Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18.460.923.040	12.707.801.108	12.683.801.108	99,81	47.907.000.000	65,01
			4. Jumlah Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah	48.437.276.668	17.507.000.000	30.061.435.888	171,71	112.035.160.000	70,07

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas masih termasuk ke dalam kategori belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, karena berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa seluruh target kinerja yang sudah memasuki tahun ke-3 dari periode perencanaan 2019-2024 namun realisasinya masih dibawah 75%, hal ini akan menjadi pekerjaan rumah yang berat untuk Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk memperbaiki kinerja guna mencapai target tersebut.

Adapun analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan/ peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada masing-masing Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dapat diuraikan sebagai berikut:

**Keberhasilan** Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam pencapaian kinerja Tahun 2022 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas. Tujuan Badan pendapatan adalah meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan dari pusat dalam membiayai pembangunan daerah dengan sasaran meningkatnya Pendaptan Asli Daerah sebagai kontribusi terhadap Pendapatan Daerah dan Indikator Kinerja tujuan adalah persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama. Semua Indikator Badan Pendapatan Daerah mendukung Misi keempat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Gunung Mas Periode 2019-2024. Realisasi Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 sudah tercapai 100% bahkan melampaui dari target yang telah ditentukan. Sebagaimana telah kami sajikan pada tabel di atas bahwa Indikator Jumlah Penerimaan Pajak Daerah telah mencapai 64,37%, Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 102,66%, Jumlah Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 99,81%, dan Jumlah Penerimaan Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 171,71%. Adapun penyebab keberhasilannya adalah dikarenakan Badan Pendapatan Daerah terus berupaya dalam melakukan inovasi-inovasi dalam hal peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan terus mengembangkan sistem informasi manajemen Pajak seperti SIMDA Pendapatan, SIM-PBB-P2, SIM-BPHTB, E-SPPT, Penilaian Individual dan pemasangan alat

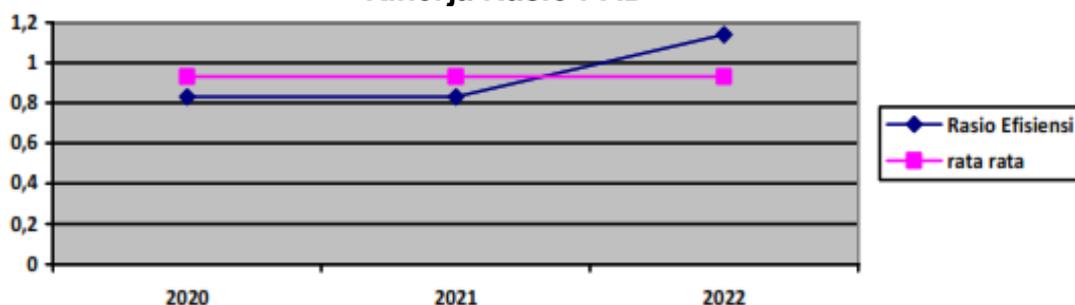
perekam pajak (I-Tax) serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan-pelatihan dalam hal penerapan sistem informasi tersebut sehingga sistem informasi dapat terakses dengan mudah, cepat dan tepat. Selain itu Badan Pendapatan Daerah juga melakukan koordinasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Gunung Mas guna mempercepat pembayaran Pajak PBB-P2 dan BPHTB. Keberhasilan 4 (empat) indikator juga berkat kontribusi/dukungan dan kerja sama berbagai pihak di lingkungan Badan Pendapatan Daerah sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas berhasil memaksimalkan seluruh komponen internal untuk mensukseskan capaian kinerja.

**Kegagalan** kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas ditunjukkan dengan tidak tercapainya 2 (dua) indikator kinerja yakni: (1) Jumlah Penerimaan Pajak Daerah; dan (2) Jumlah penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mana penerimaan pajak daerah hanya mencapai 64,37 saja. Capaian tersebut menurun drastis dibandingkan capaian tahun 2021 yakni 99,37. Hal tersebut disebabkan ada 11 (sebelas) jenis pajak daerah yang tidak mencapai target diantaranya : (1) Pajak Hotel, (2) pajak losmen, (3) pajak kafetaria dan sejenisnya, (4) pajak pameran, (5) pajak Diskotik, Karaoke, klub malam dan sejenisnya, (6) pajak sirkus akrobat sulap, (7) pajak reklame, papan/billboard/videotron/megatron, (8) pajak penerangan jalan sumber lain (9) pajak sarang burung walet, (10) pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan, (11) BPHTB-pemberian hak baru. Sedangkan untuk penerimaan pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mengalami penurunan sangat kecil yakni 99,81% saja.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Untuk indikator kinerja tujuan yaitu Rasio PAD tingkat realisasinya adalah sebesar 7,01%. Dengan capaian kinerja sebesar

87,95% maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah  $(100,00 : 87,95) = 1 : 1,14$  dalam artian bahwa penggunaan 1 unit PAD menghasilkan 1,14 unit kinerja. Rasio efisiensi ini merupakan rasio tertinggi untuk periode Perencanaan 2019 – 2024 yang rata-rata capaiannya sebesar  $1 : 0,93$ . Capaian terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar  $1 : 0,83$ .

**Gambar 11.1.**  
**Rasio Efisiensi Penerimaan PAD Tahun 2019 – 2024 Indikator Kinerja Rasio PAD**



Dari gambar di atas terlihat trend meningkat rasio efisiensi ini. Dari sudut pandang lain dapat juga dikatakan bahwa semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan semakin baiknya perencanaan PAD yang dilakukan. Dari sudut pandang ini maka perencanaan PAD pada tahun 2020 dan 2021 merupakan perencanaan PAD terbaik selama periode renstra 2019 – 2022. Rasio efisiensi pada tahun 2020 dan 2021 ini lebih rendah daripada rasio tahun 2022 dan rata-rata periode 2019 – 2024. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar  $1 : 1,14$  dan capaian terendah pada tahun 2020 dan 2021 sebesar  $1 : 0,83$ . Efisiensi PAD terjadi pada tiga komponen belanja utama sebagai sebagaimana tabel 3.10 berikut:

**Tabel 11.13.**  
**Efisiensi Penerimaan PAD Tahun 2019 – 2024 Indikator Kinerja Rasio PAD**

Komponen	Target (dalam milyar)			Realisasi (dalam milyar)			Efisiensi (dalam milyar)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Rasio PAD	60	78	82	66	87	78	6	8	-4

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata efisiensi tahun 2022 lebih kecil dari tahun 2021 dan rata-rata efisiensi tahun 2019 – 2024.

Efisiensi terbesar tahun 2021 terjadi pada Rasio PAD dan lebih besar dari rata-rata efisiensi tahun 2019 – 2024 (renstra periode 2019 – 2024).

Adapun upaya tindak lanjut untuk menunjang keberhasilan maupun kegagalan yang ada pada capaian kinerja Badan pendapatan Daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan penghitungan Potensi seakurat mungkin agar target penerimaan bisa mendekati potensinya;
2. Melakukan Penagihan lebih optimal guna tercapainya target yang ditentukan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;
3. Melakukan rekonsiliasi dengan OPD-OPD terkait untuk mengevaluasi hasil penerimaan Retribusi Daerah;
4. Melakukan sosialisasi pajak Hotel.Losmen;
5. Melakukan pemasangan alat perekam pajak (I\_Tax);
6. Melakukan Penertiban izin usaha dan melakukan sosialisasi tentang pajak reklame;
7. Melakukan pendataan tambang lokal untuk memperoleh izin usaha;
8. Menyusun Perda tentang terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ;
9. Melakukan penerapan prokes dan meningkatkan pelayanan demi keamanan dan keselamatan pengunjung ditempat rekreasi, hotel, losmen dan tempat hiburan;
10. Menyiapkan sarana dan prasarana utuk mempermudah pelayanan pajak kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya;
11. Melakukan sosialisasi PBB-P2 di tiap Kecamatan;
12. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
13. Mengembangkan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
14. Meningkatkan pola koordinasi internal dan pola koordinasi eksternal dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Daerah.

Berikut rincian keberhasilan ataupun kegagalan Program yang mendukung Badan Pendapatan Daerah guna tercapainya Pelayanan yang berkualitas dengan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan sebagai rencana aksi yang harus dilaksanakan dengan rincian dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel 11.14.**  
**Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022**

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Outcome)	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Buku	35 Buku	Tidak ada permasalahan	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Buku	10 Buku	Tidak ada permasalahan	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Buku	10 Buku	Tidak ada permasalahan	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10 Buku	10 Buku	Tidak ada permasalahan	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10 Buku	10 Buku	Tidak ada permasalahan	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	40 Buku	40 Buku	Tidak ada permasalahan	-	-
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	33 Orang	Adanya mutasi dan pegawai yang pensiun	Menunggu mutasi pengisian jabatan yang kosong	-
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	Tidak ada permasalahan	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Buku	10 Buku	Tidak ada permasalahan	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	10 Buku	10 Buku	Tidak ada permasalahan	-	-
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20 Buku	20 Buku	Tidak ada permasalahan	-	-
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67 Stel	67 Stel	Tidak ada permasalahan	-	-
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	4 Orang	Tidak ada permasalahan	-	-
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	8 Jenis	Tidak ada permasalahan	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	Tidak ada permasalahan	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	20 Jenis	Tidak ada permasalahan	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 Media Cetak	5 Media Cetak	Tidak ada permasalahan	-	-
Penyediaan Bahan/Material	64 Jenis	64 Jenis	Tidak ada permasalahan	-	-				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103 Kali	103 Kali	Tidak ada permasalahan	-	-				
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>							
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8 Unit	8 Unit	Tidak ada permasalahan	-	-				
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis	1 Unit	Tidak ada permasalahan	-	-				
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>							
Penyediaan Jasa Jurat Menyurat	1.650 Lembar	1.650 Lembar	Tidak ada permasalahan	-	-				
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Jenis	4 Jenis	Tidak ada permasalahan	-	-				
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>							
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	26 Unit	26 Unit	Tidak ada permasalahan	-	-				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120 Unit	120 Unit	Tidak ada permasalahan	-	-				
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Gedung	1 Gedung	Tidak ada permasalahan	-	-				

			<b>PROGRAM BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
			<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
			Inventaris Barang Milik Daerah	699 BMD	699 BMD	Tidak ada pemasalahan	-	-
			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
			<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>			
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	20 Buku	20 Buku	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	19 Jenis	19 Jenis	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	73.294 WP	73.294 WP	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	200 Orang	200 Orang	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	73.294 WP	73.294 WP	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29.000 WP	29.000 WP	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	73.294 WP	73.294 WP	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Penagihan Pajak Daerah	73.294 WP	73.294 WP	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Jenis	7 Jenis	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Aplikasi	3 Aplikasi	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	73.294 WP	73.294 WP	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	91.092 WR	91.092 WR	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	3.000 Kasus	3.000 Kasus	Tidak ada pemasalahan	-	-
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.000 WP	3.000 WP	Tidak ada pemasalahan	-	-

## 6. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan terdiri atas:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - b. Reviu Laporan Kinerja
  - c. Reviu Laporan Keuangan
  - d. Pengawasan Desa
  - e. Kerjasama Pengawasan Internal
  - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
  - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
  - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil pengukuran kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah diukur melalui 2 (dua) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 11.15.**  
**Target dan Realisasi Program Penyelenggaraan Pengawasan**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	122	122	100,00
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	25	25	100,00
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>100</b>

**Tabel 11.16.**

Target dan Realisasi Kinerja Inspektur Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pemeriksaan reguler	122 kegiatan	122 kegiatan
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan terhadap Pengaduan Masyarakat	25 pengaduan	25 pengaduan
3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Laporan Kebijakan Pengawasan	1 laporan	1 laporan
4	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1 kegiatan	1 kegiatan

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa **Program Penyelenggaraan Pengawasan termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 100%.**

### **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Sebelumnya**

Pengukuran tingkat Realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 di ilustrasikan dalam tabel berikut:

**Tabel 11.17.**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	%
Meningkatnya pelaksanaan penerapan RB di SOPD	Terkirimnya Laporan PMPRB tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh OPD	% OPD yang memiliki nilai Sakip B	40%	50%	120
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan aset SOPD	Opini BPK	WTP	WTP	100
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas	Level 2	Level2	100
Meningkatnya maturitas SPIP	Level Maturitas	Level 2	Level 3	120

### **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Dengan Rencana Strategis Jangka Menengah**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Terkirimnya Laporan PMPRB tepat waktu” yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam katagori capaian berhasil.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja**

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2022 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Inspektorat Kabupaten Gunung Mas telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini. Faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan ini adalah adanya kerjasama dengan pemerintah Provinsi dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kepada Pemerintah Desa dan Perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Adapun faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya personil Kendala yang dihadapi adalah masih minimnya pengetahuan dan kapasitas personal tenaga pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dan perlu adanya penambahan dari segi jumlah pengawas.

### **Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Analisis faktor yang mendukung yaitu bertambahnya personal aparatur pengawas fungsional (Auditor/P2UPD) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Sehingga dapat melakukan efisiensi waktu dan tenaga dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Adanya anggaran yang cukup untuk mengikuti dalam pelatihan-pelatihan / diklat rangka meningkatkan kapasitas personal dalam menghadapi melakukan pengawasan juga tidak kalah penting dalam membuat berhasil tugas dan fungsi personal sebagai APIP.

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun

2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 11.18.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
11	Nilai SAKIP	-	B	B	100	SETDA / BAGIAN ORGANISASI
	Opini BPK	-	WTP	WTP	-	BADAN KEUANGAN DAERAH

Sumber: Bappedalitbang Kab. Gunung Mas

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 11: MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH** yang diukur dengan Indikator Nilai SAKIP, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 100%, dan Untuk Indikator Opini BPK belum dapat dihitung persentase capaiannya dikarenakan data belum dipublish oleh BPK.

**SASARAN STRATEGIS 12****MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 12: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 12.1.**  
**Sasaran Strategis 12: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) program dalam sasaran strategis 12 ini, yaitu: (1) Program Pendaftaran Penduduk; dan (2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

### 1. Program Pendaftaran Penduduk

Hasil pengukuran kinerja Program Pendaftaran Penduduk diukur melalui indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 12.2.**  
**Target dan Realisasi Program Pendaftaran Penduduk**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,50	73,26	91,00
Rata-rata capaian				91

#### 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa **Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan adalah sebesar 73,26** sebagai realisasi dari target sebesar 80,50. **Capaian dalam persen adalah sebesar 91,00%**, dimana apabila dimasukkan dalam

Kriteria Penilaian termasuk kedalam kriteria Realisasi Kinerja Sangat Tinggi.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 12.3. Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	63,19	67,98	68,46	73,26

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya dari tahun 2019 – 2022. Hal ini menunjukkan perkembangan yang positif walaupun belum mencapai target sesuai RENSTRA namun menunjukkan pergerakan atau progres yang cukup baik dari tahun ketahun.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 12.4. Target Kinerja Tujuan/Sasaran Renstra 2019-2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran (Tingkat Kepuasan Pelayanan)					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Target	Target	Target	Target	Target	Target
Setiap penduduk Kabupaten Gunung Mas memiliki dokumen kependudukan	Peningkatan IKM	IKM atas pelayanan administrasi kependudukan	65,50	70,50	75,50	80,50	85,50	90,50

**Tabel 12.5. Capaian Kinerja 2019-2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	63,19	67,98	68,46	73,26

Berdasarkan kedua tabel diatas diperoleh perbandingan antara target jangka menengah dalam RENSTRA dan Realisasi dari tahun 2019-2022 yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2019 target IKM adalah sebesar 65,50 dengan realisasi 63,19 yang mana tingkat capaiannya dalam persen adalah  $\frac{63,19}{65,50} \times 100 = 96,49\%$ , dimana dalam Kriteria Penilaian termasuk kedalam kriteria Realisasi Kinerja Sangat Tinggi.
- b. Pada tahun 2020 target IKM adalah sebesar 70,50 dengan realisasi 67,98 yang mana tingkat capaiannya dalam persen adalah  $\frac{67,98}{70,50} \times 100 = 96,42\%$ , dimana dalam Kriteria Penilaian termasuk kedalam kriteria Realisasi Kinerja Sangat Tinggi.
- c. Pada tahun 2021 target IKM adalah sebesar 75,50 dengan realisasi 68,46 yang mana tingkat capaiannya dalam persen adalah  $\frac{68,46}{75,50} \times 100 = 90,67\%$ , dimana dalam Kriteria Penilaian termasuk kedalam kriteria Realisasi Kinerja Tinggi.
- d. Pada tahun 2022 target IKM adalah sebesar 80,50 dengan realisasi 73,26 yang mana tingkat capaiannya dalam persen adalah  $\frac{73,26}{80,50} \times 100 = 91,00\%$ , dimana apabila dimasukkan dalam Kriteria Penilaian termasuk kedalam kriteria Realisasi Kinerja Sangat Tinggi.

4) **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

**Tabel 12.6. Ukuran Kualitas Pelayanan**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval SKM</b>	<b>Nilai Interval Konversi SKM</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>Kinerja Unit Pelayanan</b>
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan table 3.6., standar daerah untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar 76,61 – 88,30 atau kategori B. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas memperoleh Skor IKM terkait Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan sebesar 73,26 atau kategori C, maka apabila dibandingkan antara standar daerah dengan capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, termasuk dalam kategori Kurang Baik. Namun, berkenaan dengan ini baik Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah terkait tetap berkomitmen untuk meningkatkan Skor IKM kedalam kategori B atau Baik, dimana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten selalu berkoordinasi dengan Ombudsman RI maupun Kementerian PANRB dalam hal melaksanakan persiapan dan evaluasi Pelayanan Publik di Kabupaten Gunung Mas pada umumnya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada khususnya.

5) **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk kinerja tahun 2022 memperoleh persentase capaian kinerja sebesar 91,00% dengan capaian kinerja Kategori

Cukup Tinggi, ditunjukkan dengan mendekati tercapainya target indikator yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas yang dilaksanakan pada tahun 2022, terdapat 4 faktor, yaitu :

1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
2. Meningkatnya Kualitas Dokumen Pencatatan Sipil;
3. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Profil Kependudukan.

**6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari persentase pencapaian indikator kinerja sebesar 91,00%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada penggunaan anggaran, Pelaksanaan 12 Kegiatan pada 5 program pada tahun 2022 telah menyerap anggaran sebanyak Rp. 6.378.792.387,- (92.90%) dari anggaran Belanja perangkat daerah sebesar Rp. 6.866.289.017,- sehingga mencapai tingkat efisiensi sebesar 7,10%.

**7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

Disdukcapil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2022 melaksanakan 5 program yaitu:

1. Program Pendaftaran Penduduk;
2. Program Pencatatan Sipil;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Disdukcapil Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2022 hampir berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2022 dari target pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Disdukcapil Kabupaten Gunung Mas realisasinya adalah sebesar 91,00%, dimana apabila dimasukkan dalam Kriteria Penilaian termasuk kedalam kriteria Realisasi Kinerja Sangat Tinggi.

## 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Hasil pengukuran kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika diukur melalui 2 (dua) indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 12.7.**  
**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Menara Telekomunikasi	58 unit	70 unit	121
	Jumlah PD yang Terkoneksi Jaringan Intranet dan Internet	9 lokasi/titik	10 lokasi/titik	100
Rata-rata capaian				110

**Tabel 12.8.**

**Pencapaian Target Sasaran Strategis**  
**Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Gunung Mas**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja 2022	Realisasi Pencapaian Kinerja 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengembangan e-Government menuju Konsep Gunung Mas Smart City (Smart Agro, Smart Human Resources, dan Smart Tourism)	Jumlah Menara Telekomunikasi	Program Aplikasi Informatika	58 (lima puluh delapan) unit	70 (tujuh puluh) unit
	Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan intranet dan internet		9 (sembilan) lokasi/titik	9 (sembilan) lokasi/titik

Berdasarkan Tabel di atas diketahui bahwa **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 110%**.

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika termasuk dalam sasaran Pengembangan *e-Government* menuju Konsep Gunung Mas *Smart City* (*Smart Agro*, *Smart Human Resources*, dan *Smart Tourism*) Secara umum dapat terlaksana dengan baik, dengan uraian sebagai berikut:

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan yaitu dalam realisasi program/kegiatan pelaksanaan dapat dilakukan;
2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu:
  - 1) Fokus pada peningkatan Infrastruktur telekomunikasi yang tersebar untuk giat merekomendasi pembangunan menara untuk tahun 2022 sudah disampaikan dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika, begitu pula untuk tahun 2023.
  - 2) Layanan akses internet bekerjasama dengan pT, Telkom yang menggunakan Fiber Optic (kabet serat fiber), jalur induk dan PT, ICON Plus, dan SKY Net sebagai provider layanan internet intern pemerintah daerah.

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 12.9.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	84,15 (Baik)	81,06 (Baik)	96,33	SETDA / BAGIAN ORGANISASI

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 12: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK** yang diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 96,33%.

**SASARAN STRATEGIS 13**  
**MENINGKATNYA RASA AMAN DI KALANGAN MASYARAKAT**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat diukur melalui indikator Penurunan Jumlah Tindak Pidana sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 13.1.**  
**Sasaran Strategis 13: Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
13	Meningkatnya Rasa Aman di Kalangan Masyarakat	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 13 ini, yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

## 1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Realisasi Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 13.2.**  
Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target  
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas  
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan nyaman serta bebas resiko kebakaran	Jumlah Pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	80 %
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada yang dilaporkan (%)		80 %	
Tingkat korban Jiwa yang selamat akibat Kebakaran		80%	
Meningkatnya Kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan publik dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	80%	
	Jumlah Unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	
	Cakupan unit kerja internal yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana	80%	

**Tabel 13.3.**  
Capaian Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022

No.	Nama Program	Rata-Rata Capaian Program (%)	Kategori Capaian
1.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90,44	Berhasil
2.	Program Penanggulangan Bencana	85,37	Cukup Berhasil
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	93,36	Berhasil

Keberhasilan tersebut diatas disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada dokumen perencanaan;
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan

pelaksanaan DPA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2022.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi:

1. Hambatan pada tahun 2022 yaitu masih menghadapi gelombang wabah Covid-19 yang berdampak pada pemangkasan anggaran di instansi pemerintahan, sehingga program dan kegiatan kurang maksimal dijalankan.
2. Permasalahan yang dihadapi yaitu berdampak pada capaian target dari indikator kinerja yang tidak tercapai.

Strategi pemecahan masalah:

1. Perlu perubahan target indikator kinerja atas program dan kegiatan;
2. Adanya evaluasi kegiatan sehingga dapat menyusun kegiatan yang lebih memberikan manfaat langsung.

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 13.4.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
13	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	-	70	97	72,16	BADAN KESBANGPOL

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

**Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk SASARAN STRATEGIS 13: MENINGKATNYA RASA AMAN DI KALANGAN MASYARAKAT diukur melalui indikator Penurunan Jumlah Tindak Pidana, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sedang dengan capaian 72,16%.**

**SASARAN STRATEGIS 14****MENINGKATNYA PENGELOLAAN BUDAYA DAERAH**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 14: Meningkatkan Pengelolaan Budaya Daerah diukur melalui indikator Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 14.1.****Sasaran Strategis 14: Meningkatkan Pengelolaan Budaya Daerah**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
14	Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Berdasarkan Tabel 14.1. di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 1 ini, yaitu Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

**1. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

Hasil pengukuran kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya diukur sebagai berikut:

**Tabel 14.2.****Target dan Realisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatkan Pelestarian Budaya Daerah			
	Terjaga dan Terpeliharanya Cagar Budaya	16 Objek	14 Objek	87,50
	Registrasi Nasional Diduga Cagar Budaya	5 Objek	-	0,00
	Tercatatnya Data Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Kabupaten Gunung Mas	1 dokumen	1 dokumen	100,00
	Terlaksananya Lomba Menulis Cerita Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb)	1 expl buku	1 expl buku	100,00
	Terlaksananya pelatihan bagi Pelaku Seni dan Pengelola Sanggar Se-Kabupaten Gunung Mas	50 orang	50 orang	100,00
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>78</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tinggi dengan rata-rata capaian 78%.**

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa dari 5 indikator hanya terlaksana 4 indikator, hal ini menyebabkan rata-rata capaian program hanya sebesar 78%.

Dalam analisis kinerja, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi hasil dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkannya. Ini bisa termasuk perencanaan strategis yang lebih baik, pengalokasian sumber daya yang lebih efisien, atau perbaikan dalam pelaksanaan proyek atau layanan. Secara keseluruhan, hasil yang baik dalam pencapaian kinerja harus dilihat sebagai kesempatan untuk terus meningkatkan kinerja dan mencapai target yang lebih tinggi di masa depan.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah metode yang berguna untuk mengevaluasi perkembangan dan tren kinerja suatu entitas (seperti perusahaan atau organisasi) dalam beberapa periode waktu yang berbeda. Ini membantu dalam pemahaman sejauh mana kinerja telah berkembang dari tahun ke tahun, dan apakah ada perubahan tren yang signifikan.

Perbandingan kinerja antara tahun ini, tahun lalu, dan beberapa tahun terakhir adalah alat penting dalam manajemen bisnis yang dapat membantu dalam perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tren dan perubahan kinerja, entitas atau organisasi dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi berikut disampaikan table perbandingan Target dan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas:

**Tabel 14.3.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun ke Tahun**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
1.	Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Terjaga dan Terpeliharanya Cagar Budaya	10	12	14
		Registrasi Nasional Diduga Cagar Budaya	0	0	0
		Tercatatnya Data Warisan Budaya Tak benda (WBTb) Kabupaten Gunung Mas	1	1	1
		Terlaksananya Lomba Menulis Cerita Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb)	1	1	1
		Terlaksananya pelatihan bagi Pelaku Seni dan Pengelola Sanggar se-Kabupaten Gunung Mas	25	30	50

Berdasarkan Target dan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas Perbandingan capaian tahun sebelumnya lebih rendah di bandingkan di tahun 2022 hal ini bisa dilihat adanya peningkatan capaian dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan melihat table 3 kita dapat mengevaluasi atau mengukur kinerja atau prestasi suatu entitas (seperti perusahaan, organisasi, atau individu) dalam satu tahun tertentu dengan referensi kepada tahun sebelumnya. Hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang apakah prestasi telah meningkat, menurun, atau tetap stabil dari satu tahun ke tahun berikutnya. Perbandingan ini dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti keuangan, penjualan, produksi, atau prestasi individu.

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas adalah suatu evaluasi atau analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil atau kinerja suatu instansi atau organisasi (dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas) sejalan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis jangka menengah.

**Tabel 14.4.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini**  
**Dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan**  
**Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PK 2022	RPJMD	RENTRA
1.	Meningkatkan pelestarian budaya daerah	Terjaga dan Terpeliharanya Cagar Budaya	16 Objek	16 Objek	16 Objek
		Registrasi Nasional Diduga Cagar Budaya	5 Objek	5 Objek	5 Objek
		Tercatatnya Data Warisan Budaya Tak benda (WBTb) Kabupaten Gunung Mas	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
		Terlaksananya Lomba Menulis Cerita Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb)	1 expl buku	1 expl buku	1 expl buku
		Terlaksananya pelatihan bagi Pelaku Seni dan Pengelola Sanggar se-Kabupaten Gunung Mas	50 orang	50 orang	50 orang

Selarasnya target dalam PK (Perjanjian Kinerja), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor tersebut. Ini karena ketiga dokumen tersebut saling terkait dan saling mendukung dalam upaya mencapai visi dan misi pemerintah daerah terkait bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dengan memastikan bahwa PK, RPJMD, dan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaras dalam visi, misi, tujuan, strategi, dan pelaksanaan, dapat meningkatkan efektivitas upaya pembangunan di sektor Pariwisata dan mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang.

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dapat melibatkan beberapa faktor dan langkah-langkah yang telah diambil. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dipertimbangkan:

Penyebab Keberhasilan:

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas: Keberhasilan dapat disebabkan oleh adanya staf yang terampil, berpengetahuan, dan berdedikasi dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pelatihan

dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan kualitas layanan dan manajemen.

2. Peningkatan Promosi Pariwisata: Jika terdapat peningkatan dalam promosi pariwisata Gunung Mas melalui pemasaran yang efektif, kampanye media sosial, atau kemitraan dengan agen perjalanan, ini dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung.
3. Dukungan Anggaran yang Memadai: Keberhasilan juga dapat dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung program-program kebudayaan dan pariwisata. Dana yang cukup dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur pariwisata dan acara budaya.
4. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, dapat meningkatkan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

1. Kurangnya Sumber Daya: Kurangnya anggaran, personil, atau infrastruktur yang memadai dapat menjadi penyebab kegagalan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
2. Kurangnya Perencanaan dan Strategi Jangka Panjang: Tanpa rencana jangka panjang yang kuat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mungkin gagal mencapai tujuan yang jelas dan berkelanjutan.
3. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Lokal: Peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata sangat penting. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat keberhasilan program-program.
4. Krisis atau Perubahan Eksternal: Perubahan eksternal seperti krisis kesehatan global (seperti pandemi COVID-19) atau perubahan iklim dapat mengganggu industri pariwisata secara keseluruhan.

#### Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

1. Peningkatan Promosi Digital: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat meningkatkan promosi pariwisata secara digital dengan memanfaatkan media sosial, situs web, dan platform periklanan online.
2. Diversifikasi Produk Pariwisata: Menambahkan beragam produk pariwisata seperti ekowisata, wisata budaya, atau wisata petualangan dapat membantu menarik berbagai jenis wisatawan.
3. Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur pariwisata seperti jalan, penginapan, dan fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan daya tarik destinasi.
4. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan program-program kebudayaan dan pariwisata dapat meningkatkan dukungan dan keberlanjutan.
5. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Mencari sumber pendapatan tambahan seperti sponsor, dana hibah, atau investasi swasta dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran.
6. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Mencari sumber pendapatan tambahan seperti sponsor, dana hibah, atau investasi swasta dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran.
7. Pemantauan dan Evaluasi Terus-Menerus: Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi program-program yang ada agar dapat menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan lingkungan.

Penting untuk mencatat bahwa setiap kasus memiliki dinamika dan tantangan yang unik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil harus disesuaikan dengan situasi lokal, tujuan yang ingin dicapai, dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait dan pemantauan yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas berdasarkan perjanjian kinerja (PK) memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam PK. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis efisiensi:

1. Evaluasi Kinerja: Pertama-tama, perlu dievaluasi sejauh mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mencapai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam PK. Ini melibatkan pengukuran kinerja yang sebenarnya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi Kinerja: Pertama-tama, perlu dievaluasi sejauh mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mencapai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam PK. Ini melibatkan pengukuran kinerja yang sebenarnya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
3. Penggunaan Sumber Daya Manusia: Evaluasi apakah sumber daya manusia yang tersedia (personil) digunakan secara efisien dalam pelaksanaan program. Apakah staf memiliki kualifikasi dan pelatihan yang sesuai untuk tugas mereka?
4. Penggunaan Fasilitas dan Infrastruktur: Tinjau penggunaan fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apakah fasilitas tersebut dimanfaatkan dengan optimal? Apakah ada masalah pemeliharaan atau kekurangan infrastruktur?
5. Hasil Kegiatan: Evaluasi hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan. Apakah program-program tersebut menghasilkan dampak yang diharapkan? Misalnya, apakah kunjungan wisatawan meningkat atau budaya lokal lebih mendapatkan perhatian?
6. Keterlibatan Masyarakat Lokal: Tinjau sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan dan pariwisata.

Apakah ada upaya yang cukup untuk menggandeng masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata?

7. Kualitas Pelaporan: Tinjau kualitas pelaporan yang disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pihak yang berwenang. Apakah data dan informasi yang disampaikan akurat dan tepat waktu?
8. Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi: Pastikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan kebudayaan dan pariwisata, termasuk tata kelola yang baik dan transparansi.
9. Evaluasi Risiko: Identifikasi risiko-risiko yang mungkin memengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya dan upaya mitigasinya.

Setelah melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek di atas, Anda dapat mengidentifikasi area-area di mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas telah berhasil dalam penggunaan sumber daya dan area-area yang memerlukan perbaikan. Alternatif solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat mencakup:

- Revisi Prioritas Anggaran: Mengalokasikan ulang anggaran untuk program yang lebih efektif atau strategis.
- Pengembangan Keterampilan Staf: Melakukan pelatihan dan pengembangan staf untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas.
- Peningkatan Monitoring dan Evaluasi: Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.
- Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan dengan pihak eksternal, seperti sektor swasta atau LSM, untuk mendukung pelaksanaan program.
- Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan program kebudayaan dan pariwisata.

- Peningkatan Pelaporan: Memastikan pelaporan yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Analisis efisiensi seperti ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dapat terus meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Analisis program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dapat memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor yang memengaruhi hasil. Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan analisis semacam itu:

1. Identifikasi Pernyataan Kinerja (PK) yang Signifikan: Tentukan pernyataan kinerja kunci yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas. Ini bisa mencakup jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan dari pariwisata, pengembangan acara budaya, dll.
2. Analisis Program dan Kegiatan: Tinjau program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapai pernyataan kinerja tersebut. Identifikasi program atau kegiatan yang dianggap paling berdampak dan relevan untuk pencapaian tujuan.
3. Evaluasi Efektivitas Program: Pertimbangkan apakah program-program tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Periksa data kuantitatif dan kualitatif yang mengukur hasil dari program-program tersebut.
4. Faktor Pendukung dan Penghambat: Identifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program dan kegiatan. Faktor-faktor ini bisa berupa dukungan anggaran, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, keterlibatan masyarakat, atau masalah birokrasi.

5. **Evaluasi Efektivitas Program:** Pertimbangkan apakah program-program tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Periksa data kuantitatif dan kualitatif yang mengukur hasil dari program-program tersebut.
6. **Keterlibatan Pihak Terkait:** Tinjau sejauh mana pihak-pihak terkait seperti masyarakat lokal, pelaku pariwisata, atau sektor swasta terlibat dalam mendukung program-program kebudayaan dan pariwisata.
7. **Pengaruh Faktor Eksternal:** Perhatikan pengaruh faktor eksternal seperti perubahan dalam tren pariwisata, perubahan iklim, atau peristiwa global (seperti pandemi COVID-19) yang mungkin telah memengaruhi pencapaian pernyataan kinerja.
8. **Evaluasi Risiko:** Identifikasi risiko-risiko yang mungkin memengaruhi pencapaian tujuan dan pernyataan kinerja, dan kemudian pertimbangkan upaya mitigasi yang telah diambil.
9. **Kualitas Pelaporan:** Tinjau kualitas pelaporan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan. Apakah data yang disampaikan akurat dan relevan?
10. **Pengaruh Program Lain:** Pertimbangkan pengaruh program atau kegiatan lain yang tidak langsung terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata namun dapat memengaruhi pencapaian tujuan tersebut.
11. **Rekomendasi Perbaikan:** Berdasarkan analisis Anda, identifikasi program-program yang telah berhasil dan rekomendasikan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk program-program yang belum berhasil. Fokus pada solusi konkret yang dapat meningkatkan efektivitas.
12. **Perbaikan Strategi:** Jika ada program yang tidak berhasil, pertimbangkan apakah perlu merancang ulang strategi atau menciptakan program yang lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

13. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan: Setelah mengimplementasikan perbaikan, pastikan ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan dan membuat penyesuaian jika diperlukan.

Analisis seperti ini harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan dan manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas. Hal ini akan membantu memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan program-program yang mendukung pencapaian tujuan tetap fokus dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 14.5.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
14	Jumlah kesenian daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	-	37	43	116,22	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIMISATA

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 14: MENINGKATNYA PENGELOLAAN BUDAYA DAERAH** yang diukur dengan Indikator Jumlah Kesenian Daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 116,22%.

**SASARAN STRATEGIS 15****MEMBANGUN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI DAERAH**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 15: Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah diukur melalui indikator Pertumbuhan Destinasi Wisata Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 15.1.**  
**Sasaran Strategis 15: Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
15	Membangun Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah	Pertumbuhan destinasi wisata daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Berdasarkan Tabel 15.1. di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 1 ini, yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

### 1. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Hasil pengukuran kinerja Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya diukur melalui indikator program Mengembangkan Potensi Pariwisata Daerah Berbasis Budaya Lokal dan Wisata Alam (Ecotourism) dengan indikator kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 15.2.**  
**Target dan Realisasi Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Mengembangkan Potensi Pariwisata Daerah Berbasis Budaya Lokal dan Wisata Alam (Ecotourism)			
	Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Untuk Pengembangan Aplikasi Smart Tourism.	1 Tahun	1 Tahun	100,00
	Tersusunnya Penjelasan Daya Tarik Wisata Melalui keputusan Bupati	1 DWT	1 DWT	100,00
<b>Rata-rata capaian</b>				<b>100</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 100%.**

Berdasarkan tabel di atas, seluruh indikator kinerja utama tercapai memenuhi target dengan rata-rata capaian kinerja adalah 100 %.

Dalam konteks diatas terlihat bahwa seluruh indikator kinerja utama (IKU) telah mencapai target yang ditetapkan, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Ini adalah pencapaian yang sangat baik dan menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata telah berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam analisis kinerja, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi hasil dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkannya. Ini bisa termasuk perencanaan strategis yang lebih baik, pengalokasian sumber daya yang lebih efisien, atau perbaikan dalam pelaksanaan proyek atau layanan. Secara keseluruhan, hasil yang baik dalam pencapaian kinerja harus dilihat sebagai kesempatan untuk terus meningkatkan kinerja dan mencapai target yang lebih tinggi di masa depan.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir adalah metode yang berguna untuk mengevaluasi perkembangan dan tren kinerja suatu entitas (seperti perusahaan atau organisasi) dalam beberapa periode waktu yang berbeda. Ini membantu dalam pemahaman sejauh mana kinerja telah berkembang dari tahun ke tahun, dan apakah ada perubahan tren yang signifikan.

Perbandingan kinerja antara tahun ini, tahun lalu, dan beberapa tahun terakhir adalah alat penting dalam manajemen bisnis yang dapat membantu dalam perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tren dan perubahan kinerja, entitas atau organisasi

dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi berikut disampaikan table perbandingan Target dan capaian Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas:

**Tabel 15.3.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun ke Tahun**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
2	Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (Ecotourism)	Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Untuk Pengembangan Aplikasi Smart Tourism.	1	1	1
		Tersusunnya Penjelasan Daya Tarik Wisata Melalui keputusan Bupati	1	1	1
		Tersediannya Sarana Dan Prasarana Fasilitas Penunjang Peralatan Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas	3	3	3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas adalah suatu evaluasi atau analisis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana pencapaian hasil atau kinerja suatu instansi atau organisasi (dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas) sejalan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis jangka menengah.

**Tabel 15.4.**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	PK 2022	RPJMD	RENTRA
2	Mengembangkan potensi pariwisata daerah berbasis budaya lokal dan wisata alam (Ecotourism)	Tersedianya Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Untuk Pengembangan Aplikasi Smart Tourism.	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
		Tersusunnya Penjelasan Daya Tarik Wisata Melalui keputusan Bupati	1 DWT	1 DWT	1 DWT
		Tersediannya Sarana Dan Prasarana Fasilitas Penunjang Peralatan Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas	3 Unit	3 Unit	3 Unit

Selarasnya target dalam PK (Perjanjian Kinerja), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor tersebut. Ini karena ketiga dokumen tersebut saling terkait dan saling mendukung dalam upaya mencapai visi dan misi pemerintah daerah terkait bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dengan memastikan bahwa PK, RPJMD, dan RENSTRA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaras dalam visi, misi, tujuan, strategi, dan pelaksanaan, dapat meningkatkan efektivitas upaya pembangunan di sektor Pariwisata dan mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka panjang.

Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dapat melibatkan beberapa faktor dan langkah-langkah yang telah diambil. Berikut adalah beberapa poin yang dapat dipertimbangkan:

Penyebab Keberhasilan:

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas: Keberhasilan dapat disebabkan oleh adanya staf yang terampil, berpengetahuan, dan berdedikasi dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pelatihan dan pengembangan karyawan dapat meningkatkan kualitas layanan dan manajemen.
2. Dukungan Anggaran yang Memadai: Keberhasilan juga dapat dipengaruhi oleh alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung program-program kebudayaan dan pariwisata. Dana yang cukup dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur pariwisata dan acara budaya.
3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal, dapat meningkatkan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

#### Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja:

1. Kurangnya Sumber Daya: Kurangnya anggaran, personil, atau infrastruktur yang memadai dapat menjadi penyebab kegagalan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata.
2. Kurangnya Perencanaan dan Strategi Jangka Panjang: Tanpa rencana jangka panjang yang kuat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mungkin gagal mencapai tujuan yang jelas dan berkelanjutan.
3. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat Lokal: Peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata sangat penting. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menghambat keberhasilan program-program.
4. Krisis atau Perubahan Eksternal: Perubahan eksternal seperti krisis kesehatan global (seperti pandemi COVID-19) atau perubahan iklim dapat mengganggu industri pariwisata secara keseluruhan.

#### Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

8. Peningkatan Promosi Digital: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat meningkatkan promosi pariwisata secara digital dengan memanfaatkan media sosial, situs web, dan platform periklanan online.
9. Diversifikasi Produk Pariwisata: Menambahkan beragam produk pariwisata seperti ekowisata, wisata budaya, atau wisata petualangan dapat membantu menarik berbagai jenis wisatawan.
10. Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur pariwisata seperti jalan, penginapan, dan fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan daya tarik destinasi.
11. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan program-program kebudayaan dan pariwisata dapat meningkatkan dukungan dan keberlanjutan.

12. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Mencari sumber pendapatan tambahan seperti sponsor, dana hibah, atau investasi swasta dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran.
13. Diversifikasi Sumber Pendapatan: Mencari sumber pendapatan tambahan seperti sponsor, dana hibah, atau investasi swasta dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran.
14. Pemantauan dan Evaluasi Terus-Menerus: Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi program-program yang ada agar dapat menyesuaikan strategi sesuai dengan perubahan lingkungan.

Penting untuk mencatat bahwa setiap kasus memiliki dinamika dan tantangan yang unik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil harus disesuaikan dengan situasi lokal, tujuan yang ingin dicapai, dan sumber daya yang tersedia. Selain itu, keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait dan pemantauan yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas berdasarkan perjanjian kinerja (PK) memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam PK. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis efisiensi:

1. Evaluasi Kinerja: Pertama-tama, perlu dievaluasi sejauh mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mencapai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam PK. Ini melibatkan pengukuran kinerja yang sebenarnya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi Kinerja: Pertama-tama, perlu dievaluasi sejauh mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mencapai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam PK. Ini melibatkan pengukuran

kinerja yang sebenarnya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

3. Penggunaan Sumber Daya Manusia: Evaluasi apakah sumber daya manusia yang tersedia (personil) digunakan secara efisien dalam pelaksanaan program. Apakah staf memiliki kualifikasi dan pelatihan yang sesuai untuk tugas mereka?
4. Penggunaan Fasilitas dan Infrastruktur: Tinjau penggunaan fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apakah fasilitas tersebut dimanfaatkan dengan optimal? Apakah ada masalah pemeliharaan atau kekurangan infrastruktur?
5. Hasil Kegiatan: Evaluasi hasil dari program dan kegiatan yang dilakukan. Apakah program-program tersebut menghasilkan dampak yang diharapkan? Misalnya, apakah kunjungan wisatawan meningkat atau budaya lokal lebih mendapatkan perhatian?
6. Keterlibatan Masyarakat Lokal: Tinjau sejauh mana masyarakat lokal terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan dan pariwisata. Apakah ada upaya yang cukup untuk menggandeng masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata?
7. Kualitas Pelaporan: Tinjau kualitas pelaporan yang disampaikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kepada pihak yang berwenang. Apakah data dan informasi yang disampaikan akurat dan tepat waktu?
8. Kepatuhan Terhadap Aturan dan Regulasi: Pastikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan kebudayaan dan pariwisata, termasuk tata kelola yang baik dan transparansi.
9. Evaluasi Risiko: Identifikasi risiko-risiko yang mungkin memengaruhi efisiensi penggunaan sumber daya dan upaya mitigasinya.

Setelah melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek di atas, Anda dapat mengidentifikasi area-area di mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas telah berhasil dalam penggunaan sumber daya dan area-area yang memerlukan perbaikan. Alternatif solusi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat mencakup:

- Revisi Prioritas Anggaran: Mengalokasikan ulang anggaran untuk program yang lebih efektif atau strategis.
- Pengembangan Keterampilan Staf: Melakukan pelatihan dan pengembangan staf untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas.
- Peningkatan Monitoring dan Evaluasi: Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik.
- Kemitraan dan Kolaborasi: Membangun kemitraan dengan pihak eksternal, seperti sektor swasta atau LSM, untuk mendukung pelaksanaan program.
- Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan program kebudayaan dan pariwisata.
- Peningkatan Pelaporan: Memastikan pelaporan yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Analisis efisiensi seperti ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dapat terus meningkatkan kinerjanya dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Analisis program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas dapat memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor yang memengaruhi hasil. Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan analisis semacam itu:

1. Identifikasi Pernyataan Kinerja (PK) yang Signifikan: Tentukan pernyataan kinerja kunci yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas. Ini bisa mencakup jumlah kunjungan wisatawan, pendapatan dari pariwisata, pengembangan acara budaya, dll.
2. Analisis Program dan Kegiatan: Tinjau program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mencapai pernyataan kinerja tersebut. Identifikasi program atau kegiatan yang dianggap paling berdampak dan relevan untuk pencapaian tujuan.
3. Evaluasi Efektivitas Program: Pertimbangkan apakah program-program tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Periksa data kuantitatif dan kualitatif yang mengukur hasil dari program-program tersebut.
4. Faktor Pendukung dan Penghambat: Identifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program dan kegiatan. Faktor-faktor ini bisa berupa dukungan anggaran, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur yang memadai, keterlibatan masyarakat, atau masalah birokrasi.
5. Evaluasi Efektivitas Program: Pertimbangkan apakah program-program tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Periksa data kuantitatif dan kualitatif yang mengukur hasil dari program-program tersebut.
6. Keterlibatan Pihak Terkait: Tinjau sejauh mana pihak-pihak terkait seperti masyarakat lokal, pelaku pariwisata, atau sektor swasta terlibat dalam mendukung program-program kebudayaan dan pariwisata.
7. Pengaruh Faktor Eksternal: Perhatikan pengaruh faktor eksternal seperti perubahan dalam tren pariwisata, perubahan iklim, atau peristiwa global (seperti pandemi COVID-19) yang mungkin telah memengaruhi pencapaian pernyataan kinerja.

8. Evaluasi Risiko: Identifikasi risiko-risiko yang mungkin memengaruhi pencapaian tujuan dan pernyataan kinerja, dan kemudian pertimbangkan upaya mitigasi yang telah diambil.
9. Kualitas Pelaporan: Tinjau kualitas pelaporan yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan. Apakah data yang disampaikan akurat dan relevan?
10. Pengaruh Program Lain: Pertimbangkan pengaruh program atau kegiatan lain yang tidak langsung terkait dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata namun dapat memengaruhi pencapaian tujuan tersebut.
11. Rekomendasi Perbaikan: Berdasarkan analisis Anda, identifikasi program-program yang telah berhasil dan rekomendasikan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk program-program yang belum berhasil. Fokus pada solusi konkret yang dapat meningkatkan efektivitas.
12. Perbaikan Strategi: Jika ada program yang tidak berhasil, pertimbangkan apakah perlu merancang ulang strategi atau menciptakan program yang lebih efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
13. Pengawasan dan Evaluasi Berkelanjutan: Setelah mengimplementasikan perbaikan, pastikan ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memantau perkembangan dan membuat penyesuaian jika diperlukan.

Analisis seperti ini harus menjadi bagian integral dari proses perencanaan dan manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas. Hal ini akan membantu memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan program-program yang mendukung pencapaian tujuan tetap fokus dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun

2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 15.5.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
15	Pertumbuhan Destinasi Wisata Daerah	-	10	9	90,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 15: MEMBANGUN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI DAERAH** yang diukur dengan Indikator Pertumbuhan Destinasi Wisata Daerah, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tinggi dengan capaian 90%.

### **SASARAN STRATEGIS 16**

### **MENURUNNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN**

Keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis 16: Menurunnya Pencemaran Lingkungan diukur melalui indikator Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 16.1.**  
**Sasaran Strategis 16: Menurunnya Pencemaran Lingkungan**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	PD PENANGGUNG JAWAB
16	Menurunnya Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		Indeks Kualitas Udara			
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan			

Berdasarkan Tabel 16.1. di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) program dalam sasaran strategis 16 ini, yaitu PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP.

### 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Hasil pengukuran kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup termasuk dalam Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Perhubungan yaitu Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Hidup dengan indikator sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 16.2.**  
**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	52,70	46,67	88,55
	Indeks Kualitas Udara	83,55	87,75	105,03
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	71,02	71,25	101,30
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,21	68,82	99,43
Rata-rata capaian				<b>99</b>

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa **Program Perencanaan Lingkungan Hidup termasuk Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 99%.**

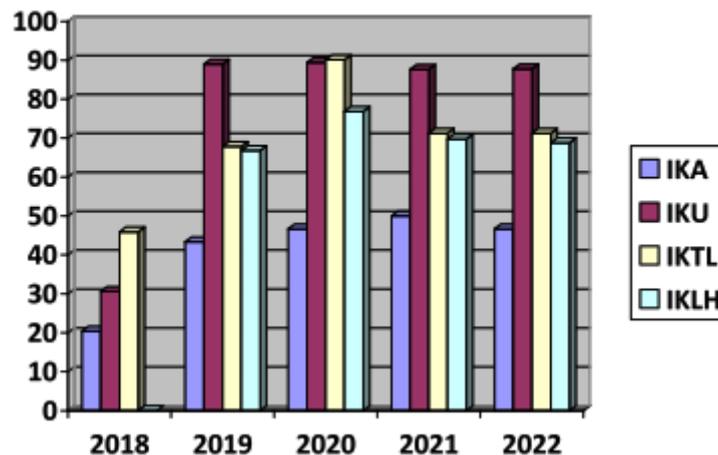
Dari hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama diatas, indeks pencemaran air ditahun 2022 47,67 dengan tingkat capaian 88,55%, (kategori IKLH Waspada) Indeks Pencemaran Udara di tahun 2022 87,75 dengan tingkat capaian 105,03%, (kategori IKLH sangat baik) sedangkan untuk Indeks Tutupan Lahan di tahun 2022 71,25 dengan tingkat capaian 101,35% (kategori IKLH Cukup).

Persentase rencana tingkat realisasi dan capaian yang belum optimal dikarenakan akibat aktifitas pertambangan emas tanpa ijin (PETI) di Daerah Aliran Sungai sehingga berpengaruh terhadap indeks pencemaran air.

**Tabel 16.3.**  
**Hasil Analisis Pencapaian Sasaran Tahun Terakhir**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
1.	Indeks Kualitas Air	skor	52,60	50,00	95,05%
2.	Indeks Kualitas Udara	skor	83,45	87,65	105,03%
3.	Indeks Tutupan Lahan	skor	70,30	71,25	101,35 %

**Tabel 16.4.**  
**Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4 Tahun Terakhir**



Hal-hal yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain adalah:

1. Unit kerja belum mampu merencanakan program dan atau kegiatannya sekaligus pengeluarannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi, skala prioritas dan sasaran dan indikator kinerja;
2. Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas masih bergantung pada pekerjaan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI);
3. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan belum sesuai arah kebijakan dan perencanaan daerah.

Berikut disajikan Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas.

**Tabel 16.5.**  
**Realisasi Capaian Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Sesuai Dengan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PERANGKAT DAERAH / SUMBER DATA
			2022	2022	(%)	
16	Indeks Kualitas Air	score	46,7	46,67	99,94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERHUBUNGAN DAN KEHUTANAN
	Indeks Kualitas Udara	score	89,6	87,75	97,94	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERHUBUNGAN DAN KEHUTANAN
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	score	90,2	71,25	78,99	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERHUBUNGAN DAN KEHUTANAN

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data di atas yang didapatkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Gunung Mas, untuk **SASARAN STRATEGIS 16: MENURUNNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN** yang diukur melalui indikator (1) Indeks Kualitas Air, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 99,94%; (2) Indeks Kualitas Udara, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Sangat Tinggi dengan capaian 97,94%; dan (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan, persentase capaian masuk dalam Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Tinggi dengan capaian 78,9



### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PBN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023 SATKER DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA BIDANG PRASARANA DAN SARANA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

#### **A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2022;

10. Surat Pengesahan DIPA DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA – 018.08.4.149120/2023 Tanggal 30 November 2022;
11. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 01/SATKER 08/TP/III/2023 Tanggal 03 Maret 2023 tentang struktur organisasi, uraian tugas, pembagian tugas, honorarium, pejabat pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah 08 Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;

## **B. INSTANSI PEMBERI TUGAS BANTUAN**

1. Kementerian Pertanian
2. Ditjen PSP

### **3.1. TARGET KINERJA**

#### **3.1.1. PROGRAM, KEGIATAN DAN PELAKSANAANNYA**

1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
3. Penyusunan e-RDKK Untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi
4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisida

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Pagu Anggaran (Rp)</b>
Monitoring Dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian	10.000.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	41.200.000
Penyusunan e-RDKK Untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	1.200.000
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisida	13.101.000

### 3.2. REALISASI

**MATRIKS CAPAIAN KINERJA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	KAB/KOTA	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Pertanian	Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 01/SATKER 08/TP/III/2023 Tanggal 03 Maret 2023 tentang struktur organisasi, uraian tugas, pembagian tugas, honorarium, pejabat pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian</li> <li>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen</li> <li>Penyusunan e-RDCK Untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi</li> <li>Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisida</li> </ol>	Kabupaten Gunung Mas	Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas (Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas)	10.000.000	10.000.000	100%			
						41.200.000	41.200.000	100%			
						1.200.000	1.200.000	100%			
						52.450.000	52.450.000	100%			

		Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah 08 Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;									
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### **3.3. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian**

Permasalahan yang dihadapi adalah penggunaan alat dan mesin pertanian yang dilakukan oleh petani tidak sesuai dengan yang diharapkan dan terdapat banyak alat dan mesin pertanian yang hilang dan tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya.



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STÁNDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 3.1. URUSAN PENDIDIKAN

##### A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Dasar;
- b. Pendidikan Kesetaraan;
- c. Pendidikan Anak Usia Dini.

##### B. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan (Rp)
			%	Tahun	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	2023	6,043,259,698,-
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100	2023	9,429,304,770,-
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100	2023	275,406,245,-

### C. Realisasi

#### Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian
			Orang	Orang	%
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	3868	3868	100
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	23031	23031	100
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	140	140	100

### D. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas adalah, sebagai berikut:

#### **Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Gunung Mas**

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	15.747.970.713,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.747.970.713,-</b>

## E. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas memiliki formasi Eselon, sebagai berikut:

- Eselon II.b = 1 orang
- Eselon III.a = 1 orang
- Eselon III.b = 4 orang
- Eselon IV.a = 15 orang
- Total = 21 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pada tingkat pendidikannya adalah, sebagai berikut:

- Pasca Sarjana = 8 orang
- Sarjana (SI) = 27 orang
- D3 = 2 orang
- SLTA = 12 orang
- Total = 49 orang

Jumlah Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut:

- Guru PAUD/TK (PNS dan Honor) = 640 orang
- Jumlah Guru SD/MI (PNS dan Honor) = 1697 orang
- Jumlah Guru SMP/MTs (PNS dan Honor) = 652 orang
- Total = 2989 orang

## **F. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

- 1) Belum tercapainya target APK dan APM Jenjang PAUD dan Dikdas;
- 2) Masih rendahnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi sebagai pendidik (sertifikasi profesi);
- 3) Distribusi Pendidik yang belum merata;
- 4) Sarana prasarana minimal pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs belum 100 persen tercukupi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
- 5) Masih ada anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs.

### **b. Solusi**

- 1) Optimalisasi Pemanfaatan Pendanaan Pendidikan;
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan;
- 3) Penguatan Lembaga (Satuan Pendidikan) PAUD;
- 4) Mendorong pemerintah desa/kelurahan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas PAUD;
- 5) Meningkatkan aksesibilitas penduduk mendapatkan pelayanan Pendidikan (sekolah), jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- 6) Pengembangan profesionalisme guru dengan lebih aktif mengikuti KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran);
- 7) Mengikutsertakan dalam pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran;
- 8) Melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
- 9) Asistensi guru yang telah bersertikat pendidik terhadap guru yang belum bersertifikat pendidik;
- 10) Update data Pendidik disetiap Satuan Pendidikan;

- 11) Pendistribusikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkala, dengan tujuan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di setiap Satuan Pendidikan;
- 12) Pengangkatan tenaga Pendidik melalui PPPK untuk mengisi kekurangan guru;
- 13) Diterbitkannya regulasi (Peraturan Bupati) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- 14) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang sudah ada di setiap Satuan Pendidikan;
- 15) Optimalisasi pendanaan dari berbagai sumber dana seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DID (Dana Insentif Daerah);
- 16) Memperkuat manajemen sekolah yakni Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan (sekolah);
- 17) Pembebasan Biaya Sekolah;
- 18) Bantuan perlengkapan siswa;
- 19) Edukasi orang tua/wali siswa, tentang pentingnya Pendidikan.

## 3.2. URUSAN KESEHATAN

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis;
- l. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human Immunodeficiency Virus*).

### 2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan (Rp)
			%	Tahun	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2023	1,231,561,200
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2023	1,549,048,116
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2023	129,865,204

4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2023	411,371,606
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2023	610,632,000
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2023	1,303,378,700
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2023	297,183,500
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2023	113,375,641
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100	2023	91,371,299
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	2023	530,929,300
11.	Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	100	2023	592,245,880
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan.	100	2023	358,682,158

### 3. Realisasi

#### Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian SPM 2023
			orang	orang	%
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	2353	2348	99.78
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	2247	1575	73.05
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	2140	2140	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	10.826	10.826	100
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	19.331	19.331	100
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	54.422	54.422	100
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	12.090	11.334	93.75
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	13.738	13.738	100
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes mellitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	7.106	7.106	100

10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	180	180	100
11.	Pelayanan kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	2.181	2.181	100
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah Warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan.	2.505	2.505	98.76

#### 4. Alokasi Anggaran

##### Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	131.605.558.915,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>131.605.558.915,00</b>

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah:

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas memiliki formasi Eselon, sebagai berikut :

- Eselon II.b = 1 orang
- Eselon III.a = 1 orang
- Eselon III.b = 3 orang
- Eselon IV.a = 12 orang
- Eselon IV.b = 0 orang
- Jumlah = 17 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pada tingkat pendidikannya adalah, sebagai berikut:

➤ Dokter	= 35 orang
➤ Dokter Spesialis	= 11 orang
➤ Dokter Gigi	= 1 orang
➤ Apoteker	= 11 orang
➤ Perawat	= 455 orang
➤ Bidan	= 259 orang
➤ Perawat Gigi	= 9 orang
➤ Kesmas	= 13 orang
➤ Kesling	= 9 orang
➤ Pranata Labkes	= 25 orang
➤ Nustrisionis	= 19 orang
➤ Ass. Apoteker	= 30 orang
➤ Non Kes	= 169 orang
Jumlah	= 1.1011 orang

## 6. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

- 1) Keterbatasan anggaran APBD terutama bersumber DAU mengakibatkan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana kesehatan sebagian besar didanai dari Dana DAK yang penggunaannya telah ditentukan dan dibatasi oleh Juknis serta hanya pada Tingkat Puskesmas (tidak pada Level Desa/Pustu/Poskesdes) sehingga penerapan SPM di ujung tombak pelayanan kurang optimal;
- 2) Penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Kabupaten Gunung Mas belum merata untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik ke masyarakat sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan masih belum bisa mencapai target yang sudah

ditetapkan oleh nasional;

- 3) Penetapan target, sistem pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan serta Koordinasi baik itu pada level petugas kesehatan di lapangan, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng bahkan pada level Direktorat Jenderal di Kementerian Kesehatan RI yang belum terpadu dan konsisten;
- 4) Pemahaman Petugas Kesehatan Definisi Operasional dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang belum sempurna saat melakukan pelayanan kepada masyarakat;
- 5) Perilaku hidup masyarakat, budaya serta yang ada seringkali menjadi kendala petugas kesehatan di lapangan sehingga pencapaian target suatu kegiatan menjadi kurang maksimal. Misalnya : pada pelayanan kesehatan usia produktif atau hipertensi banyak masyarakat yang tidak memeriksakan kesehatan (upaya promotif) saat sehat tetapi akan berkunjung saat sakit;
- 6) Masih adanya Pandemi Covid-19 sehingga menghambat terlaksananya kegiatan-kegiatan, Misalnya anak-anak sekolah yang belajar dengan sistem jarak jauh (daring).

b. Solusi

- 1) Melakukan efektifitas anggaran serta berorientasi pada pencapaian SPM dengan melakukan Perencanaan yang tepat, sesuai kebutuhan dan terarah;
- 2) Penambahan Tenaga Kesehatan di daerah melalui program nusantara sehat, pengangkatan tenaga kontrak daerah serta menggiatkan kegiatan luar gedung yang mempunyai keterkaitan dengan pencapaian SPM;
- 3) Penetapan Target sasaran serta petunjuk pelaksanaan SPM di bidang kesehatan dibuat pada awal tahun serta

dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPM di Puskesmas;

- 4) Sosialisasi tentang Definisi Operasional SPM pada Pemegang program yang ada di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas;
- 5) Koordinasi dengan Lintas Sektor, pihak pemerintah desa untuk memberikan pelayanan dasar terutama yang berkaitan dengan SPM serta memodifikasi pelayanan sesuai dengan kearifan local daerah.

### 3.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

#### A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

#### B. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan (Rp)
			orang	Tahun	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	87	2023	8.681.600.000,00
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	254	2023	2.284.638.400,00

### C. Realisasi

#### Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian SPM 2023
			Orang	Orang	%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	87	87	100
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	254	254	100

### D. Alokasi Anggaran

#### Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	199.248.740.818,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>199.248.740.818,00</b>

### E. Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 62 orang.

## **F. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

- 1) Instalasi Pengolahan Air (IPA) Terbatas;
- 2) Kapasitas pengolahan air (IPA) yang masih kecil kapasitasnya;
- 3) Kurangnya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana penunjang air bersih yang telah dibangun.

### **b. Solusi**

- 1) Pembangunan (IPA) baru untuk perluasan pelayanan kebutuhan air bersih;
- 2) Peningkatan kapasitas instalasi pipa yang terbangun untuk pengembangan dan perluasan spam di kecamatan;
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana penunjang air bersih yang telah dibangun sebagai melayani kebutuhan air bersih.

## **3.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

### **A. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten;
- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

## B. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan (Rp)
			orang	Tahun	
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	7	2023	109.852.128,00
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	32	2023	-

## C. Realisasi

### Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian SPM 2023
			orang	Orang	%
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	7	7	100
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	32	32	100

		Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten				
--	--	--	--	--	--	--

#### D. Alokasi Anggaran

**Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM  
Urusan Perumahan Rakyat pada Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023**

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD	109.852.128,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>109.852.128,00</b>

#### E. Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 62 orang.

#### F. Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

- 1) Jenis Pelayanan dasar Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten di tahun 2022 pembiayaan hanya untuk belanja penunjang;
- 2) Hingga saat ini di Kabupaten Gunung Mas tidak terdapat masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.

##### b. Solusi

- 1) Untuk pembiayaan jenis pelayanan dasar Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten untuk capaian SPM rumah yang layak huni di anggarkan di tahun 2022;
- 2) Bila terdapat masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten akan segera dianggarkan.

### 3.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

#### 2. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan (Rp)
			orang	Tahun	
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	51	2023	3.715.805.316,00
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	62.683	2023	618.028.700,00
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	200	2023	471.057.625,00
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.768	2023	433.863.840,00

5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	2023	1.675.389.758,00
----	--	--	-----	------	------------------

### 3. Realisasi

#### Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian SPM 2023
			Orang	Orang	%
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	51	51	100
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	62.683	62.683	100
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	200	200	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.768	3.768	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	100	100

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Satpol PP	1.675.389.758,00
2	BPBD	2.040.415.539,00

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas sebanyak 35 personil, dan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas sebanyak 16 personil. Personil tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara yang telah dilatih sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

#### 6. Permasalahan dan Solusi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunung Mas

a. Permasalahan

- 1) Kurangnya kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunung Mas;
- 2) Sarana dan Prasarana ketenteraman dan ketertiban dan Pemadam Kebakaran belum memadai.

b. Solusi

- 1) Meningkatkan kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengikuti pendidikan/pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Untuk sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan diusulkan.

## Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas

### a. Permasalahan

- 1) Belum tersedianya dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Perencanaan Kontinjensi (PK);
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) selaku Tenaga Teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 3) Kurangnya koordinasi yang humanis dan sinergi pada saat perencanaan kegiatan;
- 4) Belum pernah dilaksanakan pelatihan kebencanaan bagi tenaga TRC Kabupaten Gunung Mas.

### b. Solusi

- 1) Agar di tahun mendatang dalam menyusun dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Perencanaan Kontinjensi (PK);
- 2) Agar mengusulkan sarana dan prasarana serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) selaku Tenaga Teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- 3) Diharapkan agar dilaksanakan rapat koordinasi Pra penyusunan program sebelum pelaksanaan input kegiatan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
- 4) Perlu diusulkan kegiatan pelatihan kebencanaan bagi tenaga TRC Kabupaten Gunung Mas.

### 3.6. URUSAN SOSIAL

#### A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten.

#### B. Target Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target		Pembiayaan (Rp)
			orang	Tahun	
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	50	2023	483.819.964,00
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	40	2023	431.427.964,00

### C. Realisasi

#### Realisasi Pencapaian SPM Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Capaian SPM 2023
			orang	orang	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	50	50	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	40	40	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	50	50	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	50	50	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	200	200	100

#### D. Alokasi Anggaran

##### Alokasi Anggaran yang mendukung Pencapaian SPM pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)
1	APBD LAINNYA	483.819.964,00 -
	JUMLAH	483.819.964,00

#### E. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS = 23 orang
- b. Non-PNS = 22 orang

Selain pegawai yang mendukung administrasi, dalam program kegiatan dibantu oleh petugas lapangan sebagai pendamping program, baik itu program kabupaten maupun program nasional, dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan ( TKSK )	12 orang	Bertugas di wilayah Kecamatan
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	145 orang	Bertugas di wilayah desa dan Kecamatan
3.	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	10 orang	Bertugas di wilayah desa dan Kecamatan
4.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	10 orang	Bertugas Di Wilayah Kacamatan

## **F. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

- 1) Belum Tuntasnya penanganan Penyandang Disabilitas Mental;
- 2) Belum adanya SDM Pekerja Sosial dalam penanganan penerapan SPM;
- 3) Kurangnya Alokasi Anggaran untuk menerapkan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Sosial No. 59 Tahun 2021.

### **b. Solusi**

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten masalah penanganan Penyandang Disabilitas Mental pasca rujukan;
- 2) Mengusulkan penerimaan CPNS/P3K untuk formasi pekerja sosial.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini menggambarkan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2023, dimana setiap organisasi pemerintah menyampaikan hasil penyelenggaraannya dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Capaian hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dituangkan melalui indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Didalam Laporan ini disampaikan Perencanaan Pembangunan Daerah yang didalamnya terdapat Visi Misi Kepala Daerah, Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan. Untuk Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2023 tidak ada, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 kami sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan terhadap Kabupaten Gunung Mas di Tahun 2023 ini. Sekiranya masih banyak ditemui kekurangan-kekurangan baik dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 ini, maka kami sangat mengharapkan masukan baik dari masyarakat dalam hal untuk penyelenggaraan pemerintahan maupun Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Sekian dan terima kasih.